

732 ANGGOTA MPR MASA JABATAN 2024-2029 RESMI DILANTIK

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

MPR RUMAH KEBANGSAAN



MAJELIS

EDISI NO.10/TH.XVIII/X/2024



Terpilih Secara Musyawarah Mufakat

H. AHMAD MUZANI DITETAPKAN Sebagai Ketua MPR RI Masa Jabatan 2024-2029

ISSN 0854-6371



9 770854 637158

22 Nasional
Silaturahmi Pimpinan MPR
Dengan Keluarga Bung Karno

34 Kajian MPR
Menjawab Tantangan
Demokrasi Pancasila

39 Selingan
Terowongan Silaturahmi
Ide dari Nasaruddin Umar

65 Sosialisasi
Generasi Muda Harus Berperan
Aktif Menjaga Keutuhan Bangsa

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Daftar Isi

EDISI NO.10/TH.XVIII/X/ 2024



08 BERITA UTAMA

H. Ahmad Muzani Ditetapkan Sebagai Ketua MPR RI

Sembilan orang Pimpinan MPR RI masa jabatan 2024-2029 secara resmi dilantik dalam Sidang Paripurna MPR RI dengan agenda Pelantikan Pimpinan MPR pada Kamis, 3 Oktober 2024. Dan, sebagai Ketua MPR RI, terpilih H. Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra.



22 Nasional

Tentang Penghapusan Stigmatisasi Negatif Terhadap Presiden Soekarno



65 Sosialisasi

Generasi Muda Harus Berperan Aktif Menjaga Koutuhan Bangsa



39 SELINGAN

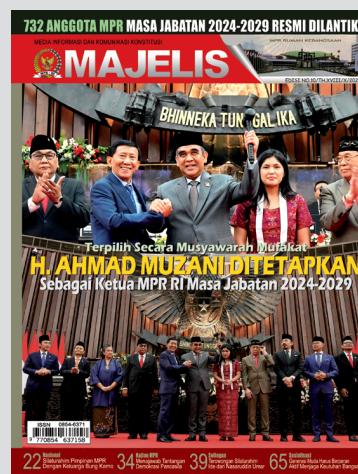
Terowongan Silaturahmi



82 Profil

H.R. Muhammad Syaff'i

Pengantar Redaksi	04
Perspektif	06
Kolom	30
Aspirasi Masyarakat	46
Gema Pancasila	48
Diskusi Majelis	50
Varia MPR	74
Figur	78
Ragam	80
Dari Rumah Kebangsaan	86
Rehal	88



COVER

Edisi No.10/TH.XVIII/X/ 2024

Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

Penetapan dan Pelantikan Pimpinan MPR Periode 2024-2029

PADA Kamis, 3 Oktober 2024, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar Sidang Paripurna dengan agenda Penetapan Pimpinan MPR Masa Jabatan 2024-2029 di Ruang Sidang Paripurna Gedung Nusantara atau lebih dikenal dengan Gedung Hijau atau Gedung Kura-Kura. Sidang paripurna dipimpin oleh Pimpinan Sementara MPR, Guntur Sasono dan Larasati Moriska, serta dihadiri oleh 545 dari 732 anggota MPR RI. Sidang Paripurna Penetapan Pimpinan MPR hingga Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan MPR masa jabatan 2024-2029 berjalan lancar dan sukses tanpa kendala yang berarti.

Kelancaran Sidang Paripurna Penetapan Pimpinan MPR tidak lepas dari peran Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR Sementara dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD pada sehari sebelumnya, Rabu, 2 Oktober 2024. Dalam Ragab itu, setiap fraksi sudah mengusulkan (memasukkan) nama calon Pimpinan MPR. Selain itu, Ragab juga menyepakati Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra sebagai Ketua MPR Periode 2024-2029.

Rencananya Sidang Paripurna Penetapan Pimpinan MPR digelar lebih cepat, yaitu pada Rabu malam, 2 Oktober 2024 karena sudah ada kesepakatan di antara fraksi-fraksi dan kelompok DPD pada saat Ragab. Namun, karena di DPD masih ada dinamika dalam menentukan nama calon Pimpinan MPR, sehingga Kelompok DPD belum berhasil menyerahkan nama calon sesuai kesepakatan fraksi-fraksi dan Kelompok DPD sebelumnya.

Karena, pada 2 Oktober 2024, DPD masih harus menggelar sidang paripurna pemungutan suara (voting) memilih calon Pimpinan MPR hingga dini hari, Kamis 3 Oktober 2024. Dan, hasil akhirnya, anggota DPD dari Sulawesi Tengah, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, terpilih sebagai wakil DPD untuk Pimpinan MPR mengalahkan anggota DPD dari Gorontalo, Fadel Muhammad. Pemilihan cukup seru, berlangsung dua putaran, diikuti 145 senator yang hadir. Hingga hasil akhirnya, Abcandra meraih 93 suara, sementara Fadel Muhammad 50 suara.

Kamis (3 Oktober 2024) usulan nama Pimpinan MPR dari Kelompok DPD ini langsung dibawa ke Sidang Paripurna Penetapan Pimpinan MPR. Pimpinan Sementara MPR Guntur Sasono mempersilakan Ketua Kelompok DPD untuk mengumumkan perwakilan DPD untuk Pimpinan MPR. Atas masukan itu, Pimpinan

Sementara MPR Guntur Sasono menyampaikan secara lengkap Pimpinan MPR masa jabatan 2024-2029 dengan komposisi sebagai berikut: Ketua MPR Ahmad Muzani, dengan para Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto (F-PDI Perjuangan), Kahar Muzakir (F-Partai Golkar), Rusdi Kirana (F-PKB), Lestari Moerdijat (F-Nasdem), Hidayat Nur Wahid (F- PKS), Eddy Soeparno (F-PAN), Edhie Baskoro Yudhoyono (F-Partai Demokrat), dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman (Kelompok DPD).

Redaksi Majelis ikut menyampaikan selamat atas terpilihnya Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR dan para Wakil Ketua MPR yang telah dilantik untuk mengemban tugas-tugas konstitusional MPR untuk lima tahun ke depan. Salah satu tugas konstitusional terdekat adalah menggelar Sidang Paripurna MPR dengan agenda Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Hasil Pemilu 2024, yaitu pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden untuk masa jabatan 2024-2029 yang akan berlangsung pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Selain itu, MPR periode 2019-2024 juga menyerahkan sejumlah rekomendasi untuk dijalankan dan diselesaikan oleh MPR RI masa jabatan 2024-2029. Rekomendasi-rekomendasi itu tertuang dalam Keputusan MPR Nomor III/MPR/2024 Tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan 2019-2024, antara lain, menuntaskan pembahasan substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara dan melaporkan kepada pimpinan MPR paling lambat Agustus 2025; mengevaluasi keberadaan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai 2002, khususnya pasal 2 dan 4; serta mendorong pembudayaan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Juga direkomendasikan untuk mengkaji UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaan secara komprehensif dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bahan rekomendasi perubahan dan penyempurnaan terhadap UUD NRI Tahun 1945; mengkaji penguatan kelembagaan MPR melalui Undang-undang Tentang MPR; dan mengkaji pola hubungan antar lembaga negara dan etika kehidupan bernegara. □



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

REDAKTUR PELAKSANA

Anies Mayangsari Muninggar

KOORDINATOR REPORTASE

Djarot Widiarto

FOTOGRAFER

Tim Medvis

TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,
Ardi Winangun, Budi Sucahyo,
Derry Irawan, M. Budiono

STAF DISTRIBUSI

Amelia Rubinta, Ikhwani Bimo F

ALAMAT REDAKSI

Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi,
Sekretariat Jenderal MPR-RI
Gedung Nusantara III, Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,
Senayan, Jakarta 10270.
Telp. (021) 57895237, 57895238,
57895251 Fax.: (021) 57895237
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



Urgensi Matra Siber dan Rapuhnya Infrastruktur Keamanan Siber

ERA digitalisasi yang perkembangannya demikian pesat menumbuhkan desakan kepada negara untuk sungguh-sungguh peduli pada aspek keamanan siber (cyber security). Aspek keamanan siber sudah menjadi pilar yang fundamental. Ketika Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah memprogramkan penguatan satuan siber, infrastruktur keamanan siber di dalam negeri pun harus dibuat tangguh untuk mendukung dan memperkuat aspek ketahanan nasional, dan juga kehendak bersama mewujudkan transformasi digital pada semua aspek kehidupan.

Pengalaman buruk Indonesia akibat lemahnya sistem keamanan siber – yang memuncak pada serangan siber ransomware pada Juni 2024 terhadap Pusat Data Nasional (PDN)—hendaknya menyadarkan semua pihak akan fakta bahwa infrastruktur keamanan siber di dalam negeri masih sangat rapuh.

Sekadar menyegarkan ingatan, ketika PDN lumpuh akibat serangan itu, layanan publik pada 239 instansi terganggu. Misalnya, layanan imigrasi di seluruh bandara internasional di dalam negeri, dan juga gangguan yang dialami Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), ketika 47 layanan kementerian ini di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 tidak dapat diakses.

Ditambah dengan fakta rentetan serangan siber sebelumnya, insiden PDN hendaknya menyadarkan semua pihak bahwa rapuhnya aspek keamanan siber tak boleh lagi dianggap sebagai masalah biasa-biasa saja. Gambaran tentang lemahnya sistem keamanan siber di Indonesia bisa dipahami dari laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023, yang mencatat 403,9 juta anomali trafik sebagai indikasi serangan siber. Dan, sebagaimana laporan hasil analisis AwanPintarid, total serangan siber di Indonesia mencapai 2.499.486.085 selama semester pertama 2024.

Jumlah itu mencerminkan kenaikan drastis jika dibandingkan dengan

semester pertama 2023, yang jumlahnya 347.172.666 serangan. Kesimpulannya, Indonesia mengalami rata-rata 13.733.440 serangan siber per hari, atau 158 serangan siber per detik. Jadi, sudah menjadi fakta bahwa Indonesia rentan serangan siber, dan lemahnya aspek keamanan siber tentu saja menjadi potensi masalah yang setiap saat akan menimbulkan gangguan, baik bagi masyarakat maupun bagi aspek operasional layanan pada institusi pemerintah maupun badan publik lainnya.

Pada waktunya nanti, rapuhnya keamanan siber Indonesia itu akan berdampak pada aspek pertahanan dan keamanan nasional. Bukan cerita baru lagi bahwa signifikansi faktor dunia maya (cyberspace) pada aspek pertahanan dan keamanan suatu negara terus berprogres, baik pada aspek serangan, pertahanan maupun pencegahan. Perang Rusia-Ukraina menyajikan banyak cerita dan bukti akan hal itu. Rusia memulai invasinya dengan serangan siber yang disebut 'Fox Blade'. Serangan ini mengakibatkan kerusakan skala besar di pihak Ukraina, utamanya pada infrastruktur, peralatan militer hingga sistem komunikasi. Setelahnya, Rusia mengerahkan pasukan yang didukung Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista).

Banyak negara telah mengklasifikasi potensi serangan siber sebagai ancaman baru yang harus disikapi dan diantisipasi dengan sungguh-sungguh. Pada 2012, Amerika Serikat (AS) mengalokasikan anggaran belasan miliar dolar AS untuk membangun dan memperkuat infrastruktur keamanan siber. Inggris, selama empat tahun sejak 2014, juga membangun infrastruktur keamanan siber nasional dengan biaya 650 juta poundsterling. Bahkan Inggris pun membentuk tim tanggap darurat komputer atau CERT (Computer Emergency Readiness Team).

TNI-Polri pun sudah mengantisipasi dan menyikapi potensi serangan siber sebagai ancaman. Presiden Joko Widodo telah meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membentuk

Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.

Ketua MPR RI



matra baru di tubuh TNI, yakni Matra Siber. Hal ini sejalan dengan persepsi banyak orang bahwa sudah waktunya TNI memiliki Matra Siber. Menurut Jenderal Agus Subiyanto, TNI sudah membentuk satuan siber, dan tahapan selanjutnya adalah optimalisasi satuan siber itu. Bahkan, TNI pun berencana membuat pusat siber di Markas Besar (Mabes) TNI dan juga di setiap matra. Untuk optimalisasi, TNI akan merekrut tenaga-tenaga sipil yang punya kompetensi teknologi informasi (IT).

Dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional di era digitalisasi sekarang ini, matra atau satuan siber yang kompeten dan tangguh dalam organisasi militer sangat nyata urgensinya. Bahkan, harus dipahami dan diterima sebagai keniscayaan. Karena itu, sangat beralasan jika pemerintah harus mendukung rencana TNI memperkuat satuan siber, baik di Mabes TNI maupun satuan siber di setiap matra. Tak kalah pentingnya adalah dukungan kepada Polri untuk juga memperkuat satuan siber-nya.

Namun, sebagaimana dipahami bersama, mewujudkan ketahanan siber nasional tak cukup hanya dengan membentuk satuan atau matra siber dengan tenaga yang kompeten. Tantangan lainnya bagi Indonesia adalah membangun infrastruktur ketahanan siber yang tangguh dan mumpuni. Tanpa infrastruktur keamanan siber yang tangguh, kontribusi satuan atau matra siber tak akan maksimal. Kehendak mewujudkan tata kelola atau sistem pemerintahan berbasis elektronik akan tertatih-tatih.

Diskusi tentang urgensi keamanan siber nasional sudah banyak dilakukan. Banyak rekomendasi kepada pemerintah sudah dipublikasi. Kini, kepedulian pada aspek keamanan siber harus segera diwujudkan melalui program-program yang konkret. Sudah barang tentu bahwa perhatian utama terarah pada mutu infrastruktur siber. Dalam konteks mewujudkan keamanan siber yang tangguh, perhatian terhadap manajemen risiko pun harus diprioritaskan dengan cara terus membangun kemampuan mengadopsi teknologi yang terus berkembang.

Pada saat yang sama, harus dibangun dan diwujudkan kompetensi untuk melakukan pemulihan yang segera saat terjadi serangan siber. Kompetensi melakukan pemulihan dari serangan tentu saja sangat penting, karena serangan siber sulit untuk dihentikan. Jika kompetensi pemulihan terwujud, pengalaman buruk tentang lambannya memulihkan PDN tak akan berulang.

Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwasanya digitalisasi terus berkembang dengan pesat. Karena itu, harus tumbuh kesadaran bersama tentang betapa pentingnya negara mewujudkan aspek keamanan siber di dalam negeri. Infrastruktur keamanan siber yang mumpuni menjadi faktor pendukung yang signifikan bagi upaya TNI memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Lebih dari itu, infrastruktur keamanan siber yang tangguh akan mempercepat transformasi digital pada semua aspek kehidupan bersama. □

Terpilih Secara Musyawarah Mufakat

H. Ahmad Muzani **Ditetapkan** Sebagai Ketua MPR RI Masa Jabatan 2024-2029



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Sembilan orang Pimpinan MPR RI masa jabatan 2024-2029 secara resmi dilantik dalam Sidang Paripurna MPR RI dengan agenda Pelantikan Pimpinan MPR pada Kamis, 3 Oktober 2024. Dan, sebagai Ketua MPR RI, terpilih H. Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra.

TEPUK tangan meriah anggota MPR menyambut kedatangan anggota MPR H. Ahmad Muzani ketika memasuki ruang Sidang Paripurna di Gedung Nusantara atau lebih dikenal dengan nama Gedung Hijau atau Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis 3 Oktober 2024. Sekitar pukul 10.30 WIB, Ahmad Muzani yang mengenakan jas berwarna abu-abu lengkap dengan peci berjalan memasuki ruang sidang paripurna. Di tengah riuhnya tepuk tangan anggota MPR, Ahmad Muzani berjalan menuju tempat duduk di barisan terdepan, sembari menyalami anggota MPR yang dilewatinya.

"Merdeka...Merdeka...", teriak sejumlah anggota. Bahkan, ada di antara anggota MPR yang memanggil Ahmad Muzani dengan sebutan Ketua MPR RI. "Pak Ketua..., Pak Ketua...", seru para anggota MPR RI. Beberapa anggota MPR juga meminta foto bersama Ahmad Muzani. Didampingi sang istri, Himmatul Aliyah, yang juga anggota MPR, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu kemudian duduk di kursi baris terdepan. Ia duduk bersebelahan dengan Titiek Soeharto.

Anggota MPR yang mengikuti Sidang Paripurna Pelantikan Pimpinan MPR Periode 2024-2029 memang sudah mengetahui Ahmad Muzani terpilih menjadi Ketua MPR. Sebab, dalam Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan Sementara MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, pada Rabu, 2 Oktober 2024, sudah tercapai kesepakatan bahwa Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR Periode

2024-2029. Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, Ahmad Basarah, mengungkapkan, Ragab telah menyepakati Ahmad Muzani, anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, sebagai Ketua MPR RI secara mufakat.

"Secara musyawarah mufakat, Rapat Gabungan telah menyepakati calon Ketua MPR masa jabatan 2024-2029 adalah calon (berasal) dari Fraksi Partai Gerindra. Sahabat saya dan kolega saya yang ada di Pimpinan MPR periode yang kemarin, namanya Bapak H. Ahmad Muzani. Beliau akan didampingi oleh delapan Wakil Ketua MPR yang telah ditetapkan oleh masing-masing fraksi partai politik dan kelompok DPD di MPR," kata Ahmad Basarah usai Ragab Pimpinan Sementara MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD.

Ahmad Basarah menambahkan, Pimpinan Sementara MPR RI masih menunggu calon Wakil Ketua MPR dari unsur Kelompok DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI. Hingga usai Rapat Gabungan Pimpinan Sementara MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, Kelompok DPD belum menyampaikan usulan nama untuk Pimpinan MPR RI. Masih terjadi dinamika dalam Rapat Paripurna DPD RI untuk menentukan Wakil Ketua MPR dari unsur Kelompok DPD.

Dinamika itu terlihat dari Rapat Paripurna DPD untuk pemilihan Wakil Ketua MPR dari Kelompok DPD yang berlangsung dua putaran hingga Kamis dini hari, 3 Oktober 2024. Pada putaran pertama, proses pemilihan Wakil Ketua MPR diikuti oleh Abcandra Muhammad Akbar



Supratman dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah, Fadel Muhammad (Dapil Gorontalo), Daud Yordan (Dapil Kalimantan Barat), Agustin Teras Narang (Dapil Kalimantan Tengah), Ahmad Nawardi (Dapil Jawa Timur), dan Maya Rumantir (Dapil Sulawesi Utara).

Pada putaran pertama tersebut, Abcandra meraih 45 suara, Fadel Muhammad 38 suara, Daud Yordan 29 suara, Agustin Teras Narang 17 suara, Ahmad Nawardi 13 suara, dan Maya Rumantir hanya satu suara. "Maka kita akan melakukan pemungutan suara kembali untuk putaran kedua, dan yang

masuk ke putaran kedua adalah Abcandra dengan Fadel Muhammad," ujar Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung yang memimpin rapat paripurna DPD pada Rabu malam, 2 Oktober 2024.

Pada putaran kedua yang dihadiri 143 anggota DPD ternyata hasilnya, Abcandra Akbar meraih suara terbanyak dan diikuti oleh Fadel Muhammad di posisi kedua. "Hasil dari putaran kedua, Abcandra Akbar 93 suara, dan Fadel Muhammad 50 suara. Dengan demikian, yang memperoleh suara terbanyak dan dinyatakan terpilih untuk mewakili DPD di MPR RI sebagai Wakil Ketua MPR RI adalah Abcandra Akbar," kata Tamsil.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pelantikan Pimpinan MPR

Sidang Paripurna Pelantikan Pimpinan MPR RI dimulai setelah Pimpinan Sementara MPR RI Guntur Sasono dan Larasati Moriska menempati kursi pimpinan sidang paripurna. Guntur Sasono adalah anggota dewan tertua dari Fraksi Partai Demokrat Dapil Jawa Timur VIII dengan usia 78 tahun, 2 bulan, dan 30 hari. Sedangkan Wakil Ketua MPR Sementara Larasati Moriska adalah anggota DPD Dapil Kalimantan Utara dengan usia 22

tahun, 8 bulan, dan 0 hari.

Sidang Paripurna Pelantikan Pimpinan MPR RI diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sidang Paripurna MPR ini dihadiri oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan para Wakil Ketua DPR, Ketua DPD Sultan B. Najamudin dan para Wakil Ketua DPD, serta tampak hadir pula Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.

“Sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai saat ini telah hadir 545 anggota dari 732 anggota MPR dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 5 Peraturan Tata Tertib MPR sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka dan kuorum telah tercapai. Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Sidang Paripurna Ketiga dengan agenda Penetapan Pimpinan MPR kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” kata Guntur Sasono kemudian mengetuk palu sidang satu kali.

Kemudian Guntur Sasono menyampaikan bahwa sesuai keputusan Rapat Gabungan antara Pimpinan Sementara dengan para Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD telah disampaikan nama-nama calon Pimpinan MPR Periode 2024-2029 dari masing-masing fraksi, kecuali Kelompok DPD. Untuk itu Guntur Sasono mempersilakan Kelompok DPD untuk menyampaikan usulan nama Pimpinan MPR dalam sidang paripurna ini.

Dalam sidang paripurna inilah, Ketua Kelompok DPD MPR RI, Dedi Iskandar Batubara, secara resmi menyampaikan nama Abcandra Muhammad Akbar Supratman dari Sulawesi Tengah sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur Kelompok DPD. Selain itu, Kelompok DPD juga menyampaikan dukungan kepada Ahmad Muzani, dengan menyatakan: “Pimpinan Kelompok DPD di MPR memberikan dukungan untuk menjadi Ketua MPR masa jabatan 2024-2029 kepada H. Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra.” Pernyataan ini disambut tepuk tangan anggota MPR.

Setelah usulan nama Pimpinan MPR lengkap, Pimpinan MPR Sementara Guntur Sasono kemudian membacakan nama-nama Pimpinan MPR masa jabatan 2024-2029, yaitu: Bambang Wuryanto (Fraksi PDI



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Perjuangan), Kahar Muzakir (Fraksi Golkar), Ahmad Muzani (Fraksi Gerindra), Lestari Moerdijat (Fraksi NasDem), Rusdi Kirana (Fraksi PKB), Hidayat Nur Wahid (Fraksi PKS), M. Eddy Dwiyanto Soeparno (Fraksi PAN), Edhie Baskoro Yudhoyono (Fraksi Demokrat), dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman (Kelompok DPD). “Rapat Gabungan kemarin juga telah menyepakati Ketua MPR periode 2024-2029 adalah H. Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra,” kata Guntur Sasono.

Guntur Sasono pun meminta persetujuan dari anggota MPR peserta sidang paripurna. “Apakah hasil Rapat Gabungan terkait dengan Pimpinan MPR periode 2024-2029 dan keputusan penetapan H. Ahmad Muzani

sebagai Ketua MPR periode 2024-2029 dapat disetujui?” tanya Pimpinan Sementara MPR.

“Setuju....,” jawab serempak anggota MPR.

“Alhamdulillah,” kata Guntur Sasono sambil mengetuk palu sidang satu kali.

Berdasarkan ketentuan pasal 23 Tata Tertib MPR, sebelum memangku jabatannya, Pimpinan MPR mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna. Sebelum pengucapan sumpah/janji Pimpinan MPR, Pimpinan Sementara MPR men-skors sidang paripurna selama 30 menit untuk persiapan pengucapan sumpah/janji Pimpinan MPR.

Setelah skors dicabut, prosesi pengucapan sumpah/janji Pimpinan MPR dimulai.





Sebelum pengucapan sumpah/janji Pimpinan MPR, Guntur Sasono mempersilakan Plt. Sekretaris Jenderal MPR untuk membacakan keputusan MPR Nomor VI/MPR/2024 tentang Pimpinan MPR Masa Jabatan 2024-2029. Setelah pembacaan Keputusan MPR, Guntur Sasono mengajak anggota MPR untuk bersama-sama menyaksikan pelantikan Pimpinan MPR masa jabatan 2024-2029.

Pimpinan MPR yang akan mengucapkan sumpah/janji maju ke tempat pengucapan sumpah/janji. Kemudian Ketua Mahkamah Agung RI memandu pengucapan sumpah/janji Pimpinan MPR. Ketua MA mengingatkan bahwa sumpah janji yang diucapkan merupakan tekad untuk memperjuangkan

aspirasi rakyat, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan peraturan perundang-undangan RI.

Pimpinan MPR menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah/janji. Mereka berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai wakil rakyat. "Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundangan-undangan," ucap Pimpinan MPR RI ini.

"Bahwa saya, akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti pada bangsa dan negara. Bahwa saya akan

memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan NKRI," tambahnya.

Dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, SH., MH., pengucapan sumpah/janji Pimpinan MPR berlangsung khidmat. Pengucapan sumpah/janji diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji disaksikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Kemudian dilanjutkan prosesi penyerahan kepemimpinan dari Pimpinan MPR RI masa jabatan 2019-2024 kepada Pimpinan MPR RI masa jabatan 2024-2029, ditandai dengan penyerahan Buku Memori Jabatan Pimpinan MPR RI Periode 2019-2024, dan berita acara serah terima, serta penyerahan palu sidang yang diserahkan langsung oleh Ketua MPR sementara Guntur Sasono kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Sukseskan Pelantikan Presiden

Setelah itu Ketua MPR Ahmad Muzani langsung memimpin Sidang Paripurna MPR RI didampingi para Wakil Ketua MPR yang baru dilantik. Dalam pengantarnya, Ahmad Muzani mengajak semua elemen masyarakat bergandengan tangan, bersama-sama melangkah ke depan, untuk membawa lembaga MPR ini menjadi rumah kebangsaan, dan selalu menjaga Pancasila sebagai yang terdepan bagi kehidupan bangsa.

Dalam pidato perdana sebagai Ketua MPR di podium, Ahmad Muzani mengucapkan terima kasih atas semua kepercayaan yang diberikan oleh para Pimpinan Fraksi dari berbagai partai politik yang ada di tanah air. "Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kelompok DPD yang mempercayakan kepada kami untuk menjadi Ketua MPR pada periode yang akan datang," ujarnya.

Muzani mengingatkan, untuk mengoreksi dan mengkritik apabila ada ucapan, tindakan dan keputusan yang salah. "Jika kami sebagai ketua, ada ucapan, tindakan, dan keputusan yang baik, ikutlah keputusan dan tindakan kami, tetapi jika ucapan, tindakan, dan keputusan yang salah, koreksi dan kritiklah kami sebagai ketua," tuturnya.

Amanah untuk memimpin MPR selama lima tahun ke depan, menurut Muzani, adalah kepercayaan yang luar biasa. "Pelaksanaan tugas Pimpinan MPR yang akan datang



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

tidaklah ringan, kami memerlukan kerjasama di antara pimpinan majelis, pimpinan fraksi, dan para anggota MPR. Karena itu kami terus akan bekerjasama, bersama-sama, dengan para wakil ketua, pimpinan fraksi dan para anggota, karena tugas konstitusional yang dibebankan kepada kami tidaklah ringan," katanya.

Muzani mengajak seluruh anggota majelis, dan segenap elemen bangsa untuk menjalankan amanah bersama-sama rakyat dengan merenungkan nilai-nilai yang sesungguhnya penting bagi kita. "Saya ingin mengajak semua untuk meneguhkan prinsip

Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2024 pada Ahad, 20 Oktober 2024. Untuk itu, Muzani mengharapkan, kerjasama yang baik di antara seluruh anggota MPR, para pimpinan partai politik, seluruh fraksi dan Kelompok DPD, untuk menyukseskan pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2024.

"Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tersebut adalah bukti kita telah melangkah maju melaksanakan demokrasi yang baik. Kita bangga bahwa demokrasi yang kita laksanakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yakni demokrasi yang ber-ruh

cemar, seluruh aliran yang merembes ke hilir akan tercemar juga. Dengan niat suci dan kesungguhan dan tanggungjawab yang penuh, kita harus bahu-membahu dalam kebajikan untuk sama-sama menjaga agar sumur politik MPR, tetap jernih," ujarnya.

Muzani menambahkan, agenda penting MPR lainnya adalah menindaklanjuti rekomendasi MPR masa bakti 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan MPR Nomor III/MPR/2024. "Ini merupakan rekomendasi yang diberikan kepada kita," tuturnya.

Dalam pidatonya, Muzani juga



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

moral, yakni agar kita selalu menjaga hidup sederhana, tidak berlebihan dan berpegang teguh pada konstitusi yang berlaku," katanya.

"Hidup sederhana bukanlah berarti mengabaikan kemajuan atau menghindari pencapaian, justru hidup sederhana mengajarkan kita untuk menghargai apa yang telah kita miliki, memperkuat hubungan sesama, dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Dengan hidup sederhana kita lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti keluarga, persahabatan, berkontribusi pada nilai positif yang hidup di masyarakat," imbuhnya.

Masih dalam pidato perdananya, Muzani mengungkapkan agenda kenegaraan penting yang dilakukan MPR setelah pelantikan Pimpinan MPR adalah melakukan tugas konstitusional MPR, yakni melantik

kebangsaan, yang memuliakan, merawat keberagaman, dan membangun persatuan dalam keberagaman dan perbedaan, serta mewujudkan impian kebersamaan dalam rumah besar Indonesia, rumah besar Pancasila," katanya.

Menurut Ahmad Muzani, Rumah Besar Indonesia dan Rumah Besar Pancasila harus tetap dijaga pada masa-masa yang akan datang. "Dan, MPR memiliki tugas itu. Kita harus menghidupkan kembali api kepeloporan para pendiri bangsa, demi memuliakan martabat bangsa, dengan kesungguhan dan komitmen, keluasan wawasan, dan keteguhan integritas untuk mewujudkan visi dan misi negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945," paparnya.

Dalam kaitan itu, lanjut Ahmad Muzani, MPR adalah hulu kenegaraan kita. "Bila hulunya

menyinggung soal eskalasi politik di Timur Tengah dan Palestina. Atas nama MPR, Muzani meminta agar pemerintah Indonesia menggunakan pengaruhnya untuk mencegah agar eskalasi tersebut tidak meluas kemana-mana. "Meskipun kita mencegah meluasnya perang di satu sisi, tetapi di sisi lain kita harus tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina sebagai sebuah komitmen bangsa Indonesia. Kemerdekaan Palestina adalah sebuah amanah kesejarahan yang tetap kita pikul sejak 1955 ketika Konferensi Asia Afrika di Bandung," katanya.

Sidang Paripurna Pelantikan Pimpinan MPR ditutup dengan doa yang dibacakan Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tiffatul Sembiring, dan diakhiri dengan menyanyikan kembali lagu kebangsaan Indonesia Raya. □

DER/MBO/BSC

Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR/DPD/MPR

732 Anggota MPR Masa Jabatan 2024-2029 Resmi Dilantik

Sebanyak 732 anggota MPR terdiri atas 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD masa jabatan 2024-2029 telah resmi dilantik. Acara pelantikan juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SUASANA kompleks Parlemen Senayan Jakarta pagi hari Selasa, 1 Oktober 2024, sudah sangat ramai bahkan cenderung *crowded* (penuh sesak). Pada hari itu, lembaga parlemen menggelar Sidang Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR/DPD/MPR RI masa jabatan 2024-2029 di Ruang Sidang Paripurna Gedung Nusantara atau Gedung Hijau. Komplek parlemen sudah dipenuhi para keluarga, kerabat, dan Tim Sukses dari anggota yang dilantik. Selama proses pelantikan berjalan, mereka menunggu di sekitar area Gedung Hijau, baik di lobi gedung Nusantra I, II, III, IV, dan Nusantara V sehingga suasana memang tampak ramai.

Sidang paripurna pelantikan anggota DPR, dan DPD, MPR baru dimulai setelah kedatangan Presiden Joko Widodo didampingi Presiden Terpilih Prabowo

Subianto. Keduanya tiba di kompleks parlemen berbarengan karena menumpang satu mobil berpelat RI 1. Mereka kompak menggunakan jas hitam serta peci. Adapun

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo turut mendampingi Presiden Jokowi dan Prabowo di belakangnya. Selanjutnya, Presiden berfoto bersama dengan sejumlah





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

pejabat dan memasuki ruangan VVIP.

“Hari ini saya menghadiri Sidang Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR/DPD/MPR RI masa jabatan 2024-2029,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip di Jakarta, Senin (1/10/2024). Jokowi menyebutkan, para anggota dewan terpilih dilantik berdasarkan Keppres Nomor 115/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

“Selamat menjalankan tugas sebagai legislator dan rekan pemerintah dalam memastikan lahirnya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Jokowi.

Anggota DPR yang dilantik bertambah dari 575 menjadi 580 orang, sedangkan Anggota DPD RI bertambah dari 136 menjadi 152 orang dibandingkan periode sebelumnya. Adapun partai politik yang lolos ke parlemen adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional.

Beberapa saat sebelum sidang paripurna dimulai atau sebelum Presiden Joko Widodo memasuki ruang sidang, Sekretaris Jenderal DPR, Sekretaris Jenderal DPD, dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR membacakan susunan Pimpinan Sementara, yakni anggota tertua dan anggota termuda, yang akan memimpin sidang paripurna. Sekretaris Jenderal (Sesjen) DPR RI, Indra Iskandar, mengumumkan Pimpinan Sementara Sidang

Paripurna DPR adalah Guntur Sasono dari Fraksi Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, dengan usia 78 tahun 2 bulan 30 hari, didampingi anggota termuda yaitu Annisa M.A. Mahesa dari Fraksi Partai Gerindra, Dapil Banten II, dengan usia 23 tahun 2 bulan 15 hari.

Penetapan Pimpinan Sementara ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 84 ayat 7 dan ayat 8. “Dengan ini, kami umumkan Pimpinan Sementara DPR RI adalah sebagai berikut. Ketua Sementara Guntur Sasono, Partai Demokrat, Dapil Jawa Timur VIII. Wakil Ketua Sementara Annisa Mahesa, Partai Gerindra, Dapil Banten II. Demikian pengumuman ini disampaikan,” ucap Indra.

Sesjen DPD RI Rahman Hadi juga mengumumkan Pimpinan Sementara DPD RI,

yaitu anggota DPD RI tertua sebagai ketua dan anggota DPD RI termuda sebagai wakil ketua. Anggota DPD RI tertua adalah Ismeth Abdullah dengan usia 78 tahun berasal dari Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, sedangkan anggota DPD RI termuda adalah Larasati Moriska dengan usia 22 tahun berasal dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara.

“Pimpinan Sementara DPD RI ini berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1412 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota DPR/DPD/MPR, tertua dan termuda,” kata Rahman. Dia mengungkapkan pemilihan anggota tertua dan termuda untuk menjadi Pimpinan Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU MD3. Dengan demikian, agenda pengucapan sumpah/janji anggota DPD masa jabatan 2024-2029 dipimpin oleh Ketua Ismet Abdullah dan Wakil Ketua Larasati Moriska.

Plt. Sesjen MPR RI juga mengumumkan Pimpinan Sementara untuk memimpin Sidang Paripurna MPR dengan agenda pengucapan sumpah/janji anggota MPR masa jabatan 2024-2029. Siti Fauziah mengungkapkan, Pimpinan Sementara untuk sidang paripurna sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR RI, yang menyebutkan bahwa Pimpinan Sementara MPR berasal dari anggota MPR yang tertua dan termuda dari fraksi dan/atau Kelompok





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DPD yang berbeda.

“Hal tersebut, berdasarkan Pengumuman Ketua KPU No.3562/PP//07/SD/01/2024 Tentang calon terpilih anggota DPR dan DPD yang tertua dan termuda dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 2 Peraturan MPR RI Nomor I Tahun 2024 Tentang Tata Tertib MPR RI yang menyatakan bahwa Pimpinan Sementara MPR berasal dari anggota MPR yang tertua dan termuda dari Fraksi dan atau Kelompok DPD yang berbeda,” ungkapnya.

Dengan ketentuan tersebut, dua nama yang ditunjuk, yakni Ketua Sementara MPR Guntur Sasono dari Partai Demokrat Dapil Jatim VIII yang berusia 78 tahun, 2 bulan, dan 30 hari, dan Wakil Ketua Sementara MPR Larasati Moriska dari DPD Dapil Kalimantan Utara dengan usia 22 tahun, 8 bulan.

Pengucapan Sumpah/Janji Anggota MPR

Selain dihadiri Presiden RI Joko Widodo, Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden RI terpilih hasil Pemilu 2024 Prabowo Subianto, Sidang Paripurna MPR dengan agenda pengucapan sumpah/janji anggota MPR periode 2024-2029 juga dihadiri Wapres Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, dan Wapres Ke- 11 Prof. Boediono. Turut hadir Pimpinan Lembaga Negara, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Duta Besar Kepala Perwakilan negara-negara sahabat, serta para pimpinan partai politik.

Sebelum mengucapkan sumpah/janji anggota MPR, Pimpinan Sementara Guntur Sasono menjelaskan, berdasarkan

Ketentuan UU No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.13 Tahun 2019, serta Pasal 9 ayat 1 Peraturan MPR Nomer I Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, yang menyatakan bahwa anggota MPR sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, dalam Sidang Paripurna MPR RI yang dipimpin oleh Pimpinan Sementara.

Guntur Sasono kemudian mempersilakan Plt. Sesjen MPR Siti Fauziah untuk membacakan petikan Keputusan Presiden RI Nomer 115/P Tahun 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPR, DPD dan MPR Masa Jabatan Tahun 2024-2029. Dalam lampiran Keputusan tersebut, Siti Fauziah menyebutkan, anggota MPR RI masa jabatan 2024-2029 berjumlah 732 orang anggota, terdiri dari 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD. Acara selanjutnya adalah, prosesi Pengucapan Sumpah/Janji Anggota MPR Periode 2024-2029 yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin.

Berikut adalah isi sumpah/janji anggota MPR periode 2024-2029

“Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya

dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Usai pelantikan, Pimpinan Sementara Guntur Sasono berpesan agar seluruh anggota bersyukur karena masih diberi kekuatan untuk menjaga keutuhan dan tegaknya NKRI. “Sebagai anggota MPR RI kita bermunajat dengan sepenuh hati agar diberikan kesehatan dan bimbingan dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional ini yang menjadi tanggung jawab kita ke depan,” katanya.

Guntur juga mengungkapkan rasa bangga kepada Pimpinan dan segenap anggota MPR periode 2019-2024, yang telah menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. “Ke depan, tugas-tugas tersebut akan menjadi tanggung jawab kita semua. Semoga kita dapat menjalankannya dengan penuh amanah dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya,” tandasnya.

Sebagai wujud tanggung jawab dan kesinambungan pelaksanaan tugas MPR RI ke depan, Pimpinan MPR masa jabatan 2019-2024 menyampaikan Buku Memori, berupa laporan pelaksanaan wewenang serta tugas dan kinerja Pimpinan MPR masa jabatan 2019-2024, yang diserahkan langsung oleh Ketua MPR 2019-2024 Bambang Soesatyo kepada Ketua MPR sementara Guntur Sasono. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Pimpinan MPR periode 2019-2024 dan Pimpinan MPR sementara.

Sebelumnya juga telah digelar Sidang Paripurna Awal Masa Jabatan DPR Periode 2024-2029 yang dipimpin Pimpinan Sementara Guntur Sasono dari Partai Demokrat serta Wakil Ketua Sementara Annisa Maharani Alzahra Mahesa dari Partai Gerindra dan Sidang Paripurna Awal Masa Jabatan DPD RI Periode 2024-2029, yang dipimpin Pimpinan DPD sementara Ismeth Abdullah dari Kepulauan Riau serta Wakil Ketua DPD sementara Larasati Moriska dari Kalimantan Utara. □

DER/BSC

Sidang Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2019-2024

MPR RI Sahkan Tata Tertib MPR dan Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2019-2024

Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR 2019-2024 telah mengesahkan Peraturan MPR Nomor I/MPR/2024 Tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Keputusan MPR Nomor III/MPR/2024 Tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan 2019-2024.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), menggelar Sidang Akhir Masa Jabatan Anggota MPR RI Periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Agenda sidang paripurna ini adalah membahas penetapan MPR terkait perubahan Tata Tertib MPR serta rekomendasi MPR masa jabatan 2019-2024. Sidang paripurna juga menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang serta kinerja Pimpinan MPR periode 2019-2024.

Sekitar pukul 9.30 WIB, Pimpinan MPR memasuki ruang sidang paripurna dan

menduduki kursi pimpinan di depan. Sidang dipimpin langsung Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsot). Di meja pimpinan turut hadir para Wakil Ketua MPR, yakni Ahmad Basarah (F-PDIP), Ahmad Muzani (F-Gerindra), Jazilul Fawaid (F-PKB). Kemudian Lestari Moerdijat (F-NasDem), Sjarifuddin Hasan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Yandri Susanto (F-PAN), dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).

Turut hadir, antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi para Wakil Ketua yaitu Lodewijk Freidrich Paulus, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmad Gobel, dan Muhaimin Iskandar. Tampak pula Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.

Sidang paripurna diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan mengheningkan cipta. Setelah itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo pun membuka sidang paripurna. Bamsot, sapaan Bambang Soesatyo, mengungkapkan bahwa sidang paripurna belum bisa dibuka karena baru dihadiri 358 anggota dari 711 anggota MPR.

"Sesuai catatan daftar hadir yang disampaikan Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir semua fraksi dan kelompok DPD dengan jumlah 358," katanya. "Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 5 Tata Tertib MPR, sidang belum terpenuhi secara kouroom," imbuhnya.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Bamsuet kemudian men-skors sidang paripurna. Namun, tak lama berselang Bamsuet mendapatkan laporan terbaru dari Sekretariat Jenderal bahwa sidang paripurna bisa dimulai. Politikus Partai Golkar itu langsung membuka Sidang Akhir Masa Jabatan MPR RI periode 2019-2024. “Saudara sekalian, berdasarkan laporan terbaru dari Sekretariat Jenderal maka sesuai dengan Tata Tertib ketentuan pasal 66 syarat sidang telah terpenuhi,” ucapnya.

“Sidang Akhir Masa Jabatan anggota MPR periode 2019-2024 dengan agenda penetapan putusan MPR terkait perubahan

Tata Tertib MPR dan rekomendasi MPR RI masa jabatan 2019-2024. Kedua adalah laporan pelaksanaan tugas dan wewenang, serta kinerja Pimpinan MPR RI, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang kami buka dan terbuka untuk umum,” katanya.

Bamsuet pun menyampaikan sambutannya. Dia mengawali sambutan dengan membaca dua bait pantun. Bait pertama pantun Bamsuet berisi tentang ucapan terima kasih kepada anggota DPR, MPR, dan DPD yang telah menghadiri sidang. “Burung cenderawasih di hutan Irian. Terbang

melayan di atas awan. Ucapan terima kasih kami haturkan. Atas kehadiran bapak dan ibu sekalian,” tuturnya.

Kemudian, bait kedua pantun Bamsuet menyinggung soal pohon beringin yang diterjang badai. Adapun pohon beringin merupakan logo Partai Golkar. “Pohon beringin di persimpangan jalan. Tegak berdiri meskipun diterjang badai dan topan. Izinkan kami menggelar sidang akhir masa jabatan. Untuk menyampaikan laporan kinerja dan rancangan putusan,” ujarnya.

Lebih lanjut Bamsuet mengatakan bahwa Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan Periode 2019-2024 ini merupakan kesepakatan rapat gabungan (Ragab) Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD pada 23 September 2024. Pada Rapat Gabungan tersebut, Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD telah menyepakati dua buah rancangan putusan, yaitu: *Pertama*, Rancangan Peraturan MPR tentang Tata Tertib; dan *kedua*, Rancangan Putusan MPR tentang Rekomendasi MPR Periode 2019-2024 yang akan disampaikan MPR Periode 2024-2029.

Setelah memberi pengantar, Bamsuet mempersilakan Ketua Badan Pengkajian MPR RI Djarot Saiful Hidayat untuk menyampaikan laporan mengenai Rancangan Peraturan MPR tentang Tata Tertib.

Perubahan Tata Tertib MPR

Dalam laporannya, Ketua Badan Pengkajian MPR, Djarot Saiful Hidayat, menjelaskan bahwa penyusunan rancangan Peraturan MPR tentang Tata Tertib MPR merupakan amanat Rapat Pimpinan MPR tanggal 27 Februari 2023. Dalam proses pembahasan dan penyusunannya diawali dengan melakukan kajian melibatkan para pakar/akademisi dari berbagai perguruan tinggi melalui Forum Focus Group Discussion (FGD), pembahasan oleh Tim Perumus, Pleno Badan Pengkajian. “Terakhir telah kami laporkan, dan dibahas serta disepakati pada Rapat Gabungan MPR, tanggal 23 September 2024,” ujarnya.

Menurut Djarot Saiful Hidayat, substansi perubahan Tata Tertib meliputi: perubahan redaksional, perubahan rumusan, serta rumusan pasal dan ayat baru. Perubahan redaksional, antara lain perubahan nomenklatur “Keputusan” menjadi “Putusan”





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

untuk penyebutan produk hukum MPR. Penggunaan frasa “kelompok anggota” menjadi “kelompok DPD”, “sidang” menjadi “sidang paripurna”, “sekurang-kurangnya” menjadi “paling sedikit”, “paling lambat” menjadi “paling lama,” “sebanyak-banyaknya” menjadi “paling banyak,” dan “langkah” menjadi ‘tahapan,’ serta lain-lain perubahan frase.

Sedangkan perubahan rumusan pasal dan ayat dilakukan tanpa menambah pasal atau ayat baru, tetapi mengubah rumusan untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan dan sistematika penulisan. Antara lain pada konsideran menimbang dan mengingat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

“Selain itu, terdapat penambahan kata atau kalimat yang sifatnya penyempurnaan redaksi. Semisal dalam hal pengucapan sumpah atau janji ditambah kalimat diawali dengan ucapan ‘Demi Tuhan saya berjanji..’ dan seterusnya,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Djarot Saiful Hidayat menjelaskan,

rumusan pasal dan ayat baru didasarkan atas hasil kajian Badan Pengkajian MPR 2023, serta guna menyesuaikan dengan perkembangan sistem ketatanegaraan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan wewenang dan tugas MPR. Salah satunya, terdapat penambahan alat kelengkapan MPR, berupa Mahkamah Kehormatan.

Badan kehormatan ini bersifat ad hoc dan dibentuk apabila ada pengaduan mengenai pelanggaran kode etik oleh anggota MPR dalam melaksanakan tugas MPR. “Karena bersifat ad hoc maka pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada putusan Rapat Gabungan. Selanjutnya, mengenai Badan Kehormatan diatur lebih rinci dalam Bab V tentang Alat Kelengkapan, mulai dari Pasal 56 sampai dengan Pasal 61,” terangnya.

Selain Badan Kehormatan MPR, Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan, rumusan pasal dan ayat baru, antara lain soal pembentukan Panitia Ad Hoc. Dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dibedakan pem-

bentukan Panitia Ad Hoc untuk membahas perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan Panitia Ad Hoc selain perubahan UUD NRI Tahun 1945.

“Panitia Ad Hoc untuk membahas perubahan Undang-Undang Dasar dibentuk dalam Sidang Paripurna MPR dan ditetapkan dengan Keputusan MPR. Sedangkan Panitia Ad Hoc untuk membahas selain perubahan Undang-Undang Dasar dibentuk dalam Rapat Gabungan dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR,” katanya.

Dalam rumusan baru, Pasal 98, pembentukan putusan MPR melalui 3 (tiga) tingkat pembicaraan untuk jenis putusan MPR yang bersifat pengaturan (regeling). Jenis putusan MPR adalah Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Peraturan MPR, dan Keputusan MPR. Pasal 108 ayat (2) dibedakan antara ketetapan yang bersifat pengaturan dan penetapan.

Ketetapan yang bersifat pengaturan (regeling) (Pasal 108 ayat 2) adalah Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum

Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Pasal 2 dan Pasal 4, Ketetapan tentang Pokok-Pokok Haluan Negara, mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan menggunakan nomor putusan MPR. Sedangkan Ketetapan yang bersifat penetapan (beschikking) (Pasal 108 ayat 4), adalah ketetapan yang bersifat penetapan dan administratif, mempunyai kekuatan hukum mengikat, menggunakan nomor putusan MPR.

Setelah Ketua Badan Pengkajian menyampaikan laporan Rancangan Peraturan MPR tentang Tata Tertib MPR, Ketua MPR mempersilakan masing-masing Fraksi dan

Pandangan akhir Fraksi Partai Golkar yang disampaikan Idris Laena juga dapat menerima Rancangan Keputusan dan rekomendasi MPR Periode 2024-2029. Fraksi Partai Gerindra dalam pandangan akhir Fraksi yang disampaikan Sugiono juga menyetujui Rancangan Keputusan MPR tentang Rekomendasi MPR Periode 2019-2024 kepada MPR RI Periode 2024-2029. "Terhadap beberapa catatan yang terlampir dalam pandangan akhir Fraksi Gerindra, kami mengusulkan kepada Pimpinan untuk menugaskan Badan Pengkajian MPR melakukan sinkronisasi dan harmonisasi," katanya.

Pendapat dan pandangan yang sama

anggota MPR yang mengikuti sidang paripurna.

"Apakah dapat disetujui?" tanya Bamsuet.

"Setuju..." jawab peserta sidang paripurna. Bamsuet pun mengetok palu sekali.

Rekomendasi

Pada Keputusan MPR Nomor III/MPR/2024 Tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan 2019-2024, memuat beberapa rekomendasi untuk MPR RI periode 2024-2029. Antara lain, menuntaskan pembahasan substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara dan melaporkan kepada pimpinan MPR paling lambat Agustus 2025; mengevaluasi keberadaan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR RI 1960 sampai 2002, khususnya pasal 2 dan 4; serta mendorong pembudayaan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Selain itu, direkomendasikan pula untuk mengkaji UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaan secara komprehensif dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bahan rekomendasi perubahan dan penyempurnaan terhadap UUD NRI Tahun 1945; mengkaji penguatan kelembagaan MPR melalui Undang-undang Tentang MPR; dan mengkaji pola hubungan antarlembaga negara dan etika kehidupan bernegara.

Sidang Akhir MPR Masa Jabatan 2019-2024 diakhiri dengan pembacaan doa oleh anggota MPR dari Fraksi PKB, K.H. Maman Imanulhaq, dan Bamsuet menutup Sidang Akhir Masa Jabatan 2019-2024 dengan dua bait pantun.

*Burung Murai hinggap di dahan
Sambil bertengger kicaunya berku-
mandang
Setelah usai sidang akhir masa jabatan
Selamat bertugas kepada MPR periode
mendatang*

*Kawat baja diikat besi
Santan kelapa dicampur kanji
Kami pamit dan undur diri
Jaga teguh NKRI*



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Kelompok DPD untuk menyampaikan pandangan akhir Fraksi terkait materi yang telah disampaikan Badan Pengkajian MPR, berturut-turut diawali pandangan akhir Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Kelompok DPD.

Berturut-turut pandangan akhir Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Tb Hasanuddin. "Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima Rancangan Putusan yang telah dibahas dalam Rapat Gabungan MPR pada tanggal 23 September 2024, untuk dijadikan Keputusan MPR pada Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan pada hari ini," katanya.

serta beberapa catatan juga disampaikan Taufik Basari yang membacakan pandangan akhir Fraksi Partai Nasdem, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (Fraksi PKB), Anton Sukartono Suratno (Fraksi Partai Demokrat), Tiffatul Sembiring (Fraksi PKS), Achmad Rizky Sadig (Fraksi PAN), Arwani Thomafi (Fraksi PPP), dan Ajbar (Kelompok DPD).

Seluruh fraksi dan kelompok DPD telah menyepakati materi Rancangan Peraturan MPR tentang Tata Tertib dan Rancangan Keputusan MPR tentang Rekomendasi MPR Periode 2019-2024 dengan suatu penekanan menugaskan kembali Badan Pengkajian MPR untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi atas Rancangan Tata Tertib dan Rekomendasi yang telah disepakati. Bamsuet kemudian meminta persetujuan dari



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

M. Eddy Dwiyanto Soeparno, SH., MH., Wakil Ketua MPR RI

Formasi Pimpinan MPR Periode 2024-2029 Adalah Formasi yang Baik

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi menetapkan sembilan pimpinan untuk masa jabatan 2024-2029.

Penetapan ini dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Sementara, Guntur Sasono, dan Wakil Ketua Sementara, Larasati Moriska, di Ruang Sidang Paripurna, Gedung Nusantara, di kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 3 Oktober 2024. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari rapat gabungan fraksi yang digelar sehari sebelumnya.

Guntur Sasono mengungkapkan, dalam rapat gabungan tersebut telah disepakati bahwa Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra akan menjabat sebagai Ketua MPR RI. "Rapat gabungan juga telah menyepakati Ketua MPR periode 2024-2029 adalah Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra," ujar Guntur.

Sedangkan nama-nama Pimpinan MPR secara lengkap dari masing-masing fraksi dan kelompok DPD yang dilantik adalah

Ketua MPR Ahmad Muzani (Fraksi Partai Gerindra) dan para Wakil Ketua MPR, yaitu Bambang Wuryanto (Fraksi PDI Perjuangan), Kahar Muzakir (Fraksi Partai Golkar), Lestari Moerdijat (Fraksi Partai NasDem), Rusdi Kirana (Fraksi PKB), Hidayat Nur Wahid (Fraksi PKS), M. Eddy Dwiyanto Soeparno (Fraksi PAN), Edhie Baskoro Yudhoyono (Fraksi Partai Demokrat), dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman (Kelompok DPD).

Melihat dari komposisi Pimpinan MPR yang baru dilantik, Pimpinan MPR masa jabatan 2024-2029 diwarnai tiga wajah lama dan enam lainnya adalah wajah baru. Tiga orang wajah lama Pimpinan MPR periode 2024-2029 adalah Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, dan Hidayat Nur Wahid. Ketiganya adalah Wakil Ketua MPR periode sebelumnya. Selain itu, komposisi Pimpinan MPR diisi gabungan dari politisi senior dan politisi junior.

Untuk pertama kalinya sejak reformasi, Ketua MPR berasal dari partai yang sama dengan presiden terpilih hasil Pemilu. Ketua

MPR Ahmad Muzani adalah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, partai yang sama dengan presiden terpilih hasil Pemilu 2024, yaitu Prabowo Subianto yang juga Ketua umum Partai Gerindra.

Majelis berkesempatan berbincang dengan Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN M. Eddy Dwiyanto Soeparno, SH., MH., usai penetapan dan pelantikan Pimpinan MPR periode 2024-2029. Eddy yang lahir pada 6 Mei 1965 pernah menjabat sebagai Sekjen PAN. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini merupakan putera dari M. Soeparno, Direktur Utama Garuda Indonesia 1988-1992. Eddy berkecimpung di politik pada 2004. Ia meninggalkan pekerjaannya di ABN AMRO untuk membantu tim Amien Rais di Pilpres. Dunia bisnis juga digelutinya. Ia tercatat pernah menjadi Chief Financial Officer (CFO) PT Bakrie Indo Infrastructure hingga Direktur Investasi di Merrill Lynch.

Berikut perbincangan Majelis dengan Eddy Soeparno. Petikannya.

Bagaimana perasaan Bapak setelah ditetapkan menjadi Pimpinan MPR periode 2024-2029?

Saya merasa tersanjung dan berbahagia atas kesempatan ini. Tetapi penetapan sebagai Pimpinan MPR periode 2024-2029 ini adalah sebuah kepercayaan, khususnya kepercayaan dari Ketua Umum PAN Bapak Zulkifli Hasan yang harus saya laksanakan sebaik mungkin, sebagaimana juga kader-kader PAN yang sebelumnya juga pernah duduk sebagai Pimpinan MPR.

Apalagi PAN juga memiliki rekam jejak sebagai Pimpinan MPR, termasuk Pak Zulkifli Hasan yang pernah menjadi Ketua MPR RI. Karena itu, saya mohon doa restu agar bisa melaksanakan tugas sebagai Pimpinan MPR sebaik-baiknya, minimal seperti yang sudah dilaksanakan Pimpinan MPR dari PAN. Syukur-syukur bisa lebih baik lagi.

Bagaimana Bapak melihat komposisi Pimpinan MPR periode 2024-2029 sekarang ini?

Menurut saya, komposisi atau formasi Pimpinan MPR periode 2024-2029 ini merupakan formasi Pimpinan MPR yang sangat baik. Kenapa? Karena formasi Pimpinan MPR kali ini terdiri dari politisi senior dan politisi junior. Karena itu, tidak berlebihan kalau disebut sebagai tonggak bersejarah, dimana salah satu Pimpinan MPR kita adalah salah satu yang termuda dalam sejarah MPR.

Jadi, saya kira formasi Pimpinan MPR kali ini adalah sebuah bentuk dari alih generasi, yang berjalan baik, tidak hanya di lembaga

MPR, tetapi juga di DPR dan DPD RI.

Bagaimana Bapak melihat adanya kesamaan partai antara Ketua MPR dengan presiden terpilih hasil Pemilu 2024. Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR adalah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Sedangkan presiden terpilih hasil Pemilu 2024 adalah Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Apa pendapat Bapak?

Saya kira kesamaan partai antara Ketua MPR dengan presiden terpilih akan banyak sisi positifnya. Mudah-mudahan kerjasama di antara lembaga negara, khususnya presiden dan MPR, akan berlangsung semakin harmonis, dan lebih lancar dibanding sebelumnya.

Kalau melihat perpolitikan secara luas, bila PDI Perjuangan masuk dalam koalisi maka tidak ada lagi partai politik yang berada di luar pemerintahan. Artinya, tidak ada oposisi di lembaga parlemen. Bagaimana pendapat Bapak?

Sebenarnya persoalan ini sudah dibahas di berbagai seminar dan diskusi. Intinya, oposisi itu bisa dilaksanakan oleh siapa saja, mulai dari masyarakat sipil, atau kaum akademisi, juga bisa dilakukan oleh media. Jadi, saya kira oposisi itu bisa di mana saja, yang penting kita dapat menyampaikan kritikan yang konstruktif, bisa menegakkan hal-hal yang dianggap masih belum pas, dan itu bisa dikomunikasikan dan dibicarakan secara menyeluruh.

Terkait isi pidato perdana Ketua MPR



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ahmad Muzani setelah terpilih menjadi Ketua MPR, salah satunya menyoroti masalah eskalasi politik di Timur Tengah. MPR mendorong pemerintah untuk berperan mencegah meluasnya eskalasi politik di Timur Tengah, sekaligus mendukung kemerdekaan Palestina. Apa komentar Bapak?

(Pidato) Itu adalah bukti jika Pimpinan MPR memiliki komitmen yang sangat kuat demi selesainya peperangan di Gaza. Apalagi, ini juga resonansi masyarakat Indonesia agar kita melakukan pembelaan yang aktif bahkan pro-aktif terhadap masyarakat yang ada di jalur Gaza, juga pembebasan Palestina yang saat ini diokupasi oleh zionis Israel.

Oleh karena itu, kami berharap, ke depan pemerintah akan terus menyuarakan semangat untuk menghentikan peperangan di jalur Gaza dan membebaskan Palestina dari penjajahan. Demikian pula peperangan lain yang masih terjadi di berbagai penjuru dunia.

Apakah Indonesia perlu mengirim pasukan perdamaian di daerah konflik di Gaza dan Lebanon?

Saya kira kita ingin fokus pada diplomasi untuk ikut menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Diplomasi adalah alat yang sangat tangguh bagi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Agar dunia bisa mendengar bahwa derita masyarakat Palestina menjadi kekhawatiran dan perhatian besar bagi masyarakat Indonesia. □



Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR dengan Keluarga Bung Karno

Tentang Penghapusan Stigmatisasi Negatif Terhadap Presiden Soekarno



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Secara yuridis formal dapat dipastikan Bung Karno adalah Pahlawan Nasional yang hidupnya bersih dari cacat hukum, dan tidak pernah mengkhianati bangsa dan negara yang Bung Karno telah memproklamlirkan sendiri kemerdekaannya.

PIMPINAN MPR RI menegaskan, TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 Sejak 2003 Tidak Berlaku, Perlu Penghapusan Stigmatisasi Negatif Terhadap Presiden Pertama RI Soekarno. Untuk mendukung pernyataan itu, Ketua MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo menyerahkan Dokumen Surat Pimpinan MPR RI yang ditandatangani 10 Pimpinan MPR kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Supratman Andi Agtas dan kepada Ahli Waris Keluarga Besar Presiden Soekarno. Surat Pimpinan MPR tersebut merupakan jawaban atas Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HHHH.04.01-84 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Tindak Lanjut Tidak Berlakunya TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.

"Melalui surat tersebut, pimpinan MPR menegaskan bahwa secara yuridis tuduhan terhadap Presiden Soekarno yang dianggap memberikan kebijakan mendukung pemberontakan dan pengkhianatan G-30-S/PKI pada tahun 1965, dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai Ketetapan MPR Nomor I / MPR / 2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960-

2022. Hal ini dikarenakan TAP MPRS No. XXXIII / MPRS / 1967 telah dinyatakan sebagai kelompok Ketetapan MPRS yang tidak perlu dilakukan tindakan

hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

Meskipun TAP MPRS Nomor XXXIII/ MPR / 1967 telah dinyatakan tak berlaku lagi, namun masih menyisakan persoalan yang bersifat psikologis dan politis yang harus dituntaskan, karena tidak pernah dibuktikan menurut hukum dan keadilan, serta bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945," ujar Bamsuet dalam Silaturahmi Kebangsaan dan penyerahan dokumen Surat Pimpinan MPR kepada Menkumham RI dan Keluarga Besar Bung Karno yang diwakili oleh Guntur Soekarno Putra dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, di Ruang Delegasi MPR RI, Senin (9/9/24).

Dalam kesempatan itu, hadir putra-putri Presiden Soekarno, antara lain: Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Guntur Soekarnoputra, Sukmawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra,



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Mohammad Bayu Soekarno Putra, Kartika Sari Soekarno, Keluarga Almarhum Rachmawati Soekarnoputri, dan Keluarga

Almarhum Mohammad Taufan Soekarno beserta cucu dan cicit Keluarga Besar Bung Karno.

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Yandri Susanto, dan Hidayat Nur Wahid. Hadir pula Hakim MK Arief Hidayat, Sekretaris Menkopolhukam Letjen TNI Teguh Pudjo Rumecko, Menko Polhukam ke-14 Mahfud MD, dan Menkumham ke-30 Yasonna Laoly.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Surat Pimpinan MPR tersebut juga menjadi komitmen MPR RI dalam mengawal pemulihan nama baik Presiden Soekarno atas ketidakpastian hukum yang adil, yang ditimbulkan dari penafsiran terhadap Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967. Serta memulihkan hak-hak Bung Karno sebagai warga negara dan Presiden Republik Indonesia. Bung Karno merupakan satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang tidak memperoleh hak-hak pensiunnya sebagai seorang presiden, termasuk tidak mendapatkan hak perumahan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sebagaimana Presiden RI lainnya.

“Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap hal ini. Pemberian hak pensiun terhadap Presiden Soekarno bukan semata untuk diri pribadi maupun keluarga besar Presiden Soekarno, melainkan untuk bangsa Indonesia pada umumnya. Perhatian itu perlu diberikan, untuk menunjukan bahwa sebagai sebuah bangsa yang besar, kita telah memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap para presiden yang telah membaktikan dirinya untuk kemajuan Indonesia,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, selain Surat Pimpinan MPR, pemulihan nama baik Presiden Soekarno juga sudah dilakukan oleh para Presiden RI. Pada Tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden Nomor 83/TK/Tahun 2012 telah menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Dr. (H.C) Ir. Soekarno.

Presiden Joko Widodo pada 7 November 2022 saat pidato kenegaraan di Istana

Merdeka telah menegaskan bahwa dengan telah diterimanya gelar Pahlawan Nasional dari Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono, Dr (H.C) Ir. Soekarno dinyatakan telah memenuhi syarat setia, tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan.

“Pasal 25 huruf e UU No.20/2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menyebutkan, salah satu syarat pemberian gelar Pahlawan Nasional yaitu setia dan tidak pernah mengkhianati bangsa dan negara. Dengan demikian, secara yuridis formal, dapat dipastikan bahwa Bung Karno adalah Pahlawan Nasional yang hidupnya bersih dari cacat hukum dan tidak pernah mengkhianati bangsa dan negara yang Bung Karno telah memproklamkan sendiri kemerdekaannya,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPP/ Kepala Badan Bela Negara FKPP ini menambahkan, pengakuan atas peran, kontribusi, dan jasa-jasa Presiden Soekarno telah menjadi bagian dari warisan dunia. Nama Soekarno diabadikan di berbagai negara. Di kota Saint Petersburg, Rusia, ada Masjid Biru Soekarno. Di kota Aljir, Aljazair, ada monumen Soekarno. Di Meksiko, ada Taman Kota “Soekarno Parque”. Di kota Rabbat, Maroko, ada jalan “Rue Soekarno” atau “Avenue Soekarno”. Di Pakistan, selain “Soekarno Square”, juga ada “Soekarno Bazar”. Di kota Kairo, Mesir, ada “Ahmed Soekarno Street”. Dan, di kota Ankara, Turki, ada Jalan Ahmed Soekarno.

“Jika dunia begitu mengapresiasi Soekarno, pantaskah bangsanya sendiri meragukan jasa dan kesetiaan Bung Karno kepada bangsa dan negara. Ke depan, tidak boleh ada warga negara kita, apalagi seorang pemimpin bangsa, yang harus menjalani sanksi hukuman apapun tanpa adanya proses hukum yang adil. Jangan ada lagi dendam sejarah yang diwariskan kepada anak-anak bangsa yang tidak pernah tahu, apalagi terlibat pada berbagai peristiwa kelam di masa lalu. Mari Kita Warisi Api Perjuangan Para Pemimpin Bangsa, Jangan Kita Warisi Abunya,” pungkas Bamsoet. □



Silaturahmi Kebangsaan

Fadel Muhammad: Pikiran Bung Karno Perlu Dikuatkan Kembali

Dengan dicabutnya Tap No. XXXIII/MPRS/ 1967 maka segala tuduhan yang ditujukan kepada Presiden Pertama RI, Soekarno, menjadi gugur dan tidak terbukti.

BERTEMPAT di Ruang Delegasi, Komplek MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, 9 September 2024, MPR menggelar acara Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR dengan Presiden Ke-5 Republik Indonesia dan Keluarga Besar Bung Karno, serta Penyerahan Surat Pimpinan MPR Kepada Keluarga Bung Karno Tentang Tidak Berlakunya Lagi Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.

Hadir dalam acara itu, Ketua MPR Dr. H. Bambang Soesatyo, BA., SE., SH., MBA, bersama para Wakil Ketua MPR, yakni: Dr. Ahmad Basarah, SH., MH; H. Ahmad Muzani, S.Sos; Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Lc., MA.; dan Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad. Juga hadir Menteri Hukum dan HAM, Dr. Supratman Andi Agtas.

Dari Keluarga Bung Karno hadir, yaitu: Prof. Dr. (HC). Hj. Megawati Soekarnoputri, Guntur Soekarnoputra, Sukmawati Soekarnoputri, dan Guruh Soekarnoputra. Dan, di antara ratusan undangan yang lainnya, juga terdapat (hadir) anggota MPR/DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Plt. Sesjen MPR Siti Fauziah, SE., MM.

Disaksikan para hadirin, termasuk media massa, Pimpinan MPR menyerahkan dokumen kepada Menteri Hukum dan HAM dan juga kepada Keluarga Bung Karno. Poin penting dalam dokumen tersebut menyebutkan bahwa MPR resmi menyetujui pencabutan Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/ 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno. Di mana dalam Ketetapan (Tap) No. XXXIII/MPRS/ 1967 tersebut berbunyi, Presiden Soekarno melindungi tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI). Dengan pencabutan Tap tersebut maka segala tuduhan yang ditujukan kepada Soekarno menjadi gugur dan tidak terbukti.

Kepada para wartawan, Fadel Muhammad mengatakan bahwa acara MPR yang digelar hari ini (Senin, 9 September)



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sangat luar biasa. Tentang pencabutan Tap tersebut dan rencana pemberian dokumen, menurut Fadel, sudah disampaikan oleh Pimpinan MPR saat melakukan Silaturahmi Kebangsaan di kediaman Megawati beberapa waktu lalu. "Namun, Ibu Mega ingin agar pencabutan Tap itu dan pemberian dokumen digelar di MPR," ungkapnya.

Harapan dari Presiden Ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan itu agar seluruh rakyat dan bangsa Indonesia mengerti bahwa langkah politik yang dilakukan pada tahun 1967 merupakan kekeliruan masa lalu. "Pimpinan MPR setuju usulan Ibu Mega dan kita buat acaranya pada hari ini," ujar Fadel Muhammad.

Dalam acara tersebut, putera pertama Soekarno, yaitu Guntur Soekarnoputra mewakili pihak keluarga menyampaikan sambutan atau pidato atas tidak berlakunya kembali Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS tersebut. Fadel Muhammad menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Guntur, sangat menarik. Guntur dalam kesempatan itu menyampaikan tentang pikiran-pikiran

Bung Karno. Jadi, intinya, tidak mungkin seorang Proklamator menjadi pengkhianat bangsa.

"Mas Guntur juga mengungkap apa yang selama ini orang tidak berani bicarakan," tutur pria yang pernah menjabat Gubernur Gorontalo dua periode itu. Dalam sambutannya, dia mengemukakan gagasan-gagasan tentang sosialisme. Tapi, sosialisme yang diinginkan adalah sosialisme yang ber-Ketuhanan dan untuk kepentingan rakyat.

Kata sosialisme oleh sebagian orang dianggap berkonotasi negatif. "Tetapi, pikiran Soekarno tentang sosialisme tidak demikian. Sosialisme yang ingin dikembangkan adalah sosialisme yang ber-Ketuhanan dan untuk kepentingan rakyat," ujar Fadel Muhammad. "Kalau saya memahaminya adalah sosialisme Islam," tambah Guru Besar Universitas Brawijaya itu.

Jadi, lanjut Fadel Muhammad, bila Soekarno tidak mengembangkan sosialisme maka paham liberalisme dan kapitalisme akan berkembang kuat di tanah air. Hal demikian, menurut Fadel, perlu didiskusikan kembali

Diskusi Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan

Lestari Moerdijat: Evaluasi Perencanaan Anggaran Pendidikan harus Segera Dilakukan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

EVALUASI perencanaan anggaran pendidikan harus segera dilakukan agar alokasi dana yang sudah dianggarkan negara dapat memenuhi kebutuhan sektor pendidikan di tanah air.

"Kami melihat permasalahannya ada karena perencanaan anggaran tidak menjadi acuan, pengalokasian anggaran pendidikan hanya sekedar memenuhi apa yang diamanatkan UU APBN. Kami kira, ini ada

masalah AM/FM dalam melihat kebutuhan di sektor pendidikan kita," kata Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, yang hadir dalam acara diskusi kelompok bertema "Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan yang digelar Komisi X DPR RI di Jakarta," Sabtu (7/9).

Dalam diskusi yang dihadiri oleh antara lain Jusuf Kalla (Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI), Jimly Asshiddiqie (Pakar Hukum Tata Negara), Amich Alhumami (Deputi Bidang

Pembangunan Sumber Daya Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas) dan Suharti (Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI) itu, terungkap bahwa selama ini amanat undang-undang mengalokasikan 20% APBN untuk sektor pendidikan tidak dilaksanakan dengan baik, dan alokasi anggaran yang ada tidak tepat sasaran.

Selain itu, ujar Lestari, upaya pengawasan realisasi anggaran pendidikan harus konsisten dilakukan sampai di tingkat terbawah.

Sehingga, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, efektivitas pemanfaatan anggaran yang terbatas bisa dimaksimalkan dengan baik.

Diakui Rerie, yang juga legislator dari Fraksi NasDem itu, praktik pemanfaatan anggaran pendidikan yang tidak tepat sasaran kerap ditemukan di berbagai daerah.

Sehingga, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, distribusi anggaran pendidikan di daerah-daerah harus benar-benar diawasi agar sesuai dengan kebutuhan daerah bersangkutan.

Rerie sangat berharap pengawasan atas setiap pengalokasian anggaran menjadi perhatian kita bersama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi setiap anak bangsa. □



Tentang Pencabutan Tap MPRS No. XXXIII/1967

Idris Laena: Saatnya Menghapus Luka Masa Lalu

Setelah pencabutan Tap MPRS No. XXXIII/1967 maka sekaranglah saatnya untuk menghapus luka masa lalu. Idris Laena mengusulkan agar Tap MPR No. XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,, juga dicabut. Kenapa?

KETUA Fraksi Partai Golkar MPR RI, Dr. Ir. H.M. Idris Laena, MH., mengapresiasi langkah MPR RI mencabut Ketetapan (Tap) MPRS No. XXXIII Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno. Dengan pencabutan Tap MPRS No. XXXIII/1967 ini maka tuduhan terhadap Soekarno atas keberpihakannya pada Partai Komunis Indonesia (PKI) resmi dicabut.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyerahkan surat Pimpinan MPR tentang dicabutnya Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 kepada perwakilan keluarga Soekarno dalam silaturahmi kebangsaan MPR pada Senin, 9 September 2024. Megawati Soekarnoputri dan Guntur Soekarnoputra hadir dalam acara Silaturahmi Kebangsaan yang berlangsung di Ruang Dlegasi, Kompleks Parlemen, Jakarta, itu.

Namun demikian, Idris Laena ber-



pendapat bahwa setelah pencabutan Tap MPRS No. XXXIII/1967 maka sekaranglah saatnya untuk menghapus luka masa lalu.

Karena-nya, Idris Laena mengusulkan agar Tap MPR No. XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,, juga dicabut.

“Karena, Tap tersebut secara eksplisit ditujukan kepada Soeharto. Padahal, sejatinya, kasus mantan Presiden Soeharto pada bulan Mei 2006 sudah ditutup pasca diterbitkannya SKP3 oleh Kejaksaan Agung,” katanya.

Menurut Idris Laena, pasal 140 ayat 1 KUHAP menegaskan bahwa Jaksa Agung dibolehkan mengeluarkan SKP3 kalau ada alasan tertentu.

Menindaklanjuti pandangan itu, lanjut Idris Laena, Fraksi Partai Golkar MPR RI telah melaksanakan rapat pada Selasa, 10 September 2024. “Kesimpulan rapat ini akan dikonsultasikan kepada DPP Partai Golkar,” tutupnya. □

Diskusi Publik Amandemen UUD

Lestari Moerdijat: Harus Mampu Menjawab Kebutuhan Kehidupan Bernegara

Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

FRAKSI Partai NasDem MPR RI menggelar diskusi publik bertema: ‘Evaluasi Implementasi Hasil Amandemen UUD 1945’ di Kota Tangerang Selatan, Banten, Senin (16/9). “Diskusi publik ini bertujuan untuk mendengarkan masukan dari para ahli dan pengalaman dari pelaku perubahan UUD 1945,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat menjadi pembicara kunci pada acara Diskusi Publik tersebut.

Hadir pada diskusi tersebut, antara lain Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., (Ketua





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Fraksi Partai NasDem MPR RI), Drs. Jacob Samuel Halomoan Lumban Tobing, MPA., (Ketua Panitia Ad-Hoc I BP-MPR dan Ketua Komisi A pada Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2000-2003), Prof. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., (Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia), Nursyahbani Katjasungkana (Sekjen Koalisi Perempuan 1998-2004), Dr. K.H. Lukman Hakim Saifuddin (Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014), dan Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia).

Menurut Lestari, berbagai masukan dari para pakar dan masyarakat terkait perubahan UUD 1945 dinilai penting. Apalagi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, sampai hari ini kecurigaan masyarakat terhadap rencana perubahan UUD NRI Tahun 1945 cukup tinggi.

Dengan berbagai masukan yang bertujuan untuk mengevaluasi implementasi perubahan UUD 1945 itu, Rerie berharap, perubahan konstitusi yang akan terjadi di masa datang dapat menjawab tantangan dan kebutuhan dalam bernegara di masa datang.

“Fraksi Partai NasDem MPR RI berpandangan bahwa amandemen konstitusi bukanlah hal yang tabu dan

dilarang. Gagasan amandemen konstitusi dapat saja dilaksanakan sepanjang terdapat kebutuhan dan memenuhi sejumlah persyaratan,” tegas Rerie.

Persyaratan itu, tambah dia, antara lain perubahan konstitusi tidak dilakukan terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan harus dikaji secara menyeluruh agar tidak sekedar menjadi tamal sulam.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu

berharap, masukan dan pemikiran dari para pakar, serta para pemangku kepentingan terkait perubahan UUD 1945 dapat menjadi pengetahuan dan pemahaman bersama bagi setiap warga negara.

Rerie mendorong agar gagasan perubahan konstitusi harus bertujuan untuk memberikan peningkatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan bagi setiap warga negara. □





Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.

Ketua MPR RI

Mendorong Parpol Peduli dan Wujudkan Kebaikan Bersama

HAMPIR semua aspek pada tata kelola kehidupan berbangsa-bernegara berpijak pada keputusan atau kebijakan politik. Maka, peran politisi dalam konteks itu sangat signifikan. Konsekuensinya, partai politik (Parpol) dituntut mampu menghadirkan kader atau politisi yang kredibel dan kompeten untuk menjadi anggota DPR/MPR, DPRD Provinsi hingga DPRD kabupaten/kota. Kredibilitas dan kompetensi komunitas politisi akan memungkinkan Parpol mewujudkan kebaikan bersama.

Dinamika kehidupan bersama diatur oleh undang-undang (UU), ragam peraturan pemerintah hingga peraturan daerah. Setelah menyerap dan merangkum aspirasi publik, benih serta rancangan keputusan atau kebijakan politik itu pun diinisiasi, diperdebatkan, dibahas, dan disepakati menjadi UU atau peraturan publik oleh para politisi di parlemen bersama unsur eksekutif atau pemerintah.

Tak hanya mengaggas, membahas dan merancang UU serta peraturan yang berlaku untuk publik, sistem demokrasi pun memberi hak dan wewenang kepada Parpol untuk menunjuk dan mengajukan calon pemimpin publik pada semua tingkatan, mulai dari presiden, gubernur, hingga bupati serta wali kota. Dengan begitu, peran dan kontribusi Parpol bersama para politisi pada semua aspek tata kelola kehidupan berbangsa-bernegara sangat signifikan.

Sudah menjadi bukti sejarah bahwa ke arah mana masa depan bangsa-negara sedikit banyak ditentukan oleh pemikiran, pertimbangan dan kesepakatan politik para politisi di parlemen. Begitu juga dengan arah masa depan setiap daerah. Ekstrimnya, baik-buruk dinamika hidup berbangsa-bernegara pun dipengaruhi oleh komunitas politisi yang lazimnya berasal dari sejumlah Parpol. Komunitas politisi yang bijak dan negarawan pasti

bersemangat dan fokus berkontribusi untuk mewujudkan kebaikan bersama. Sebaliknya, politisi yang tidak kredibel, tidak kompeten dan avonturir pasti berpotensi merusak tatanan.

Hari-hari ini, semua elemen masyarakat prihatin dengan fakta tentang tatanan kehidupan bersama yang jauh dari ideal. Keprihatinan ini sudah berkepanjangan. Banyak komunitas sulit untuk percaya ketika melihat negara-bangsa begitu lemah karena tak mampu mencegah tindakan dan petualangan segelintir politisi memporak-poranda tatanan kehidupan bersama. Demi kepentingan sempit, demokrasi dimanipulasi.

Asas kelayakan dan asas kepatutan dikangkangi. Logika tentang benar dan baik dijungkirbalikkan, dan semua orang dipaksa untuk menerima apa yang salah sebagai kebenaran. Sebuah keputusan atau ketetapan hukum yang lahir dari proses yang cacat moral dan cacat etika tetap diterima dan dilaksanakan. Sementara akal sehat publik yang awam memahami bahwa sebuah ketetapan hukum dari proses yang cacat moral dan cacat etika sejatinya tidak dapat dilaksanakan (non executable).

Masyarakat sedih dan prihatin karena melihat negara seperti tak berdaya mencegah rekayasa proses abnormalitas yang menggejala hingga hari-hari ini. Publik tahu dan mencatat bahwa korupsi semakin merajalela. Alih-alih merespons kasus-kasus korupsi yang menjadi perhatian masyarakat kebanyakan, otoritas penegak hukum malah mempertontonkan praktik tebang pilih dalam merespons kasus.

Akibatnya, persepsi masyarakat kebanyakan tentang kehidupan berbangsa-bernegara hari-hari ini amatlah negatif. Telah muncul ungkapan di ruang publik bahwa Indonesia sejatinya telah berubah menjadi negara kleptokrasi, bukan negara demokrasi. Menyedihkan karena negara-bangsa tak mampu menghentikan kecenderungan kleptokrasi atau

pencurian kekayaan negara oleh segelintir kekuatan. Sindiran tentang negara kleptokrasi pernah diungkap presiden terpilih Prabowo Subianto pada pekan ketiga Februari 2019 di forum Silaturahmi Ahlith Thoriqoh Syathoriyah Annahdliyah di Majelis Taklim Kyai Tambak Deres, Surabaya.

Tak hanya ungkapan negara kleptokrasi. Di ruang publik muncul juga ungkapan 'trias koruptica'. Ungkapan ini – plesetan dari trias politika — mengemuka karena inkonsistensi negara dalam memerangi korupsi. Tak berhenti sampai di situ, menuju pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini, perhatian semua elemen masyarakat tertuju pada fakta tentang kartelisasi politik. Banyak komunitas sangat kacewa melihat banyak Parpol nyaris kehilangan ideologi, dan mau saja 'dipaksa' menjadi anggota dari kartelisasi politik yang dibentuk dengan menggunakan sumber daya negara.

Ragam persepsi negatif yang menggambarkan abnormalitas itu tentu saja merefleksikan kecewaan dan kemarahan masyarakat. Kecewa dan marah itu terus bergema di ruang publik karena abnormalitas Indonesia sekarang ini menjadi pukulan teramat keras bagi hampir 50 juta komunitas kelas menengah di negara ini. Mereka kehilangan pekerjaan karena memburuknya kinerja industri manufaktur, namun pada saat yang sama mereka harus tetap memenuhi kewajiban pajak-nya.

Maka, bukan mengada-ada untuk mengatakan bahwa kekecewaan dan kemarahan itu lebih dialamatkan kepada tidak hanya regulator melainkan juga kepada Parpol dan komunitas politisi di parlemen. Sebab, publik hanya paham bahwa semua aspek pada tata kelola kehidupan berbangsa-bernegara berpijak pada keputusan atau kebijakan politik yang berproses di parlemen.

Fakta tentang abnormalitas Indonesia saat ini hendaknya juga dihayati dan menjadi keprihatinan para politisi di tengah kesibukan semua Parpol mempersiapkan keikutsertaannya pada Pilkada serentak 2024. Karena daya rusaknya yang luar biasa, abnormalitas sekarang ini sudah menjadi bom waktu. Ledakannya berpotensi menghadirkan krisis multi dimensi. Semua Parpol didorong untuk peduli dan bersemangat untuk segera mewujudkan kebaikan bersama.

Memang, membenahi abnormalitas Indonesia saat ini harus dimulai dengan terlebih dahulu mendorong semua Parpol melakukan pembenahan internal, termasuk sistem rekrutmen dan proses

pengkaderan. Parpol merupakan tulang punggung demokrasi, dan menjadi titik pangkal paling strategis untuk mewujudkan proses terciptanya penyelenggaraan negara baik dan benar seturut konstitusi. Pun menjadi faktor penting mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Soalnya, selain diberi hak dan wewenang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum, Parpol juga diberi amanat oleh undang-undang untuk menyeleksi pejabat publik di tingkat daerah maupun pusat, baik melalui Pemilu ataupun Pilkada. Melalui anggotanya di parlemen, Parpol juga diberi wewenang melaksanakan fit and proper test untuk menyeleksi Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, gubernur-deputi gubernur senior Bank Indonesia, pimpinan dan anggota BPK, Komisi Yudisial, KPK, KPU, hakim agung hingga hakim konstitusi.

Pembenahan internal Parpol harus jadi prioritas karena semua orang tahu bahwa ada masalah di dalam tubuh Parpol sendiri. Menurut hasil kajian LIPI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setidaknya ada empat permasalahan integritas yang menyelimuti Parpol. Pertama, ketiadaan standar etik Parpol. Seharusnya Parpol mampu mendorong lahirnya politisi berintegritas, memperjuangkan aspirasi publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Parpol juga harus memiliki standar etik internal guna mengurangi risiko korupsi politik. Berdasarkan data KPK dari tahun 2004 hingga 2023, jumlah kasus korupsi yang melibatkan anggota Parpol mencapai 344 kasus.

Persoalan kedua adalah problematika kaderisasi dan standar rekrutmen. Saat ini sistem rekrutmen yang terbangun di tubuh Parpol belum baku, tidak terbuka, tidak demokratis, pun tidak akuntabel. Akibatnya, proses rekrutmen banyak diambil dari lingkup keluarga dan kerabat politik elit parpol. Selain itu, belum tercipta proses kaderisasi secara berjenjang. Persoalan ketiga yang dihadapi Parpol adalah problematika pendanaan partai, dan persoalan keempat adalah tantangan mewujudkan demokrasi internal di tubuh partai.

Akan sangat ideal jika abnormalitas Indonesia hari-hari ini mendapatkan respons konstruktif dari semua Parpol. Dengan perannya yang demikian strategis dalam kehidupan berbangsa-bernegara, Parpol harus lebih peduli dan berani mengambil inisiatif mewujudkan kebaikan bersama. □

Muktamar VII KBPII

Ahmad Muzani: Kader, Alumni, dan Masyarakat Bergerak Bersama Bangun Optimisme

Ke depan alumni PII bisa memberi kontribusi lebih baik lagi bagi pembangunan bangsa dan negara, baik pembangunan politik, pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan dan semua sektor kehidupan yang akan datang.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, bersama sejumlah tokoh nasional, hadir dalam acara Pembukaan Muktamar VII dan Reuni Akbar Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) di Grand Sahid, Jakarta, Jum'at malam, 13 September 2024. Di antara tokoh nasional hadir, antara lain: Ketua Dewan Kehormatan PP KBPII Jusuf Kalla; Ketua Dewan Pertimbangan PP KBPII Soetrisno Bachir; Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid; serta seluruh pengurus pusat, wilayah, dan daerah KBPII.

Dalam acara yang mengusung tema: "Menguatkan Amal Usaha Berkontribusi Membangun Bangsa Menuju Indonesia Emas 2024," itu, Ahmad Muzani mengajak para alumni dan kader PII untuk tetap menjaga persaudaraan, persatuan, kerukunan, dan

kebersamaan. Apalagi, lanjut Muzani, rata-rata alumni PII adalah orang-orang atau tokoh yang didengar di daerahnya, di wilayahnya, atau di kampungnya.

Kelebihan lainnya, menurut Ahmad Muzani, alumni PII rata-rata punya pondok pesantren, punya unit usaha, dan kegiatan-kegiatan yang mempekerjakan. "Kelebihan itu bisa dimaksimalkan untuk menggerakkan orang-orang di sekitar, untuk menciptakan optimisme, untuk menciptakan keyakinan, kecerahan masa depan untuk semua," ujar Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Jika upaya itu dilakukan, lanjut Ahmad Muzani, insya Allah optimisme akan kecerahan masa depan akan menjadi kenyataan. "Dengan begitu, Indonesia menjelang usia 100 tahun yang akan datang,

mudah-mudahan anak-anak kita, adik-adik kita akan mampu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," ujar Muzani.

Berbicara soal kualitas dan kuantitas generasi muda penerus kepemimpinan bangsa, kata Ahmad Muzani, harus dimulai dari sekarang. Perlu diketahui, penduduk Indonesia rata-rata bertambah satu persen dari 270 juta penduduk setiap tahun, atau sekitar 2,7 juta orang penduduk Indonesia bertambah tiap tahun. Tingkat pendidikan rakyat Indonesia 90% tamat sekolah dasar, dengan tingkat pendidikan: tamat SMP 50%, tamat SMA lebih rendah lagi, dan perguruan tinggi rata-rata 10% saja.

"Fakta ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang kita miliki, masih cukup rendah. Setiap pemimpin harus memikirkan bagaimana nasib 2,7 juta orang itu. Hal ini



juga memerlukan partisipasi yang kuat dari seluruh masyarakat, bukan hanya pemerintah, agar kita bisa membangun negara lebih kuat lagi. Karena, menurut Ahmad Muzani, 'cita-cita kita berorganisasi, cita-cita kita bernegara, adalah menjadikan setiap insan memiliki kehidupan yang lebih baik lagi,' katanya.

Lebih lanjut, Ahmad Muzani menyatakan, selain masalah dan tantangan dari dalam, bangsa ini masih menghadapi berbagai macam tantangan, serta situasi dunia yang

makin tidak jelas. Semua negara sekarang berebut pangan, ancaman peperangan di mana-mana, dan semua negara sekarang berebut sumber energi, bahkan sumber air. Sehingga munculnya generasi muda yang berkualitas semakin menjadi kebutuhan.

"Mungkin di antara generasi saya dan seterusnya di masa depan harus bergeser. Karena itu, kita harus mempersiapkan generasi-generasi berkualitas yang akan datang. Maka saudara-saudara sekalian, alumni dan kader harus mempersiapkan diri

untuk menjadi pemimpin yang akan datang," imbuhnya.

Ahmad Muzani menegaskan, kesadaran untuk menjadi pemimpin itu harus digugah kepada setiap orang, meskipun kemungkinan itu tidak terjadi. Dan, di PII hal itu dimungkinkan, karena di PII ada latihan untuk menjadi pemimpin dari kelas SMP dan seterusnya.

"Saya sendiri dulu jadi Ketua PII, dan yang saya pimpin itu orang-orang yang lebih besar dari saya. Itu sebabnya, apa yang menjadi gagasan Pak Jusuf Kalla harus diperhatikan, terutama soal kita harus memperkuat akar PII. Karena sesungguhnya masa depan alumni PII ada di PII yang sekarang ini," ujarnya.

Ahmad Muzani berharap, ke depan alumni PII bisa memberi kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan bangsa dan negara, baik pembangunan politik, pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan dan semua sektor kehidupan yang akan datang.

"Mudah-mudahan alumni PII ke depan bisa menjadi panutan bagi kehidupan bangsa dan negara. Mimpi kita adalah suatu hari, entah kapan, terjadi alumni PII bisa menjadi pemimpin bangsa. Siapa tahu di antara anak-anak didik kita, entah kapan waktunya, jalan itu terbuka dan itulah kontribusi nyata kita buat Indonesia Raya," tandasnya. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Menjawab Tantangan **Demokrasi** Pancasila



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MPR bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai gudang kaum intelektual, para akademisi di kampus tertua di Indonesia itu menguraikan berbagai masalah yang ada di demokrasi di tanah air dan memberi jalan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh semua.

BERTEMPAT di Yogyakarta, Juli 2024, Badan Pengkajian (BP) MPR bersama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIP UGM) menggelar focus group of discussion (FGD). Dalam FGD bertema: 'Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia' hadir Ketua BP MPR Djarot Saiful Hidayat (Fraksi PDI Perjuangan) bersama para anggota BP MPR, seperti H. Mustafa Kamal, SS., (Fraksi PKS), Dr. Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari, S.S., M.Hum (Fraksi PDI Perjuangan), Filep Wamafma, SH., M.Hum (Kelompok DPD). Sedang dari pihak UGM, hadir para akademisi dan dosen, yakni Arie Sujito, Nurhadi Susanto, Andy Omara, dan Muhadi Sugiono.

Drs. Muhadi Sugiono, MA, dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM, dalam makalahnya yang bertema: '*Tantangan Demokrasi Pancasila, Demokrasi yang bukan Pancasila atau Pancasila yang tidak Demokratis,*' memaparkan secara panjang pokok-pokok pikirannya, dijabarkan dalam beberapa bagian, meliputi: Mengukur dan Memaknai Demokrasi, Pelemahan Demokrasi, dan Tantangan Demokrasi Pancasila.

Mengukur dan Memaknai Demokrasi

Demokrasi saat ini menjadi sebuah terminologi yang sangat diidealkan. Keberadaannya dalam sebuah sistem politik di sebuah negara memiliki nilai yang sangat berharga dan menentukan posisi negara tersebut dalam masyarakat bangsa-bangsa. Dilihat dengan cara ini, posisi Indonesia tidak cukup menggembirakan. Di dunia internasional, demokrasi di Indonesia dinilai cacat (*flawed democracy*).

Berdasarkan Indeks Demokrasi yang dikeluarkan oleh Economist Intelligence Unit (EIU), skor demokrasi Indonesia adalah 6,52 pada tahun 2023, menurun dari tahun 2022 dan 2021 dengan skor 6,71. Dengan skor tersebut, Indonesia berada dalam urutan ke-56 dari 167 negara yang disurvei. Posisi ini menunjukkan penurunan dari posisi sebelumnya, yakni di posisi 54 (2022) dan 52 (2021). Indeks demokrasi yang semakin menurun berdasarkan data Economist Intelligence Unit ini tidak jauh berbeda dengan indeks-indeks yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga lain, termasuk Badan Pusat Statistik, yang merilis Indeks Demokrasi sebagai sebuah sistem yang



sangat diidealkan atau sebagai bentuk kehidupan politik tertinggi ini sangat menarik.

Dalam sejarah, demokrasi menjadi sistem yang sangat diidealkan baru berlangsung kurang lebih 200 tahun. Sebelumnya, demokrasi memiliki konotasi yang negatif. Aristoteles yang mengartikan demokrasi sebagai *power of the demos* (*demos* dimaknai sebagai anggota masyarakat selain kelompok elit, yang berarti aristokrat dan orang kaya) dan mempertentangkannya dengan oligarki (kekuasaan oleh elit). Tatanan politik yang diidealkan oleh Aristoteles adalah *politeia*, yang mencerminkan keseimbangan antara kedua kekuatan: *demos* dan elit. Bahkan, di Amerika, sebagai salah satu negara yang paling aktif mempromosikan demokrasi, hingga abad ke-18 tidak melihat demokrasi sebagai tatanan yang diidealkan. Bahkan sebaliknya. Yang diidealkan adalah tatanan yang disebut dengan republik, yang



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sebenarnya mencerminkan keseimbangan *politeia* yang diinginkan oleh Aristoteles.

Sebagai sebuah tatanan yang dianggap ideal saat ini, demokrasi menyisakan

ambiguitas yang bisa menghambat pencapaiannya sebagai tatanan yang ideal.

Ambiguitas ini muncul dari makna ganda suku kata *demos* dalam demokrasi. *Demos* bisa

dimaknai sebagai bangsa seperti bangsa Indonesia (yang menginginkan kemerdekaan dari Belanda), tetapi juga bisa dimaknai sebagai bukan elit (yang dalam bahasa Yunani disebut demos), yakni mereka yang sering diasosiasikan dengan mereka yang tertindas, tereksplorasi ataupun terzalimi. Pemaknaan terhadap kata demos, oleh karenanya, menjadi sangat penting karena sangat menentukan karakter demokrasi yang dikembangkan.

Pelemahan Demokrasi

Idealnya, kedua komponen yang terkandung dalam demos harus dikombinasikan untuk menghasilkan demokrasi yang ideal. Di satu sisi, masyarakat harus diperintah oleh seluruh rakyat, tidak ada sekelompok kecil elit yang bisa mengendalikan tatanan dengan mengabaikan ataupun merugikan rakyat. Dalam artian ini, demokrasi harus dimaknai sebagai tantangan yang menempatkan masyarakat dalam status dan posisi yang benar-benar sederajat. Tetapi, dalam realitasnya sulit atau jika tidak mungkin untuk mencapai idealisme ini sepenuhnya. Dengan kata lain, demokrasi pada dasarnya lebih merupakan konsep yang harus dikaitkan dengan tujuan dan idealisme, dan bukan sebagai kondisi.

Dikaitkan dengan tujuan, pada dasarnya demokrasi merupakan proses yang dinamis, selalu mengalami pasang surut. Dalam



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sejarah demokrasi berkembang dan mengalami kemunduran sejalan dengan dinamika perkembangan dalam masyarakat. Tetapi, secara keseluruhan ada beberapa hal yang sangat berpengaruh untuk melemahkan demokrasi.

1. Apatisme warga negara.

Keterlibatan warga negara dalam demokrasi yang menurun mencerminkan meningkatnya kesenjangan: bisa sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Kondisi ini ditandai dengan sikap apatis warga negara yang merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan dibandingkan dengan elit.

Mereka merasa bahwa nasib mereka tidak berada di tangan mereka sendiri, tetapi ditentukan oleh pihak atau faktor-faktor lain, baik dalam kaitannya dengan lapangan pekerjaan, pendidikan anak-anak mereka, dan lain-lain. Mereka juga merasa tidak mampu untuk mengubah keadaan. Dalam situasi seperti ini, kecenderungan partisipasi, seperti terlihat dalam pemilihan umum cenderung rendah dan semakin memberikan peluang kepada kekuasaan uang maupun kepentingan-kepentingan tertentu. Tidak jarang, kondisi ini akan mendorong munculnya para pemimpin yang menggunakan populisme untuk memperoleh dukungan.

2. Eksklusi

Demokrasi yang kuat memerlukan identitas bersama, karena demokrasi memerlukan komitmen dari semua komponen dalam masyarakat untuk terlibat aktif: memberikan suara, membayar pajak dan seterusnya. Keberadaan identitas bersama ini sangat diperlukan sebagai basis munculnya solidaritas yang sangat penting, terutama pada saat-saat redistribusi, misalnya kekayaan, harus dilakukan. Tanpa adanya solidaritas maka kebutuhan akan redistribusi akan sulit dilakukan, karena resistensi dari kelompok-kelompok yang merasa hak-haknya akan berkurang.





Identitas bersama ini juga menjadi bagian penting dalam menciptakan trust kepada sistem yang berjalan.

Adalah dalam artian ini berbagai bentuk eksklusivitas dalam masyarakat akan memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi demokrasi. Semakin kuat gelombang eksklusivitas, baik dalam bidang ekonomi, sosial, kultural atau religi, semakin besar dampaknya bagi pelemahan demokrasi.

3. Polarisasi

Polarisasi menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya dalam melemahkan demokrasi. Polarisasi mayoritas-minoritas, misalnya,

adalah salah satu faktor yang melemahkan demokrasi. Jika polarisasi tersebut menghasilkan ide mengenai 'rule of majority,' ide tersebut mengindikasikan bahwa kelompok minoritas tidak memiliki legitimasi yang sama dibandingkan dengan kelompok mayoritas, terutama jika polarisasi ini dipahami sebagai definisi yang tetap, sebelum proses politik tertentu dilakukan.

Tantangan demokrasi Pancasila

Sebagai konsep dengan tujuan tertentu, demokrasi ditafsirkan dan dilaksanakan dengan cara yang sangat berbeda. Tambahan atribut di belakang kata

demokrasi, seperti liberal atau Pancasila, oleh karenanya menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dalam kaitannya dengan demokrasi yang dijalankan. Nilai-nilai liberalisme menjadi tolok ukur untuk mengukur seberapa jauh demokrasi berjalan sesuai dengan tujuan di negara-negara yang menganut paham liberalisme. Dengan cara yang sama, nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi rujukan untuk menilai kualitas demokrasi di Indonesia.

Persoalan yang dihadapi oleh demokrasi Pancasila pada dasarnya terletak pada bagaimana nilai-nilai Pancasila dirumuskan. Muncul dan berkembang dalam sebuah konteks yang mendorong Indonesia untuk mengambil jalan yang berbeda dari ideologi-ideologi yang dominan, Pancasila menjadi sangat terbuka untuk ditafsirkan oleh pemimpin yang berbeda. Dalam sejarah, penafsiran yang berbeda tentang Pancasila menghasilkan munculnya tatanan yang tidak demokratis atau bahkan cenderung otoritarian.

Pasca reformasi yang menghasilkan demokrasi saat ini dibangun dengan semangat yang sangat optimistis, bahwa Indonesia akan berkembang menjadi negara yang demokratis. Indikator-indikator demokrasi procedural, seperti pemilihan yang berlangsung relatif mulus untuk memilih pemimpin dan anggota parlemen menggambarkan demokrasi sebagai sebuah proses berlangsung dengan sangat baik. Institusi-institusi yang mendukung proses demokrasi juga telah terbentuk. Tetapi, mengapa penilaian masyarakat internasional terhadap demokrasi di Indonesia cenderung negatif, atau setidaknya tidak positif?

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut bisa jadi terlihat dari tiga faktor yang memperlemah demokrasi. Demokrasi yang pada dasarnya merupakan sebuah tatanan yang berpusat pada kekuasaan rakyat gagal direalisasikan karena proses pelemahan yang terjadi melalui ketiga proses di atas. Tanpa ada upaya serius untuk memperbaikinya, demokrasi di Indonesia akan dihadapkan pada dua kemungkinan yang bertolak belakang: demokrasi yang tidak Pancasila atau Pancasila yang tidak demokratis. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Majunya Demokrasi di Tengah Ancaman

Pemilu 2024 berhasil membendung politik identitas dan mencegah pembelahan sosial berbasis agama maupun etnis, namun berbiaya tinggi yang memicu kekhawatiran masa depan demokrasi. Demikian catatan Arie Sujito.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ARIE Sujito, dosen Sosiolog, mengawali makalahnya yang berjudul: *Refleksi (singkat) Demokrasi Indonesia: Capaian dan Tantangan*, dengan critical issues. Dia mengatakan, sepanjang perjalanan demokrasi dan demokratisasi, dinamika pasca otoriterisme, upaya-upaya konsolidasi membangun tata politik yang kredibel, tidak mudah dilakukan. Ada capaian strategis, namun sejumlah kerentanan tidak bisa dipungkiri.

Dalam fase lebih dari dua dekade, demokrasi telah menghasilkan banyak hal, dengan segala limitasi dan risikonya: Penguatan partisipasi dan emansipasi sosial, Desentralisasi dan otonomi daerah, Layanan hak-hak warga negara, Governance reform, dan Redistribusi resources dengan orientasi pemerataan.

Sejumlah kerentanan, berpotensi terjadinya keretakan sosial, karena ekspresi kasus-kasus dan tindakan manipulasi atas kemajemukan formasi sosial, Menebalnya sentimen identitas (etnik, agama, ras, dan pengelompokan sejenis), Mendistorsi “kebebasan” dengan manipulasi perbedaan terespresi melalui cara-cara yang justru anti demokrasi, dan Merosotnya integritas politik, peristiwa dan kasus mencerminkan inkonsistensi penerapan aturan main dalam

Pemilu (catatan Pemilu sejauh ini).

Lebih lanjutnya, di dalam makalahnya, Arie Sujito menjelaskan, sejumlah kerentanan instrumentalisasi informasi sebagai ladang perselisihan dan menebalnya hate speech, produksi dan reproduksi hoax. Bahkan, paling mutakhir, situasi tata kelola dokumen (peretasan), rentan perusakan data berdampak pada ancaman hak warga dan kedauatan negara. “Ruang publik makin kumuh dikotori oleh kecenderungan perselisihan dangkal, produksi kebencian dan histeria pencitraan,” tuturnya.

Sejumlah penilaian, seperti defisit demokrasi (Demos, 2010), frozen democracy (Sorensen, 2007), pseudo demokrasi, involusi politik (Lay, 2006) dan seterusnya, yang menggambarkan kesulitan meningkatkan kualitas demokrasi.

Ketegangan, konflik, bahkan kekerasan sebagai ekspresi negosiasi dan fragmentasi sosial dalam arena demokrasi menjadi sinyal serius kekhawatiran merosotnya demokrasi (Triyono, 2023); (Sujito, 2024).

Dia memberi catatan sedikit tentang Pemilu 2024. Menurutnya, Pemilu 2024 memang berhasil membendung politik identitas, mencegah pembelahan sosial berbasis agama maupun etnis, namun muncul gelombang ketegangan hukum dan politik berlarut, menebalnya distrust dan

potensi apatisme ke depan. Politik biaya tinggi dalam Pemilu memicu kekhawatiran masa depan demokrasi, potensi mendegradasi kaum muda. Di kalangan masyarakat sipil, risiko informasi makin terbuka, politik dipersepsikan memburuk dan citra permisif atas berbagai ragam pragmatisme dan oportunisme sempit.

Dalam makalahnya, ia juga menguraikan soal Tantangan Repolitisasi Demokrasi. Dia menyebut, perluasan wacana kritis untuk edukasi publik sebagai modalitas dalam membangun kewargaan yang tangguh dan membangun jembatan penghubung sebagai arena transformasi, antara partisipasi masyarakat sipil, pemilih cerdas, dan masyarakat politik yang representative.

Lebih lanjut dikatakan, perlu kombinasi atau perpaduan antara demokrasi berbasis teknokrasi (hukum dan tata kelola), nilai etis politik, dan community knowledge (partisipasi komunitas). Antara ketiganya tidak perlu dipertarungkan, namun didialogkan untuk menemukan formulasi demokrasi kontesktual Indonesia. Demokratisasi Indonesia diletakkan dalam proses dan output perubahan/perbaikan, tidak sekadar memilih satu di antara keduanya. Inilah realitas membaca Indonesia agar tidak terjebak pada kebekuan demokrasi. □



Terowongan Silaturahmi Mulanya Sebulan Ide Datang dari Nasaruddin Umar

Silih berganti ide untuk membangun terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Ide pertama dilontarkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Selanjutnya oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Semua mengalami hambatan dan kebuntuan. Setelah Nasaruddin Umar melapor ke Presiden Joko Widodo, ide itu disetujui dan pembangunan pun dilakukan. Saat Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia, beberapa waktu lalu, ia berkesempatan melintasi dan menjadi saksi keberadaan terowongan itu. Dia berharap Terowongan Silaturahmi itu dapat memacu semangat persahabatan, kerukunan, dan persaudaraan.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

ADA harapan dan keinginan dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar agar tercipta kehidupan masyarakat yang penuh kedamaian dan toleransi di tengah keberagaman agama, suku, dan bahasa. Untuk mencapai harapan tersebut, Kementerian Agama tak lelah-lelahnya mengimbau semua umat agar berperilaku yang mengedepankan persamaan, bukan mengedepankan perbedaan.

Lukman Hakim Saifuddin tak ingin hanya ingin terciptanya kehidupan yang penuh toleransi dan kedamaian antarumat sebatas diomongkan, tapi dia ingin menunjukkan tanda toleransi itu ada, sehingga alumni Pondok Modern Darussalam Gontor itu mempunyai ide membangun jembatan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral.

Dari laman *kemenag.go.id* diungkap, jembatan penghubung antara dua tempat ibadah umat Islam dan Katolik itu tidak hanya

sebagai simbol kerukunan umat, tetapi juga simbol keberlanjutan peradaban. Katedral mewakili masa lampau dan warisan sejarah Indonesia yang dibangun dengan arsitektur bergaya neo-gotik khas Eropa yang ada sejak 1808. Sedang Istiqlal lebih bernuansa modern dan masa kini yang dirancang oleh Frederich Silaban yang beragama Kristen.

Terungkap dalam laman sama yang beredar pada 24 Februari 2021, Lukman Hakim Saifuddin memilih jembatan sebagai penghubung agar secara lahiriah lebih nampak daripada terowongan dalam tanah yang tak terlihat. Tujuannya, agar simbol itu bisa lebih jelas dan nampak di permukaan, seperti pesan yang hendak disampaikan



Nasaruddin Umar



kepada dua komunitas agama yang berlainan itu. Sayangnya, gagasan membangun jembatan antara Istiqlal dan Katedral di masa dirinya menjadi menteri agama belum terwujud.

Keinginan yang sama juga muncul dari Nasaruddin Umar. Agar suasana kerukunan umat benar-benar tercipta, dia ingin antara dua tempat ibadah itu dihilangkan pagar pembatasnya, sehingga antara Istiqlal dan Katedral berada dalam satu halaman. Keinginan tersebut rupanya banyak yang tak sependapat, sebab penutupan jalan yang memisahkan antara dua bangunan itu akan mengurangi ruang untuk lalu lintas, sehingga akan menimbulkan kepadatan bahkan kemacetan di kawasan Pasar Baru, Lapangan Banteng, dan Gambir.

Dalam *kompas.com*, 05/09/2024, diceritakan bahwa Nasaruddin Umar tak menyerah menghadapi tantangan yang menghalangi niat baiknya itu. Ketika penutupan jalan ditolak, sebagai gantinya dia mengusulkan untuk membangun terowongan untuk menghubungkan kedua tempat ibadah yang sangat populer itu. Lagi-lagi usulan ini mendapat masalah yang sangat rumit, yakni di bawah Istiqlal terdapat pipa air dan listrik ditanam di dalam tanah serta ada terowongan lain bekas zaman Belanda.

Di waktu bersamaan, Istiqlal saat itu tengah dalam masa renovasi. Nasaruddin Umar pun membawa ide membangun terowongan tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Harap-harap cemas, bisa jadi, dirasakan oleh Nasaruddin Umar, karena data di lapangan menunjukkan adanya faktor yang tidak memungkinkan dibangunnya terowongan.

Selepas menghadap Joko Widodo, wajah Nasaruddin Umar terlihat ceria dan gembira, sebab presiden yang mantan Walikota Solo itu setuju dengan idenya, yakni membangun terowongan. “Di luar dugaan, presiden menyetujui, dan dalam tempo yang singkat akhirnya — yang tadinya tidak setuju jadi setuju — karena ini akan menjadi ikon,” ujarnya seperti termuat laman di atas.

Dia mengungkapkan, rencana pembangunan terowongan ini bermula dari

idenya. “Saya kira ini tipikalnya Indonesia. Kalau kita berpandangan positif, itu jelas menggambarkan kedamaian dan toleransi,” kata Nasaruddin pada salah satu media online.

Ketika presiden setuju maka pembangunan pun dimulai. Tercatat ‘cangkulan’ pertama terowongan dimulai pada 15 Desember 2020. Terowongan ini memiliki panjang 33,8 meter, tinggi 3 meter, dan lebar 4,5 meter dengan total luas mencapai 339, 97 meter persegi. Pembangunan terowongan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp37,3 miliar.

Terkait terowongan tersebut, dalam *detik.com*, 10 Februari 2020, Nasaruddin Umar mengatakan, selama ini keberadaan

konsep terowongan silaturahmi ini bisa jadi contoh yang baik. Yakni, menjadi contoh tentang indahnya perbedaan dalam kedamaian. Dia menegaskan, tidak ada maksud untuk mencampurkan akidah.

“Sekali lagi tujuan saya mengidealkan itu, ini lanskap rumah ibadah, agar jadi contoh negara lain. Ada rumah ibadah yang satu kompleks tapi tenteram damai. Katedral itu tetangga yang baik. Kalau rumah ibadah ini bisa bertetangga baik, kita berharap masyarakat juga mencontohnya dengan menjadi tetangga yang baik. Sama sekali tidak ada maksud untuk mencampuradukkan akidah,” ujarnya seperti yang termuat di laman di atas.

Ketika Pemimpin Tertinggi Umat Katolik



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Istiqlal dan Katedral memang berdekatan, tetapi secara psikologis terpisah. Hal ini dikarenakan kedua bangunan itu dipisahkan oleh sebuah jalan besar. Maka dari itu, dirinya kemudian mencetuskan ide lanskap rumah ibadah yang satu kompleks.

“Saya pernah melontarkan gagasan lanskap rumah ibadah itu satu kompleks. Cuma ini Istiqlal dan Katedral dipisahkan oleh jalan, sehingga pesan psikologisnya itu masih terpisah. Seandainya ada terowongan itu akan semakin tampak. Ini nilai jualnya Indonesia, di luar kan tidak bisa seperti di Indonesia ini,” tuturnya. Ia berharap bahwa

Dunia, Paus Fransiskus, berkunjung ke Indonesia, 6 September 2024, salah satu lawatan yang dilakukan adalah melakukan kunjungan ke Istiqlal dan melintasi terowongan yang selanjutnya dinamakan Terowongan Silaturahmi itu. Paus yang berasal dari Argentina itu melihat terowongan yang ada didampingi oleh Nasaruddin Umar serta berbagai tokoh agama lainnya.

Di *detik.com*, 06 Sep 2024, Paus mengatakan, terowongan ini sebagai simbol memperkuat persaudaraan. “Kita kaum beriman yang berasal dari tradisi keagamaan yang berbeda-beda memiliki sebuah tugas

untuk dilakukan. Membantu semua orang melewati terowongan ini dengan pandangan yang diarahkan menuju terang. Dengan demikian, di akhir perjalanan, kita akan mampu mengenal dalam diri mereka yang berjalan di samping kita seorang saudara seorang saudari yang dengannya kita dapat berbagi kehidupan yang saling mendukung satu sama lain,” ujarnya.

Disebut di laman itu, dirinya juga memberkati terowongan yang ada. Dia berharap, terowongan tersebut menjadi berkat dan pemersatu kehidupan beragama di Indonesia. “Saya berharap komunitas kita dapat semakin terbuka bagi dialog antarumat

Santa Maria Diangkat ke Surga. Ini adalah simbol yang bermakna, yang memperkenankan dua tempat ibadah Agung tidak hanya berada berhadapan satu sama lain, tapi terhubung satu sama lain,” ujarnya.

Dalam *katolikana.com*, 5 September 2024, Paus menuturkan, Terowongan Silaturahmi dapat menjadi sarana perjumpaan apostolik dialog dan tindakan nyata untuk menggalang persaudaraan antara umat manusia lintas iman. “Saya mendorong Saudara-saudara secara bersama-sama mengembangkan spiritualitas dan mengamalkan agama masing-masing untuk dapat berkontribusi dalam

dan itu melampaui semua hal membedakan kita,” kata Paus Fransiskus.

Kedua, Paus meminta semua pihak menjaga ikatan terowongan yang dibangun dari satu sisi ke sisi lain untuk menciptakan hubungan antara dua tempat yang berbeda dan berjauhan.

Ia mengingatkan, kadang kita berpikir bahwa perjumpaan antara agama-agama adalah soal mencari titik temu antara doktrin dan pengakuan agama yang berbeda dengan segala cara. “Namun, kenyataannya pendekatan semacam itu bisa saja berakhir dengan perpecahan, karena doktrin dan dogma masing-masing pengalaman keagamaan berbeda,” katanya.

Paus yang memiliki nama asli Jorge Mario Bergoglio itu menekankan agar semua pihak mendekatkan diri satu sama lain dengan menyelaraskan perbedaan-perbedaan yang ada, meningkatkan persahabatan dan rasa saling menghargai, serta terbuka satu sama lain.

“Anda perlu berkomitmen untuk mencari kebenaran bersama dengan belajar dari tradisi agama pihak lain, bekerja sama untuk maju bersama membela martabat manusia dalam memerangi kemiskinan dan memajukan perdamaian. Semoga Anda menghayati bahwa persatuan merupakan hasil dari rasa saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain,” ucap Paus.

Terakhir Paus Fransiskus mengajak semua pihak untuk meneguhkan kerukunan umat beragama demi kemanusiaan dan bertanggung jawab menghadapi krisis serius dan terkadang dramatis yang mengancam masa depan umat manusia, khususnya perang dan konflik.

“Jangan sia-siakan anugerah yang dimiliki Indonesia, terutama kepada kaum muda semoga tidak ada seorangpun yang terjerumus dalam pesona fundamentalisme. Terima kasih atas senyum ramah Anda yang selalu terpancar di wajah. Teruslah berpegang pada semangat Bhinneka Tunggal Ika, meski berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Terima kasih,” ujar Paus mengakhiri sambutannya (*katolikana.com*). □

AWGI dari berbagai sumber

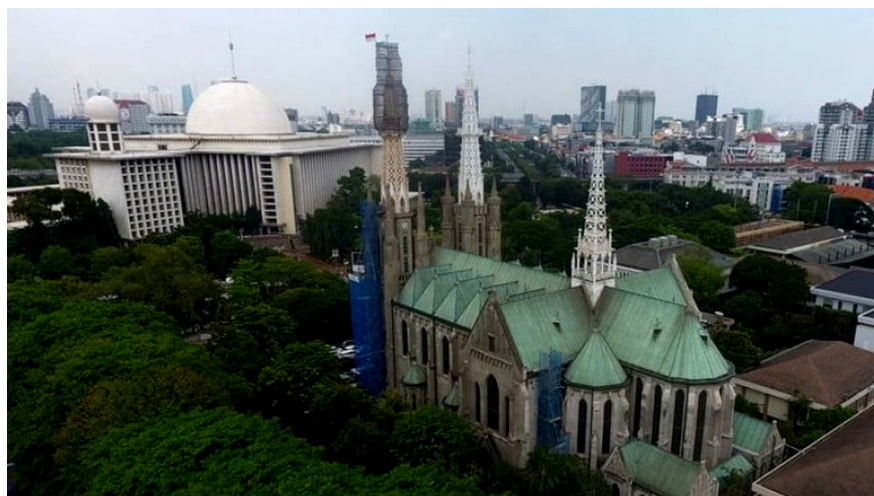


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

agama dan semoga menjadi simbol kehidupan bersama yang damai yang mencirikan Indonesia,” kata Paus Fransiskus.

Lebih lanjut dia mengatakan, “Saya berdoa kepada Allah Sang Pencipta Segala Sesuatu agar Ia memberkati semua mereka yang melewati terowongan ini dalam semangat persahabatan, kerukunan, dan persaudaraan.”

Masih dalam laman yang sama, Paus memuji terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Santa Maria Diangkat ke Surga. Dia menyebut, terowongan itu sebagai terowongan persahabatan. “Mengenai hal ini, haruslah disebut terowongan bawah tanah ‘terowongan persahabatan’ yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Katedral

pembangunan masyarakat yang terbuka yang didasarkan atas sikap saling menghargai dan mengasihi satu sama lain; mampu melindungi diri dari kekerasan hati fundamentalisme dan ekstremisme yang selalu berbahaya dan tak pernah dapat dibenarkan,” ujar Paus.

Di laman itu menyebutkan, Paus memberi dua pesan khusus, yaitu: *Pertama*, selalu melihat segala sesuatu secara mendalam, karena hanya dengan demikian kita dapat menemukan hal-hal baik yang menyatukan di balik perbedaan. “Marilah kita mengingat satu hal ini memandang secara mendalam dan memahami apa yang mengalir di dalam hati kita, dan menemukan bahwa kita semua adalah saudara, seluruh peziarah semuanya dalam perjalanan menuju Allah,



Dukungan Kuat buat Terowongan Silaturahim

Tak gampang membangun Terowongan Silaturahim. Selain adanya pipa air, saluran kuno, dan kemacetan, juga muncul sikap kontra dari masyarakat. Di tengah sikap kontra, ada dukungan yang kuat dari anggota DPR, menteri, hingga wakil presiden.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

RENCANA membangun terowongan silaturahim tidak hanya mendapat hambatan dalam hal bagaimana membedah tanah dan mengatasi kemacetan lalu lintas saat pembangunan, namun juga ada sikap kontra dari masyarakat sendiri. Hal demikian tentu menjadi dinamika tersendiri dari bagaimana tidak mudahnya membangun toleransi di tengah masyarakat.

Menanggapi soal rencana pembagunan terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereda Katedral, anggota Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, menyatakan, mendukung pembangunan terowongan itu. Alasannya, menurut politisi Partai Golkar itu adalah dapat memperkuat silaturahim antarumat di Indonesia. “Dengan adanya terowongan ini diharapkan semakin memperkuat silaturahim antarumat beragama dalam kerangka memperkuat *ukhuwah wathoniyah* (persaudaraan sebangsa),” ujarnya pada saat itu, 7 September 2020.

Dikutip dari *detik.com*, 7 Februari 2020,

alumni UIN Syarif Hidayatullah itu menuturkan, Istiqlal dan Katedral adalah ikon rumah ibadah di Indonesia. Ia menyebut letaknya yang berdekatan mencerminkan toleransi beragama di Indonesia.

“Kita tahu bahwa Istiqlal merupakan masjid terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Sementara, Katedral juga

merupakan gereja yang berada di titik Ibu Kota Jakarta. Letak kedua bangunan berdampingan dan selama ini dikenal sebagai simbol rumah ibadah yang mencerminkan kerukunan umat beragama di Indonesia”, ujarnya seperti termuat dalam laman itu.

Dalam masalah ini, Ace tidak sendiri.



Ace Hasan Syadzily



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Rekannya satu komisi asal PKB, Marwan Dasopang, juga mengatakan hal yang sama. “Terowongan penghubung Istiqlal dan Katedral itu bisa memperkuat persaudaraan,” ujarnya.

Dukungan tidak hanya dari kalangan anggota legislative, Mahfud MD yang saat itu masih menjabat Menko Polhukam, juga mendukung pembangunan terowongan tersebut. “Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Istiqlal dan Katedral merupakan simbol persatuan bangsa dan masyarakat Indonesia yang beragam,” ujarnya seperti diberitakan *antaranews.com*, 28 Januari 2022.

“Alhamdulillah, ini salah satu lambang penting untuk kita membangun kerukunan, kebersatuan dalam keberbedaan. Untuk jangka panjang, dakwah membangun Indonesia yang memiliki kebersatuan dalam keberagaman dan kebersamaan,” ujarnya.

Saat itu Mahfud sedang berada di Istiqlal dan menyempatkan diri mengunjungi terowongan yang masih dalam pembangunan. Ia ditemani oleh Nasaruddin Umar.

Orang nomer dua di Indonesia, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, juga menyatakan hal yang sama. Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Istiqlal dan Katedral, menurut Ma’ruf Amin, memberikan inspirasi

untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama, khususnya antara Islam dan Katolik,” ujarnya, *antaranews.com*, 27 Agustus 2021.

“Saya merasakan terowongan ini punya makna yang dalam. Bukan hanya sekadar lambing, tapi juga memberikan inspirasi terbangunnya kerukunan antarumat,” ujarnya saat menjajal melintasi terowongan tersebut.

Diberitakan dalam laman itu, simbol kerukunan antarumat beragama yang terpancar dari Terowongan Silaturahmi itu merupakan representasi umat Islam di Istiqlal dan umat Katolik di Katedral. Pria asal Banten itu berharap, Terowongan Silaturahmi memberikan inspirasi kepada seluruh masyarakat bahwa kerukunan antarumat beragama harus dibangun dan dipelihara. “Saya berharap, ini benar-benar memberikan inspirasi kepada kita, seluruh bangsa Indonesia bahwa kerukunan memang harus kita bangun, dan kita yakin kerukunan antarumat beragama merupakan unsur utama dari kerukunan nasional,” ujarnya.

Dari pihak Gereja Katedral dukungan datang dari Kepala Pastor Gereja Katedral Jakarta, Romo Albertus Hani Rudi Hartoko. “Terowongan Silaturahmi ini dapat memberikan semangat, terlebih presiden pertama Soekarno menetapkan Istiqlal dan Katedral berdampingan,” ujarnya seperti termuat di *wartakota.tribunnews.com*, 10 Februari 2020.

Lebih lanjut dia mengatakan: “Kami sangat mendukung wacana tersebut (pembangunan terowongan silaturahmi). Hal tersebut juga seiring telah terjadinya relasi yang amat dekat antara Istiqlal dan Katedral, terlebih dalam hal parkir,” ujarnya.

Ia berharap, keberadaan terowongan itu nantinya dapat mempererat persatuan dan toleransi antarumat beragama. “Semoga dengan adanya Terowongan Silaturahmi ini akan semakin mempererat dan merawat persaudaraan, persatuan, dan kebhinekaan serta toleransi antarumat beragama yang mendukung semangat kebangsaan,” katanya. □



Orang nomer dua di Indonesia, Wakil Presiden Ma’ruf Amin

AWGI dari berbagai sumber



Pesan Damai Tak Hanya dari Terowongan

Tokoh lintas agama di hadapan Paus Fransiskus mendeklarasikan tentang perdamaian dan kepedulian lingkungan. Deklarasi yang ada akan menjadi catatan sejarah, sebab dilakukan di depan pemimpin tertinggi umat Katolik dunia. Semua agama didorong memiliki kepedulian dan kemudian berani merawat bumi sebagai rumah bersama.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

KEHADIRAN Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal, 5 September 2024, tak sekadar melintasi dan menjadi saksi adanya Terowongan Silaturrahim, namun dia bersama Nasaruddin Umar juga aktif terlibat dalam dialog antartokoh lintas agama. Hadir dalam dialog itu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menkominfo Budi Arie Setiadi, dan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, mantan Ibu Negara Sinta Nuriyah Wahid, Yenny Wahid, mantan Menteri Agama Quraish Shihab, Uskup Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo.

Hadir pula dari berbagai tokoh agama dan keyakinan, yaitu: Engkus Kuswara mewakili penghayat kepercayaan, Budi Tanuwibowo (Konghucu), Bhante Dhammasubo (Buddha, Walubi), Philip Wijaya (Buddha, Permadubdi), Abdul Mu'ti (Islam, Muhammadiyah), Yahya

Cholil Staquf (Islam, Nahdlatul Ulama), Wisnu Bawa Tenaya (Hindu), dan Reverendus Jacky Manuputty (Kristen).

Pada momen dialog lintas tokoh agama tersebut, Paus dan Nasaruddin Umar menandatangani dokumen kemanusiaan yang dikenal sebagai *The Istiqlal Declaration 2024* atau Deklarasi Istiqlal. Penandatanganan dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Dikutip dari *kemenag.go.id*, 5 September 2024, diberitakan bahwa Deklarasi Istiqlal 2024 dibacakan di hadapan Paus dan disaksikan oleh para tokoh lintas agama. Adalah Perwakilan Conference Wali Gereja, Monsinyur Tri Harsono, dan Ismail Cawidu dari Masjid Istiqlal yang membacakan deklarasi tersebut. Mereka didampingi oleh para tokoh agama Islam, Kristen, Katolik,

Konghucu, Buddha, dan Pengantut Kepercayaan.

Deklarasi Istiqlal 2024 ini berisi tentang peneguhan kerukunan umat beragama untuk kemanusiaan, serta seruan perbaikan lingkungan dalam menghadapi krisis iklim. "Seperti yang bisa dilihat dari kejadian beberapa dekade terakhir, dunia kita jelas sedang menghadapi dua krisis serius, dehumanisasi dan perubahan iklim," ucap Tri Harsono. Menyikapi hal tersebut, lanjutnya, para pemimpin agama yang hadir menyerukan agar bertindak berdasarkan pada ajaran agama masing-masing, dan mengakui kontribusi dasar dan falsafah negara Pancasila di Indonesia. Berikut isi lengkap Deklarasi Istiqlal 2024:

Deklarasi bersama Istiqlal 2024: Meneguhkan Kerukunan Umat Beragama untuk Kemanusiaan. Seperti yang bisa dilihat

dari kejadian beberapa dekade terakhir, dunia kita jelas sedang menghadapi dua krisis serius, dehumanisasi dan perubahan iklim.

Pertama, fenomena global dehumanisasi ditandai, terutama dengan meluasnya kekerasan dan konflik, yang seringkali membawa jumlah korban yang mengkhawatirkan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah Agama seringkali diperalat dalam hal ini, sehingga mengakibatkan penderitaan bagi banyak orang, terutama perempuan anak-anak dan orang lanjut usia. Padahal, peran agama harus mencakup peningkatan dan pemeliharaan martabat setiap kehidupan manusia.

Kedua, eksploitasi manusia atas ciptaan. Rumah kita bersama, telah berkontribusi terhadap perubahan iklim yang menimbulkan berbagai konsekuensi destruktif, seperti bencana alam, pemanasan global, dan pola cuaca yang tidak dapat diprediksi.

Krisis lingkungan yang sedang berlangsung ini telah menjadi hambatan bagi kehidupan bersama yang harmonis di antara masyarakat.

Menyikapi kedua krisis tersebut sambil berpedoman pada ajaran agama masing-masing dan mengakui kontribusi dasar dan falsafah negara Pancasila di Indonesia. Kami bersama para pemimpin agama lain yang hadir menyerukan hal-hal sebagai berikut:

Satu, nilai-nilai yang dianut oleh tradisi agama-agama kita harus dimajukan secara efektif untuk mengalahkan budaya



Monsinyur Tri Harsono

kekerasan dan ketidakpedulian yang berada di dunia kita.

Sejatinya, nilai-nilai agama harus diarahkan untuk meningkatkan budaya hormat, martabat, bela rasa, rekonsiliasi, dan solidaritas persaudaraan untuk mengatasi dehumanisasi dan perusakan lingkungan.

Dua, para pemimpin agama khususnya, terinspirasi oleh narasi dan tradisi rohani masing-masing, harus bekerjasama dalam menanggapi krisis-krisis tersebut di atas mengidentifikasi penyebabnya, dan mengambil tindakan yang tepat.

Tiga, oleh karena terdapat satu keluarga umat manusia di seluruh dunia, dialog antarumat beragama harus diakui sebagai sebuah sarana yang efektif untuk

menyelesaikan konflik-konflik lokal, regional, dan internasional, terutama konflik-konflik yang dipicu oleh penyalahgunaan agama.

Selain itu, keyakinan dan ritual-ritual agama kita memiliki kapasitas khusus untuk menyentuh hati manusia, dengan demikian menumbuhkan rasa hormat yang lebih dalam terhadap martabat manusia.

Empat, menyadari bahwa lingkungan hidup yang sehat, damai dan harmonis sangat penting menjadi hamba Allah dan pemelihara ciptaan yang sejati.

Kami dengan tulus menghimbau semua orang yang berkehendak, baik untuk mengambil tindakan tegas guna menjaga keutuhan lingkungan hidup dan sumber dayanya. Karena kita telah mewarisinya dari generasi sebelumnya dan berharap untuk dapat meneruskannya kepada anak cucu kita.

Budayawan intereligi, Romo Aloysius Budi Purnomo, di *kompas.com*, 5 September 2024, mengatakan, Deklarasi Istiqlal mengandung dua poin penting untuk menjadi perhatian seluruh umat manusia. Dua poin ini adalah tentang kepedulian dan kewaspadaan seluruh umat atas terjadinya dehumanisasi dan kerusakan lingkungan hidup. "Dua hal penting diserukan dalam deklarasi tadi, yaitu kepedulian dan kewaspadaan atas terjadinya dehumanisasi dan juga kerusakan lingkungan hidup", ujarnya.

Romo Budi mengatakan bahwa deklarasi itu tidak hanya menantang umat beragama Katolik dan Islam, melainkan seluruhnya. Pasalnya, deklarasi itu mengandung poin kemanusiaan serta lingkungan hidup yang harus dijaga bersama seluruh umat. Deklarasi itu juga diteken oleh tokoh lintas agama. "Dan, ketika kita bicara tentang dehumanisasi dan kerusakan lingkungan hidup, mau tidak mau itu menantang semua, apa pun agama dan kepercayaannya untuk memiliki kepedulian dan kemudian berani merawat bumi sebagai rumah bersama dan kepedulian kepada para korban yang biasanya adalah kelompok kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel," jelasnya. □



Romo Aloysius Budi Purnomo

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

AWGI/dari berbagai sumber

Immanuel S Katili

Mahasiswa FT Metalurgi dan Material UI

Belajar Sukses dari Orang Sukses



SEBAGAI mahasiswa yang baru menjajaki bangku kuliah, saya merasa sangat berarti bisa mendapatkan pelajaran dan wawasan baru tentang tips sukses dari orang sukses itu sendiri. Seperti yang dilakukan seorang tokoh sukses, Prof. Fadel Muhammad. Beliau banyak menceritakan tentang kisah sukses.

Satu hal yang beliau tekankan adalah mahasiswa harus aktif berorganisasi, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Organisasi akan menempa jiwa leadership dan akan membuat si mahasiswa terbiasa dan bermanfaat di kemudian hari.

Beliau (Fadel) banyak memberikan gambaran bagus soal bagaimana mengatur waktu atau memanej waktu yang baik, sehingga semua kegiatan kampus dan kegiatan organisasi tidak terbengkalai. Saya setuju dengan pendapat beliau, kita sebagai mahasiswa harus mengambil kesempatan, mengatur strategi, dan dari situ kita akan menghasilkan kemampuan.

Saya pribadi sangat mengagumi dan ingin mempelajari tokoh-tokoh yang sukses dalam menjalani karirnya, dan saya ingin mempelajari bagaimana dia saat menjalani kehidupan masa mudanya, terutama saat menempuh pendidikan di bangku kuliah.

Maka dari itu, saya sangat bersyukur jika ada tokoh sekaliber Prof. Fadel Muhammad mau datang ke kampus dan menceritakan tentang tips suksesnya kepada mahasiswa. Dan, saya berharap ada banyak tokoh sukses lainnya yang mau datang ke kampus, dan membagikan kisah suksesnya kepada generasi muda. □

DER

Prof. Mahmud Subandiriyo

Plh Dekan FT UI

Tidak Ada Sekat antara Profesi Insinyur dan Wirausaha

SAYA menyambut para mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI). “Selamat datang di FTUI, tempat di mana mereka akan ditempa menjadi insinyur dan pemimpin masa depan. Di sini, Anda akan menghadapi tantangan, belajar, dan berkembang dalam lingkungan yang penuh inovasi dan integritas.

Perjalanan di FTUI bukan hanya tentang mencapai gelar, tetapi juga tentang membentuk karakter, etika, dan kontribusi bagi masyarakat. FTUI akan menjadi rumah kedua di mana mimpi-mimpi besar mulai diwujudkan.

Saya sangat setuju dengan pendapat bahwa usai kuliah jangan hanya mencari kerja, apalagi untuk mahasiswa Teknik UI. Namun, usai kuliah, mahasiswa UI dengan gelar keserjanya diharapkan bisa merambah dunia usaha, sebagai seorang usahawan atau enterpreneur.

Hubungan antara profesi insinyur dan dunia wirausaha sangat dekat dan perlu dipelajari, makanya saya sangat mengapresiasi tokoh nasional yang mau berbagi wawasan tentang kewirausahaan kepada mahasiswa, walaupun itu mahasiswa Teknik. □



DER

Sri Lastuti

Jalan Terjal Seorang Penyuluh

Pertanian Menuju Sukses



KEPINDAHAN ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke IKN tinggal menunggu waktu, sementara masih banyak masyarakat Indonesia yang belum pernah berkunjung Jakarta sebagai ibu kota negara. Sebagian dari mereka mengaku tidak berani, meski angan-angan untuk ke Jakarta telah tertanam di benak mereka. Lalu, sebagian lagi, baru sebatas mimpi, tanpa ada kepastian kapan bisa melihat Monumen Nasional (Monas) dari dekat.

Warga masyarakat Indonesia yang belum pernah ke Jakarta memang, tetapi lebih banyak lagi jumlahnya belum pernah berkunjung ke gedung MPR/DPR RI, di bilangan Senayan Jakarta. Sebenarnya, banyak anggota masyarakat yang menginginkan bisa masuk dan melihat langsung situasi gedung kura-kura, salah satu ikon kompleks Parlemen itu. Tetapi, tidak banyak pula yang memiliki keberanian, juga keberuntungan, bisa masuk ke kompleks MPR/DPR RI yang dikenal juga sebagai rumah rakyat itu.

Salah satu yang beruntung bisa masuk dengan mudah, bahkan mendapat sambutan dan pelayanan yang baik dari pihak Sekretariat Jenderal MPR adalah Sri Lastuti (58). Bu Tutik, begitu dia disapa oleh koleganya, adalah Penyuluh Pertanian Teladan dari Kecamatan Banyu Urip,

Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Ia terpilih sebagai Penyuluh Pertanian Teladan terbaik tingkat nasional untuk kategori Penerapan Teknologi Climate Smart Agriculture (CSA): Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP).

Karena terpilih sebagai Penyuluh Pertanian Teladan itulah, Bu Titik pada 16 Agustus 2024 menjadi tamu MPR, dan mendapat kesempatan untuk melihat dan merasakan langsung atmosfer prosesi Sidang Tahunan MPR tahun 2024.

“Beberapa waktu sebelumnya saya sempat bermimpi ikut merayakan hari kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Rupanya, mimpi itu adalah firasat, bahwa saya akan berkesempatan merasakan kemegahan peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Saya senang dan sangat bersyukur terpilih dan berkesempatan mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustusan di Jakarta,” ungkap Sri Lastuti kepada Majalah *Majelis* MPR RI.

Keberhasilan terpilih sebagai penyuluh pertanian teladan mengantarnya berangkat ke Jakarta, hingga menjadi tamu MPR, memang terasa manis. Tetapi, perjuangan selama puluhan tahun sebagai tenaga

penyuluh pertanian adalah pekerjaan tak ringan. Ia mengawali profesinya sebagai tenaga penyuluh pertanian honorer saat berusia 25 tahun pada tahun 1991. Pekerjaan itu ditekuninya setelah lulus program D3 Peternakan di Unsoed Purwokerto.

Meski teguh mengangkat nasib petani, pekerjaan sebagai penyuluh itu sesungguhnya tidak pernah terbersit dalam pikirannya. Pilihan itu ia ambil, karena ingin berbakti kepada ayahnya, yaitu Dalil Atmosudiro. Sang ayah menginginkan agar salah satu anaknya menjadi penyuluh. Padahal gaji tenaga penyuluh honorer terbilang sangat kecil, sebesar Rp 40.000/bulan.

Bahkan, ketika saudara-saudaranya meminta perempuan kelahiran 28 April 1966 itu untuk meninggalkan pekerjaan sebagai penyuluh pertanian ia tetap bergeming. Karena, pada situasi sulit seperti itu, Bapaknya selalu membesarkan hati Tutik agar terus bertahan menjadi penyuluh pertanian. “Bapak selalu bilang, kalau saya kekurangan uang, saya diminta pulang nanti beliau akan memberi uang untuk saya. Sejak itu, saya niatkan tetap menjadi penyuluh, sebagai bukti bakti kepada orangtua,” ungkap Tuti.

Bahkan, ketika gaji honorer dihapus pada



tahun 2000, Tutik tak lantas menyingsingkan lengan bajunya mencari pekerjaan lain. Ia istiqomah menjalankan impiannya, mencerdaskan petani meski saat itu ia tak mendapat insentif dari pemerintah.

“Melihat kenyataan itu, teman-teman di jajaran Kepala Seksi di Dinas Pertanian patungan agar bisa tetap menggaji saya. Namun saya tolak, khawatir ada yang kurang iktiklas memberi patungan. Saya memilih tetap bekerja dengan harapan suatu saat negara akan kembali menggaji dan memenuhi utangnya selama saya tidak digaji,” kata Tutik lagi.

Karena itu, Tuti berusaha menyukuri setiap nikmat yang diterima. Apalagi dalam kapasitasnya sebagai penyuluh, banyak petani yang kemudian dianggapnya sebagai keluarga sendiri. Banyak di antara mereka yang dengan senang hati memberi bantuan jika penyuluhnya menemui hambatan. Mereka juga selalu bertutur serta berperilaku dengan baik. Dan, itu yang membuat Tutik merasa nyaman dengan pekerjaannya.

Sapi, Kedelai, dan Kacang Hijau

Selain terkendala oleh faktor transportasi dan kecilnya insentif, Tutik juga kerap bermasalah dengan kisah-kisah yang melegenda di tengah masyarakat Kecamatan Banyu Urip. Salah satunya menyangkut larangan memelihara sapi. Padahal, alam di Banyu Urip sangat mendukung untuk memelihara sapi. Di sana lahannya sangat luas. Rumput dan tumbuhan hijau lainnya berlimpah. Apalagi kebutuhan daging di kawasan tersebut juga relatif tinggi. Banyak pejabat dan warga Banyu Urip yang sudah berhasil, pulang ke kampung halaman. Mereka kerap melakukan pesta sebagai ungkapan rasa syukur atas keberhasilan yang telah mereka dapatkan, dan untuk itu kebutuhan daging menjadi sangat besar.

Sayangnya, nyaris tidak ada satupun orang yang berani memelihara sapi. Semua kebutuhan daging didatangkan dari luar. Mereka enggan memelihara sapi karena meyakini, sapi tidak akan bisa hidup di

Banyu Urip.

Padahal, “Saya pernah coba agak memaksa kepala desa di sana agar mencoba memelihara sapi sendiri. Pertama dicoba memang gagal, sapinya mati. Tetapi saya tidak menyerah, saya coba lagi dan berhasil. Sejak itu banyak petani berani memelihara sapi, dan sekarang sangat banyak petani yang memelihara sapi. Bahkan, sebagian di antaranya lupa terhadap pantangan memelihara sapi yang dulu dipercaya oleh masyarakat,” ungkap istri dari Indaryanto ini.

Selain sapi, Tutik juga sempat dibuat bingung dengan kepercayaan masyarakat bahwa Banyu Urip tidak bisa ditumbuhi tanaman kedelai. Bertahun-tahun ia coba meyakinkan, hingga satu saat ada program tanam kedelai. Dengan program tersebut, sekali lagi Tutik memaksa petani untuk mau mencoba menanam kedelai, dan ternyata hasilnya sangat bagus. Sejak itu, banyak orang menanam kedelai, bahkan ada salah satu desa di Banyu Urip menjadi sentra kedelai.

Setelah berhasil dengan budidaya kedelai, Tutik tak mau berpuas diri. Ia tertantang untuk membudidayakan kacang hijau yang saat itu juga dipantang oleh masyarakat. Padahal, komoditas kacang hijau memiliki harga lebih bagus dari kedelai. Selain itu, banyak sumber air yang bisa dimanfaatkan untuk tanam kacang hijau di musim kemarau.

“Saya sampai meminjam lahan sawah yang ditelantarkan pemiliknya di saat musim kemarau untuk menanam kacang hijau. Caranya, saya ajak pemilik lahan dengan janji kalau ada hasilnya akan diberikan kepada mereka. Ternyata benar, tanaman kami tumbuh subur dan memberi hasil banyak. Sampai sekarang banyak petani menanam kacang hijau, bahkan menjadikan Banyu Urip sebagai salah satu sentra kacang hijau,” pungkasnya. □

MBO

Agar Bullying Tak Terulang di Pendidikan Kedokteran

Proses untuk menjadi dokter spesialis sepertinya tidak mudah. Selain harus bisa menerima dan mempraktikkan ilmu-ilmu kekhususan, di luar itu rupanya ada faktor lain yang menyertai. Hal itu terkuak setelah terjadi korban di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip). Terkait hal demikian, pihak Undip mengakui memang adanya bullying atau perundungan. Mengutip dari salah satu media online pada 14/9/2024, Dekan FK Undip, Yan Wisnu Prakojo, mengatakan: “Kami menyadari sepenuhnya, kami menyampaikan, dan kami mengakui bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis di internal kami terjadi praktik-praktik atau kasus-kasus perundungan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai derajat, dalam berbagai hal.” Bila sudah begini dan agar tidak terulang, lalu apa yang mesti dilakukan? Berikut pendapat wakil rakyat yang membidangi dunia kesehatan.

dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati Anggota MPR Fraksi PDIP

Adanya Budaya Rasa Senioritas

BULLYING dalam dunia kedokteran bisa terjadi karena adanya sikap senioritas atau feodalisme. Biasanya, terjadi saat *co-ass*. Dalam Uji Kompetensi Dokter Indonesia hal demikian juga terjadi. Bila mau menghilangkan bullying dalam dunia kedokteran, ya jangan lagi ada praktik-praktik uji kompetensi dokter lagi. Kalau sudah lulus fakultas kedokteran, ya sudah lulus saja.

Saya adalah salah seorang dokter yang menolak adanya uji kompetensi, karena praktik-praktik seperti itu, tak ubahnya seperti fakultas di luar fakultas. Di sana banyak penindasan, karena ada perasaan senioritas. Ada senior yang mengatakan pada juniornya, kamu belum mahir sehingga harus nunggu satu tahun lagi. Akibatnya, dokter junior tidak bisa mengambil spesialis karena dikerjain seniornya. Contohnya, kalau ada yang mau ujian saja, juniornya disuruh membelikan tiket pesawat, padahal itu tidak ada urusannya dengan dunia pendidikan kedokteran. Bullying dan segala tindakan penindasan dari senior kepada junior karena adanya sitem yang dibuat. Ada ruang yang



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dibuat agar senior bisa melakukan bullying kepada juniornya.

Standarisasi dunia kedokteran sudah dimulai ketika mahasiswa masuk fakultas kedokteran. Jangan ketika sudah lulus diberikan soal standarisasi. Dunia kedokteran di sini banyak yang ngerjain, mau ngurus Surat Tanda Registrasi (STR) di Kemenkes susahnyanya bukan main. Di sana

ada senioritas, sampai bilang, ‘permisi dok’, seperti mengiba-iba.

Menurut saya, kompetensi dokter tidak dinilai dari selebar kertas, namun karena dia sering ketemu rakyat, pasien, sehingga kompetensinya akan teruji. Junior tidak mau melapor bila ada kasus, karena bisa jadi ia takut dan praktik demikian berjenjang. Saya dulu suka melawan praktik-praktik seperti

ini. Ketika menjadi Ketua Komisi Kesehatan di rapat paripurna aku tolak praktik-praktik yang memunculkan adanya penindasan.

Jadi sistem penindasan itu yang perlu

dihilangkan bila ingin bullying dari senior ke junior tidak terjadi. Sama seperti dulu, ada OSPEK. Saat saya OSPEK di fakultas kedokteran disuruh macam-macam. Kalau

tujuannya untuk pengenalan lingkungan kampus, perlakuannya tidak harus demikian. □

AWG

Alifudin Anggota MPR Fraksi PKS

Perlunya Reformasi Pendidikan Kedokteran

PENANGANAN serius terhadap masalah perundungan di lingkungan pendidikan, terutama di lembaga-lembaga pendidikan kedokteran, semestinya menjadi tempat pengembangan profesionalisme dan integritas. Ini penting, karena perundungan hingga membawa korban sangat memprihatinkan dan menjadi duka mendalam bagi semua.

Tidak ada satupun alasan yang dapat membenarkan tindakan perundungan, apalagi di lingkungan pendidikan yang seharusnya mendukung perkembangan dan kesejahteraan mental mahasiswanya. Pentingnya mendesak pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta institusi pendidikan kedokteran, untuk segera mengambil tindakan konkret guna menyelidiki kasus perundungan dan mencegah kejadian serupa.

Perlu adanya investigasi menyeluruh untuk mengungkap fakta-fakta di balik kejadian ini, serta menegakkan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam perundungan tersebut. Hal demikian disampaikan Alifudin dalam rilis yang beredar di kalangan wartawan.

Dari kejadian ini perlunya reformasi sistem



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

pendidikan kedokteran yang kini diterapkan. Program pendidikan dokter spesialis harus dirancang tak hanya untuk mencetak tenaga medis yang kompeten, tetapi juga memastikan bahwa lingkungan pendidikannya mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan mahasiswanya. Tidak hanya fokus pada kualitas akademik dan keterampilan klinis, namun juga harus memastikan bahwa para calon dokter mendapatkan lingkungan yang aman, mendukung, dan bebas dari intimidasi.

Selain itu, perlu dan pentingnya peningkatan kesadaran dan upaya pencegahan terhadap perundungan di semua tingkat

pendidikan. Perundungan adalah masalah serius yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik seseorang. Ini tidak boleh dianggap remeh dan harus ditangani dengan langkah-langkah preventif yang efektif.

Pemerintah harus segera memperkuat regulasi dan kebijakan yang melindungi mahasiswa dari tindakan perundungan. Komisi IX DPR akan terus mengawal isu ini dan memastikan bahwa upaya pencegahan perundungan serta dukungan kesehatan mental di lingkungan pendidikan mendapat perhatian serius dari pemerintah. □

AWG

Silaturahmi Kebangsaan

Pimpinan MPR dengan Keluarga Besar Presiden RI ke-2 Soeharto (Alm)

Pimpinan MPR tetapkan, penyebutan nama Presiden RI ke-2 Soeharto dalam pasal 4 Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 telah dilaksanakan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo menegaskan, di dalam Sidang Paripurna MPR RI Akhir Masa Jabatan 2019-2024, pimpinan MPR RI menyatakan, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, khususnya pada ketentuan pasal 4 yang secara eksplisit menyebutkan nama mantan Presiden Soeharto dinyatakan sudah dilaksanakan, tanpa mencabut Ketetapan MPR tersebut maupun mengurangi makna yang termaktub secara umum dalam pasal 4 Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tersebut. Karena, MPR pasca amandemen keempat tidak lagi memiliki kewenangan membuat atau mencabut TAP.

"Pimpinan MPR bersepakat terkait dengan penyebutan nama mantan Presiden Soeharto dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, secara diri pribadi Bapak Haji Muhammad Soeharto dinyatakan telah selesai dilaksanakan. Hal ini juga tercermin dari adanya pandangan akhir fraksi dan kelompok DPD RI, serta telah disampaikan di dalam Sidang Paripurna MPR RI Akhir Masa Jabatan 2019-2024 pada tanggal 25 September 2024," ujar Bamsuet dalam Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR dengan Keluarga Besar (alm) Presiden RI ke-2 Soeharto di Gedung Parlemen Jakarta, Sabtu (28/9/24).

Hadir antara lain Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, dan Fadel Muhammad, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Idris Laena, Siti Hardiyanti Hastuti, Siti Hediati Hariyadi, Menkumham Supratman Andi Agtas, Sekjen Partai Golkar Sarmuji, Waketum Partai Golkar Adies Kadir, Muhammad Hatta, serta Theo L. Sambuaga.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sebelumnya pimpinan MPR telah menerima surat dari Fraksi Partai Golkar MPR, Nomor PP.022/FPG/

MPRRI/IX/2024. Pada prinsipnya, Fraksi Partai Golkar MPR menyampaikan bahwa Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, khususnya pada ketentuan Pasal 4 yang secara eksplisit menyebutkan nama mantan Presiden Soeharto, agar dinyatakan sudah dilaksanakan.

Merujuk pada Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dikelompokkan ke dalam kategori Ketetapan MPR yang dinyatakan, “tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang”.

“Selanjutnya pada pasal 4 angka 2 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, keberlakuannya dipertegas dengan rumusan “sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut”. Artinya, pemberlakuan ketentuan pasal 4 Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 yang secara eksplisit menyebutkan nama mantan Presiden Soeharto, tolok ukur pemberlakuannya adalah implementasi dari ketentuan pada pasal 4 tersebut,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini menguraikan, dari serangkaian fakta hukum yang mengemuka, pada akhirnya bermuara pada hadirnya kepastian hukum bagi mantan Presiden Soeharto. Antara lain dengan terbitnya Surat Ketetapan Perintah Penghentian Penuntutan (SKP3) pada tahun 2006 oleh Kejaksaan Agung, sesuai ketentuan pasal 140 ayat (1) KUHAP, dan terbitnya Keputusan Mahkamah Agung nomor 140 PK/Pdt/2015, serta dengan telah berpulangannya mantan Presiden Suharto pada tanggal 27 Januari 2008.

“Dengan mempertimbangkan berbagai fakta hukum di atas, penyebutan nama mantan Presiden Soeharto dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dinyatakan telah selesai dilaksanakan. Pimpinan MPR juga berpandangan sebagai sebuah bangsa yang besar, kita mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan setiap permasalahan bangsa dengan penuh kearifan dan melihat jauh ke depan, demi kepentingan anak cucu kita di masa yang akan datang. Jangan ada lagi dendam sejarah yang diwariskan pada anak-anak bangsa yang tidak pernah tahu, apalagi terlibat pada berbagai peristiwa kelam di masa lalu,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menambahkan, Presiden RI ke-2 Soeharto merupakan salah satu putera terbaik bangsa yang harus dihormati jasanya. Soeharto telah berusaha mengabdikan diri sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas sebagai presiden, dan berjasa besar dalam menghantarkan bangsa Indonesia beranjak dari negara miskin menjadi negara berkembang.

Sejarah mencatat, tahun 1960-an adalah salah satu periode tersulit yang kita hadapi sebagai sebuah bangsa. Tahun 1963, pertumbuhan ekonomi Indonesia berkontraksi minus 2,25%. Tahun 1966 inflasi melonjak

hingga 635,3%, dan tahun 1967 Indonesia adalah negara miskin dengan catatan hutang sebesar USD 700 juta. Namun, beratnya tantangan kebangsaan tersebut tidak menyurutkan langkah Soeharto.

Dengan dibantu tim pakar ekonominya, salah satunya Soemitro Djojohadikoesoemo (ayahanda Presiden terpilih Prabowo Subianto), berhasil membalikkan keadaan. Tahun 1969, atau setahun setelah menjabat Presiden, pertumbuhan ekonomi melonjak tajam menjadi 12%, dan inflasi berhasil ditekan pada kisaran 9,9%. Tidak hanya itu, tahun 1976, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang sukses meluncurkan satelit, dan tahun 1984 Indonesia sukses swasembada pangan.

“Dengan memperhatikan besarnya jasa dan pengabdian mantan Presiden Soeharto yang telah memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade, serta dengan adanya surat Pimpinan MPR yang menegaskan mengenai telah dilaksanakannya ketentuan pasal 4 Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, maka rasanya tidak berlebihan sekiranya mantan Presiden Soeharto dipertimbangkan oleh pemerintah yang akan datang untuk mendapatkan anugerah gelar Pahlawan Nasional. Selaras dengan martabat kemanusiaan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” pungkas Bamsoet. □

Silaturahmi Kebangsaan

Pimpinan MPR bersama Keluarga Besar Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid

Pimpinan MPR tegaskan TAP MPR Nomor II/MPR/2001 sudah tidak berlaku, Bamsoet desak agar nama baik Gus Dur segera dipulihkan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo menegaskan, TAP MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid, kedudukan hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Karenanya, seluruh implikasi hukum yang terkait menjadi gugur dengan sendirinya. Penegasan ini tercermin dari pandangan akhir fraksi MPR dan kelompok DPD RI, serta telah disampaikan di dalam Sidang Paripurna MPR RI Akhir Masa Jabatan 2019-2024 pada tanggal 25 September 2024.

“Sebelumnya, pimpinan MPR telah menerima surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR Nomor 082/FPKBMPR/09/2024, yang substansinya adalah mengusulkan pengkajian kembali pasal 1 TAP MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid. Dengan tindakan administratif sebagai penegasan bahwa TAP MPR Nomor II/MPR/2001 tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi, dalam kerangka pemulihan nama baik Presiden RI ke-4, K.H. Abdurrahman Wahid,” ujar Bamsoet dalam Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR bersama Keluarga Besar Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid di Gedung Parlemen

Jakarta, Ahad (29/9/24).

Hadir antara lain Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid dan Fadel Muhammad, Ketua Fraksi PPP MPR RI Arwani Thomafi, Rocky Gerung, Franz Magnis Suseno, Jimly Asshiddiqie, serta Mohammad Mahfud MD. Sementara keluarga besar Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid hadir Shinta Nuriyah Wahid, Alissa Qotrunnada Munawaroh, Zannuba Ariffah Chafsoh, Anita Hayatunnufus, serta Inayah Wulandari.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, merujuk pada ketentuan pasal 6 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, bahwa TAP MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid, adalah TAP MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Baik karena bersifat





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

“Dengan demikian, Pimpinan MPR melalui surat kepada Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR menegaskan bahwa TAP MPR Nomor II/MPR/2001, saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi. Dokumen tembusan surat juga diberikan kepada Keluarga besar mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden RI Joko Widodo serta kepada

Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui Kementerian Hukum dan HAM,” kata Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini memaparkan, dalam usianya yang ke-79 tahun, Indonesia memiliki tujuh presiden yang mendapatkan julukan berdasarkan pada pencapaian masing-masing. Presiden Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator, Presiden

Soeharto Bapak Pembangunan, Presiden Habibie Bapak Teknologi, Presiden Megawati Ibu Penegak Konstitusi, Presiden SBY Bapak Perdamaian, dan Presiden Jokowi Bapak Infrastruktur. Sedangkan Gus Dur adalah Bapak Pluralisme.

Keberpihakan Gus Dur pada pluralisme tidak terlepas dari komitmen kuatnya untuk menegakkan supremasi demokrasi yang berbasis pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Bagi Gus Dur, memajukan demokrasi haruslah dalam satu tarikan nafas dengan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan perjuangan untuk mewujudkan rasa keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

“Begitu besar jasa-jasa Gus Dur dalam memperjuangkan nilai-nilai toleransi, demokrasi, dan keadilan sosial. Karena itu, rasanya tidak berlebihan sekiranya mantan Presiden Abdurrahman Wahid dipertimbangkan oleh pemerintah mendatang untuk mendapatkan anugerah gelar Pahlawan Nasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta selaras dengan martabat kemanusiaan, jasa-jasa, dan pengabdianya pada bangsa dan negara,” pungkas Bamsuet. □





Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad

Wakil Ketua MPR RI

Kepala Daerah Harus Memiliki Jiwa Kewirausahaan

Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan pada November 2024 akan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di sebanyak 37 provinsi (di luar DI Yogyakarta yang tidak melakukan Pilkada langsung) dan 508 kabupaten/kota.

SEJAUH ini konsentrasi publik menyangkut kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah banyak yang hanya fokus pada sisi elektabilitas para kandidat. Bahkan, partai-partai pun cenderung “memburu” kandidat yang memiliki faktor elektabilitas tinggi, kendati mereka bukan kader partai bersangkutan. Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan, yakni kandidat pemimpin daerah itu haruslah visioner dan memiliki kompetensi untuk menjawab tantangan daerah yang makin sulit pada masa kini dan masa mendatang. Di antara kompetensi yang diharapkan adalah kandidat yang memiliki jiwa yang kuat dan berani untuk melakukan perubahan, sekaligus memperjuangkan demokrasi.

Collaborative Governance

Pilkada langsung di Indonesia sudah dilakukan beberapa kali. Namun, hinggakini, secara kumulatif, rapor kepala daerah di Indonesia masih terbilang sedang-sedang saja. Ketergantungan pemerintah daerah pada kucuran dana dari pusat melalui dana transfer ke daerah (TKD) masih sangat tinggi.

Hanya ada sedikit kepala daerah yang berprestasi baik dalam memajukan daerah dan menyejahterakan masyarakatnya. Tentu ini hal yang mengkhawatirkan dan perlu terus dicarikan solusinya.

Salah satu faktornya adalah sulitnya mencari kepala daerah yang kreatif mengembangkan potensi daerahnya di mana saat ini sumber daya alam (SDA) makin berkurang, sedangkan penduduk bertambah, dan tantangan sosial-politik makin tinggi. Memang

ada sejumlah daerah, terutama di Indonesia Timur, yang potensi SDA-nya belum tergali secara optimal. Semua itu membutuhkan pemimpin daerah yang memiliki jiwa *entrepreneurship* yang kuat sekaligus mampu menegakkan demokrasi.

Kita memahami bahwa dasar desentralisasi di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. UU itu menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bila dicermati, konsiderans tersebut mengandung gagasan terjadinya kolaborasi antar-pemangku kepentingan dan dorongan agar kepala daerah mengerahkan kompetensi dan jiwa *entrepreneurship*-nya. Bisa dikatakan bahwa UU tersebut mendorong terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempraktikkan “*Collaborative Governance*” yang berjiwa *entrepreneurship*.

Collaborative Governance adalah paradigma dalam administrasi publik yang makin sering digaungkan akhir-akhir ini, tetapi masih membutuhkan dukungan semua pihak untuk mempraktikkannya. Kenapa *Collaborative Governance* atau pemerintahan yang kolaboratif ini perlu dukungan untuk dipraktikkan? Tentu alasan utamanya karena tantangan pemerintahan (khususnya pemerintah daerah) makin sulit. Namun di sisi lain, peluang untuk melakukan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan makin terbuka dengan infrastruktur dan teknologi yang makin mumpuni.

Kita menyaksikan peran serta masyarakat dalam mengkritisi pemerintahnya makin mudah dilakukan belakangan ini berkat penetrasi internet di Indonesia

yang makin baik. Masyarakat kian bisa memberikan berbagai kritik yang konstruktif. Kritik itu kemudian berkembang menjadi perdebatan publik yang panas. Beberapa di antaranya bahkan menimbulkan pro-kontra dan kegaduhan yang mengkhawatirkan. Namun, pada akhirnya hal itu membuka peluang diskusi panjang antar-pemangku kepentingan, termasuk melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat yang tidak terwakili dalam legislatif.

Tahap berikutnya, kritik itu bisa menghasilkan koreksi bagi pemerintah setempat untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Jika hal ini dilakukan mulai dari tahap perencanaan, selain menghasilkan kebijakan yang diterima semua (atau mayoritas) pihak, potensi kegaduhan bisa dihindari. Hal ini bisa dicapai asal ada forum kolaborasi antara pemerintah (pemerintah daerah), legislatif, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, dan unsur lainnya dalam pembahasan suatu kebijakan.

Konsep pemerintahan yang kolaboratif diyakini banyak ahli akan mampu meningkatkan performa pemerintah daerah yang secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan sesuai tuntutan UU Pemda. Kolaborasi dilakukan oleh semua pemangku kepentingan di daerah, yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui interaksi formal dan informal dalam forum-forum tertentu.

Bentuk kerja sama pemerintah daerah dengan pihak-pihak itu sesungguhnya sudah lama dipraktikkan, namun selama ini sifatnya lebih banyak koordinatif. Koordinatif berbeda dengan kolaboratif. Koordinatif sifatnya ada koordinasi dari semua pihak yang berkepentingan tanpa menghiraukan apakah kepentingan masing-masing terpenuhi. Sehingga, kadang ada pihak yang merasa kecewa karena ditinggal sedemikian rupa. Sedangkan kolaboratif menekankan pada memenuhi kepentingan semua pihak yang prosesnya dilakukan lewat diskusi-diskusi untuk mencapai keputusan bersama.

Entrepreneurship

Satu hal lainnya adalah kepala daerah harus memiliki jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang baik. Secara sederhana kewirausahaan dalam dunia usaha adalah kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan, mengelola, dan menjalankan suatu usaha dalam mencapai keuntungan. Jika kewirausahaan dipraktikkan dalam

pemerintahan, maka maknanya adalah kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan, mengelola, dan menjalankan pemerintahan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, pengelolaan APBD harus menjadi modal (*capital*) yang digunakan secara efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan daerah tersebut.

Salah satu hal yang menuntut jiwa kewirausahaan dalam pemerintahan daerah adalah kondisi SDA yang makin terbatas. Dengan SDA yang terbatas, pemerintah daerah harus mengoptimalkan segala sumber daya dengan kreativitas dan inovasi sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing.

Hal lainnya, hubungan pemerintah daerah dan masyarakatnya harus semakin intens seiring dengan perkembangan infrastruktur komunikasi. Jika hubungan ini tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan friksi berkepanjangan yang bisa berakibat fatal pada pembangunan daerah. Dalam hal ini, dengan jiwa kewirausahaan, kepala daerah akan menempatkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakatnya sebagai prioritas utama sehingga friksi tidak terjadi, minimal bisa dikikis. Pemerintah setempat harus mau mendengar keluhan masyarakatnya dan berusaha memenuhiuntutannya.

Jadi, layaknya pengusaha yang menempatkan hubungan perusahaan dan konsumennya (kliennya) sebagai credo utama, yang pada akhirnya bisa menciptakan keuntungan bagi kedua belah pihak. Hal ini juga bisa dilakukan dalam pola pemerintahan yang kolaboratif, baik di dalam suatu pemerintahan daerah maupun antar-pemerintahan daerah.

Konsep pemerintahan kolaboratif yang berjiwa kewirausahaan memungkinkan dilakukannya reformasi radikal untuk menginjeksikan persaingan dan kontrol demokratis ke dalam organisasi publik. Meningkatnya kontrol demokrasi ini memungkinkan organisasi pemerintahan menjadi lebih inovatif dan inisiatif.

Pemerintahan daerah akan lebih berdaya saing dan inovatif dengan struktur organisasi pemerintahan yang fleksibel (*agile*), efektif, efisien, dan relevan, serta terbangunnya komunikasi dan kolaborasi tim kerja dan organisasi yang lebih baik. Hal ini juga akan berdampak pada proses pengambilan keputusan yang lebih cepat (yang selama ini menjadi kendala dalam penyelenggaraan layanan publik) dan pemerintahan yang lebih produktif. □

Delegasi Pimpinan IMM Jakarta Selatan

HNW Kalaborasi Partai dan Ormas Penting Demi Kebaikan Bangsa dan Negara



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, Lc., MA., yang juga anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dapil Jakarta 2, meliputi Jakarta Pusat dan Selatan, mengakui banyak menerima tamu dari berbagai kelompok masyarakat. Tetapi, sebagian tamu yang datang kepadanya adalah pengurus Ormas Keagamaan, khususnya Islam, dan ormas kemahasiswaan seperti Majelis Ormas Islam, Muhammadiyah beserta ortomnya, termasuk Pemuda Muhammadiyah, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

“Saya dekat dan kerap berkomunikasi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya diamanahkan sebagai dosen Program S3 di UMJ. Sekarang saya juga diminta menjadi penasihat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Selatan. Jadi, seperti burung yang selalu bersahabat dengan sejenisnya, manusiapun cenderung mencari teman sesamanya,” ungkap HNW.

Pernyataan itu disampaikan HNW— begitu Hidayat Nur Wahid biasa disapa — saat menerima delegasi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jakarta Selatan, di Ruang Kerja Pimpinan MPR Gedung Nusantara III, Komplek MPR/DPR RI Senayan, Jakarta (9/9/2024).

Kehadiran delegasi dipimpin oleh Ketua PC IMM Jakarta Selatan, Imaduddin, bersama delapan orang anggota pimpinan PC IMM Jakarta Selatan itu dengan tujuan melakukan audiensi, dan sekaligus mengundang HNW, selaku Wakil Ketua MPR RI, untuk memberikan

materi pengkaderan IMM Cabang Jakarta Selatan yang rencananya diselenggarakan 10-13 Oktober 2024.

Menurut Imaduddin, IMM Cabang Jakarta Selatan menganggap HNW cocok menyampaikan materi seputar pengkaderan, karena PKS merupakan partai kader. Mereka berharap, ada pengalaman yang diperoleh HNW selama mengurus PKS bisa ditularkan kepada anggota IMM.

Menjawab harapan tamunya, HNW mengatakan, sesungguhnya pola pengkaderan antara organisasi politik Islam dengan ormas keislaman tidaklah sama. Tetapi, ada beberapa bagian yang saling berhimpitan dan memiliki kesamaan. Antara lain karena memiliki kesamaan agama, yaitu Islam, rujukan kitab sucinya sama yaitu Alqur’an, dan Rasul serta nabinya juga sama, yaitu Muhammad SAW. Perjuangan kita juga sama untuk Umat dan Bangsa Indonesia di NKRI.

“Maka semestinya berbagai kesamaan itu membuat kita bisa saling bekerjasama. Misalnya, saat pelaksanaan pemilu, ormas Islam bisa mendukung serta memilih para calon dari partai berbasis Islam. Sebaliknya, di luar masa pemilu, partai berideologi Islam mendukung serta memperjuangkan aspirasi ormas-ormas Islam. Sebab semakin banyak jumlah anggota DPR berasal dari partai berideologi Islam maka akan semakin besar pula pengaruh dan dampak positif yang akan dirasakan dan didapatkan oleh ormas-ormas Islam,” kata HNW. Rasa saling membantu dan menguntungkan, kata HNW, selalu



mewarnai perjalanan PKS dengan ormas-ormas Islam di Indonesia. Pengalaman tersebut salah satunya terjadi pada 2012. Saat itu pemerintah akan memberlakukan kembali kepada seluruh ormas untuk hanya memakai asas tunggal, yaitu Pancasila, termasuk Muhammadiyah beserta ortomnya. Sehingga asas Islam tidak diperbolehkan lagi untuk dipergunakan. Kebijakan itu nyaris diberlakukan, karena di lembaga legislatif hampir seluruh fraksi setuju, kecuali PKS.

"Kalau mengikuti mekanisme voting PKS kalah, karena kami hanya sendirian. Tetapi,

alhamdulillah mereka tidak memaksakan voting. Keputusan diambil dalam perdebatan dan permusyawaratan. Kami sampaikan, di Indonesia eksekutif dan legislatif itu keduanya diurus parpol. Presiden dicalonkan partai, demikian pula anggota DPR yang mengajukan adalah parpol. Kalau yang penting-penting saja diurus oleh parpol dan parpol tidak wajib berasaskan Pancasila, mengapa ormas malah tidak boleh memiliki ciri, ideologinya sendiri. Seperti Islam pasti tidak bertentangan dengan Pancasila, tapi mengapa malah harus diseragamkan dengan

asas tunggal? Berkat argumentasi yang diajukan PKS diterima oleh fraksi-fraksi lain maka pemerintah urung menetapkan asas tunggal bagi ormas, dan selamatlah Islam sebagai asas Ormas Muhammadiyah dan ortomnya sampai sekarang," ungkap HNW.

Sejak itu, menurut HNW, semakin banyak produk legislatif, khususnya hasil perjuangan partai berideologi Islam, yang bermanfaat bagi umat Islam pada umumnya, dan ormas Islam pada khususnya. Termasuk hadirnya UU Pondok Pesantren. Karena UU tentang Ponpes memberi kesempatan bagi santri untuk belajar ke jenjang manapun yang lebih tinggi, termasuk melanjutkan pendidikannya di universitas umum di berbagai jurusan. Maka kolaborasi positif antara Orpol dan Ormas, termasuk Ormas Mahasiswa, bila dilakukan dengan saling menghormati dan memperjuangkan, dan tidak saling menegasikan dan menihilkan, maka ujung-ujungnya hanya demokrasi dan umat bangsa serta negara yang diuntungkan," pungkas HNW. □

Terima Pengurus Relawan Siaga

Bamsoet Dorong Peran Aktif Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI ke-16, Bambang Soesatyo, mengapresiasi kiprah Relawan Siaga yang sigap memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Berdiri sejak tahun 2019, Relawan Siaga telah banyak hadir membantu masyarakat yang dilanda bencana dan musibah di beberapa wilayah di Indonesia. Mulai dari bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19, korban kebakaran, korban banjir bandang, korban gempa, korban angin puting beliung, korban erupsi gunung Semeru, hingga membantu penanganan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182.

“Relawan Siaga merupakan sebuah perkumpulan yang didirikan di Jakarta pada 10 November 2019. Bertujuan membantu masyarakat dalam menanggulangi bencana, menangani kondisi kedaruratan, dan mengatasi kesulitan hidup sehari-hari lainnya yang terjadi di wilayahnya secara sukarela,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus Relawan Siaga di Jakarta, Sabtu (7/9/24).

Pengurus Relawan Siaga, hadir Ketua Dewan Pengawas yang juga Menparekraf Sandianga Uno dan Sekjen HMBC Rikrik

Rizkiyana.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, secara geografis, Indonesia berada di kawasan ‘Cincin Api’ (ring of fire) Pasifik, tempat pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Kondisi ini menyebabkan tingginya potensi bencana

seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami.

“Selain itu, kondisi geologis, hidrologis serta demografis yang dimiliki Indonesia juga memungkinkan terjadinya bencana. Baik yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan ataupun kerugian harta benda,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan



Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini memaparkan, konstitusi telah mengamankan bahwa negara wajib melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk melindungi dari ancaman bencana.

Dengan menyadari tingginya potensi

bencana alam yang ada dan untuk mengimplementasikan amanat konstitusi tersebut, negara membutuhkan dukungan. Artinya, jelas Bamsuet, tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana bukan hanya dibebankan kepada pemerintah. Tetapi juga membutuhkan peran serta dan kontribusi dari segenap elemen bangsa.

“Di samping itu, upaya penanggulangan bencana harus menjadi sebuah langkah yang terintegrasi, dan mencakup berbagai dimensi. Di sinilah keberadaan penting Relawan Siaga sebagai salah satu bentuk nyata dari peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana,” pungkask Bamsuet. □

Sosialisasi Alumni Lintas Angkatan SMP Negeri 49 Jakarta

Bamsuet Ajak Elit Politik Implementasikan Pancasila Dalam politik Kebangsaan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI ke-16, Bambang Soesatyo, mengungkapkan, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari sekitar 545 daerah (37 provinsi dan 508 kabupaten/kota) yang mengikuti Pilkada Serentak 2024, sebanyak 41 daerah di antaranya hanya memiliki satu pasangan calon dan akan berhadapan dengan kotak kosong. Ke-41 daerah itu terdiri dari: 1 provinsi, yakni Papua Barat dan 40 kabupaten/kota, antara lain Aceh Utara, Bintang, Ciamis, Banyumas, Sukoharjo, Brebes, Ngawi, Gresik, Surabaya.

Tren calon tunggal dalam Pilkada terus meningkat setiap tahunnya. Pada Pilkada 2015 ada 3 daerah yang memiliki calon

tunggal, Pilkada 2017 sebanyak 9 daerah, Pilkada 2018 sebanyak 16 daerah, dan Pilkada 2020 sebanyak 20 daerah. Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah pun tidak mampu membendung partai politik yang di beberapa daerah hanya mencalonkan calon tunggal.

“Ada banyak faktor penyebabnya. Misalnya, karena figur calon di daerah sudah terlalu kuat, sehingga tidak ada yang mau melawannya. Bahkan calon perseorangan pun juga tidak mau maju melawan,” ujar Bamsuet dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Alumni Lintas Angkatan SMP Negeri 49 Jakarta, di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI Senayan, Jakarta, Senin

(9/9/2024).

Hadir para alumni, antara lain: Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Prof. Harkristuti Harkrisnowo; Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama, Kelembagaan, Inovasi, dan Teknologi Universitas Pertahanan RI, Mayjen TNI Susilo Adi Purwanto; Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam RI, Irjen Pol. Andry Wibowo; Ketua KPU Periode 2021-2022, Ilham Saputra; Kepala SMP Negeri 49 Jakarta, Abdul Basri; dan Ketua Komite SMP Negeri 49 Jakarta, Kismono.

Meningkatnya tren calon tunggal, lanjut Bamsuet, mengindikasikan bahwa ada banyak hal yang perlu dibenahi dalam penyelenggaraan Pilkada. Mulai dari politik berbiaya tinggi yang membuat anak bangsa tidak mampu maju dalam kontestasi Pilkada, hingga manajemen rekrutmen partai politik yang perlu ditingkatkan agar dapat menghasilkan lebih banyak lagi kader berkualitas yang dapat menjadi calon pemimpin di tingkat daerah.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini mengingatkan, persaingan dan tensi politik di Pilkada Serentak bisa jadi tidak kalah sengit dibandingkan Pileg dan Pilpres. Karena itu, seluruh elemen bangsa harus kembali mawas diri. Kesuksesan Pemilu 2024 harus dijadikan pegangan agar Pilkada Serentak yang tinggal beberapa bulan lagi, tidak menorehkan luka perpecahan di masing-masing daerah.

“Para pemimpin di daerah harus meniru



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

pemimpin di pusat sebagaimana yang sudah dicontohkan Prabowo - Gibran, Anies - Muhaimin, dan Ganjar-Mahfud, bahwa ada kalanya kita bertanding ada kalanya kita bersanding. Politik sekadarnya, persaudaraan kebangsaan selamanya. Mari jaga dan amalkan salah satu sila Pancasila, Persatuan Indonesia. Mari sambut Pilkada dengan sukacita, jangan jadikan Pilkada sebagai sumber dukacita,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, pengimplementasian Pancasila dalam politik kebangsaan oleh para elite politik sangat penting. Mengingat akhir-akhir ini, nilai-nilai Pancasila mulai sering dipertanyakan manifestasinya, dijauhkan dari jangkauan diskursus publik,

dan bahkan dikesampingkan sebagai rujukan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Pada tahun 2018, survei LSI mencatat bahwa dalam kurun waktu 13 tahun, dari tahun 2005 hingga 2018, masyarakat yang menyatakan pro terhadap Pancasila telah mengalami penurunan yang cukup signifikan (sekitar 10%), dari 85,2% pada tahun 2005 menjadi 75,3% pada tahun 2018.

Lalu, “Survei CSIS menyebutkan bahwa sekitar 10% generasi milenial setuju mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Dari survei Komunitas Pancasila Muda pada tahun 2020 diketahui bahwa hanya 61% responden yang merasa yakin dan setuju bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dan relevan dengan kehidupan

mereka. Sementara 19,5% di antaranya menganggap Pancasila hanya sekedar istilah yang tidak benar-benar dipahami maknanya,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPP/Kepala Badan Bela Negara FKPP ini menambahkan, tahun 2021, survei yang dilakukan MEDIAN mencatat bahwa sebanyak 49% responden berpandangan Pancasila belum dilaksanakan dengan baik dan benar. Survei SMRC tahun 2022 mencatat bahwa komitmen publik terhadap nilai-nilai Pancasila, dan bagaimana nilai-nilai Pancasila direalisasikan dalam kehidupan berbangsa, masih diklasifikasikan dalam kategori ‘sedang’.

Selanjutnya tahun 2023, hasil survei Setara Institute dan Forum on Indonesian Development (INFID) juga mencatat bahwa 83,3% siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) menganggap bahwa Pancasila bukanlah ideologi permanen, dan oleh karenanya bisa diganti.

“Berbagai temuan hasil survei di atas mengisyaratkan pesan penting bagi kita untuk mereview kembali cara kita memaknai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita perlu membangun paradigma baru untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek dan dimensinya. Eksistensi Pancasila harus dapat dirasakan kehadirannya dalam setiap ruang dan relung publik diimplementasikan secara nyata, dan diaktualisasikan dalam berbagai realitas sosial, politik, dan ekonomi,” pungkas Bamsoet. □



Empat Pilar di Teras Tangsel

HNW: Generasi Milenial Penting Mempersiapkan Diri Menyongsong Indonesia Emas



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR, Dr. Hidayat Nur Wahid, Lc., MA., mengatakan, menyambut Indonesia Emas, ditandai peringatan 100 tahun Indonesia Merdeka, maka generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha, semenjak tahun 2024 ini agar mempersiapkan diri menghadapi bonus demografi dan momentum Indonesia Emas tahun 2045. Termasuk mempersiapkan bagaimana agar generasi milenial dan generasi Z memaknai, memahami, dan mengamalkan Pancasila.

“Sebagaimana persiapan dilakukan pemuda Indonesia pada tahun 1924, kemudian mereka hadirkan Sumpah Pemuda tahun 1928, yang sangat penting untuk kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Maka sekarang kita berada di tahun 2024, generasi milenial dan generasi Z, generasi

Alpha, agar mempersiapkan diri untuk Indonesia Emas Tahun 2045,” kata Hidayat Nur Wahid dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR di Teras Tangsel, Tangerang Selatan, pada 6 September 2024, yang diselenggarakan MPR RI bekerjasama dengan Yayasan Sahabat Tangsel.

Dalam sosialisasi Empat Pilar MPR itu, seorang peserta bertanya tentang bagaimana generasi milenial atau generasi Z memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menjawab pertanyaan itu, HNW mengatakan, generasi milenial atau generasi Z penting memaknai, memahami, dan mengamalkan Pancasila juga untuk kepentingan mereka dan generasi mereka sendiri, sebagai persiapan menghadapi bonus demografi dan Indonesia Emas 2045. Saat ini, generasi milenial

atau generasi Z seolah-olah di-framing sebagai generasi yang malas, tidak peduli dengan proses, inginnya instan, individualistik, dan tidak menyukai sejarah.

“Apakah memang generasi milenial atau generasi Z seperti itu? Saya tidak yakin. Saya curiga framing itu diciptakan agar program penjahajahan gaya baru bisa berhasil ketika kita dan para generasi yang disebutkan mengamini dan membebek saja, dan tidak mengkritisnya seolah-olah pasti seperti itulah generasi milenial, generasi Z, dan lainnya, padahal tidak. Apalagi kalau dirujuk pada ajaran Agama yang sangat diakomodasi dalam sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945,” ujarnya.

Menurut HNW, framing terhadap generasi milenial atau generasi Z seperti itu sebenarnya bertentangan dengan Islam.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Karena ajaran Islam tidak mengenal pemisahan generasi Z, generasi milenial, apalagi dengan framing negatif sehingga dikatakan mereka sebagai generasi malas, tidak menghargai proses, tidak suka dengan sejarah.

Kalau framing itu dibiarkan, lanjut HNW, maka akan hilang sejarah perjuangan Rasulullah, para sahabat Nabi, juga sejarah perjuangan para pahlawan bangsa mengusir penjajah dan menghadirkan Indonesia merdeka yang kini juga dinikmati generasi milenial. "Kalau generasi milenial atau generasi Z tidak mempelajari sejarah, maka nantinya sangat mudah dijajah oleh siapapun

yang akan kembali menjajah Indonesia dalam berbagai bentuk penjajahan terbarunya," tutur Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS ini.

"(Framing) Ini adalah perang pemikiran, upaya mendangkalkan akidah, semangat juang, budaya dan akar sejarah dari anak-anak bangsa. Ini penting bagi para guru, ustad, mubalig, untuk membuat arus mengcounter beragam hal yang menyesatkan soal jati diri generasi milenial atau generasi Z ini," sambungnya.

HNW menambahkan, siapa pun anak milenial itu tetaplah anak dari orangtuanya. Walaupun anak-anak memiliki teman, memegang gawai, tetaplah akan kembali ke

orangtuanya. "Karena itu penting bagi orangtua untuk memahami Pancasila, dan mewujudkannya sehingga dalam kehidupan di rumah bisa terjadi dialog, termasuk anak-anak bisa melihat orangtuanya sebagai contoh terbaik bagaimana Pancasila dan agama bukan dua hal yang bertentangan, tetapi keduanya koheren dan saling mengisi serta saling menguatkan," paparnya.

Selain itu, generasi milenial atau generasi Z, generasi alpha adalah anak-anak yang berada di sekolah. "Dalam konteks sekolah, MPR sudah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, agar materi tentang Empat Pilar MPR ini masuk ke dalam buku ajar," imbuhnya.

HNW juga mengungkapkan, pemerintahan Orde Baru juga menggunakan pendekatan ke sekolah, seperti ada pelajaran PMP atau penataran P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila). Tapi, pada waktu lalu itu pendekatan yang digunakan adalah indoktrinasi. Kalau tidak mengikuti penataran P4 tidak bisa mendaftar menjadi PNS, tidak bisa naik pangkat, tidak bisa mengikuti kuliah.

"Tapi, di era reformasi ini, era demokratisasi dan era keterbukaan, penanaman nilai-nilai Empat Pilar tidak lagi melalui indoktrinasi, tetapi melalui pembelajaran yang rasional, dialogis, sehingga anak-anak generasi milenial atau generasi Z ini merasa tidak didikte, dicekoki, dipaksa, tetapi nilai-nilai itu masuk. Dengan cara itu anak-anak merasa nyaman, dihormati, dan diapresiasi, kemudian nilai-nilai Pancasila itu bisa dipahami dan dilaksanakan," katanya.

Generasi milenial atau generasi Z adalah juga warga bangsa, masa depan negara. Mereka melihat apa yang dilakukan pemimpin bangsa, termasuk pemimpin nasional maupun di tingkat lokal. "Maka, para pemimpin kita baik di tingkat pusat maupun daerah perlu menyadari bahwa mereka menjadi teladan bagaimana menghidupkan Pancasila dalam realitas nyata. Sehingga generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha bisa melihat bahwa Pancasila bisa dilaksanakan, bahkan bermanfaat dan berguna, termasuk bagi kepentingan masa depan generasi milenial dan generasi Z, agar mereka betul-betul menjadi Generasi Emas menyongsong Indonesia Emas," pungkasnya. □



Empat Pilar di Merauke

Lestari Moerdijat: Generasi Muda Harus Berperan Aktif Menjaga Keutuhan Bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

GENERASI muda harus mampu menjaga keutuhan Indonesia dengan terus mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan yang merupakan warisan para pendiri negeri.

“Generasi muda di Merauke harus menyadari bahwa wilayah Papua Selatan sebagai Indonesia Kecil, karena di sini ada sebagian besar suku dan agama yang berasal dari Sabang hingga Merauke,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, pada kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di hadapan ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa (3/9).

Hadir pada acara tersebut, antara lain H. Sulaeman L. Hamzah (Anggota MPR-RI dapil Prov. Papua), Drs. Romanus Mbaraka, M.T., (Bupati Kab. Merauke), Fauzun Nihayah (Anggota DPRD Provinsi Papua & Direktur Rumah Aspirasi), Sugiyanto (Ketua DPRD Kab. Merauke), Jefry Tjahyadi (Ketua DPD Partai NasDem Kab. Merauke), dan sejumlah rektor dan mahasiswa dari 11 perguruan

tinggi di Kabupaten Merauke.

Menurut Lestari, anak muda saat ini berhadapan dengan rangkaian krisis global dan disrupsi teknologi, sehingga dibutuhkan kesadaran bersama untuk meningkatkan pemahaman pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai

fondasi kehidupan.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, memahami dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki merupakan langkah penting, mengingat potensi upaya memecah belah bangsa sebagai dampak sejumlah krisis tersebut semakin marak.



Semangat perjuangan kalangan muda pada masa lalu, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI, mesti kembali digelorakan pada saat ini, ketika kita berhadapan dengan berbagai tantangan tersebut.

“Ketidakpastian dunia hari ini harus disikapi dengan ragam pembelajaran. Belajar dari sejarah anak muda masa lalu,

belajar mengantisipasi masa depan berdasarkan adat dan budaya yang kita miliki,” ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

Rerie berharap, semangat kebangsaan kalangan muda dapat terus bergelora sebagai modal berperan aktif membangun daerah, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan menjaga

persatuan bangsa.

Pada kesempatan itu, dua peserta sosialisasi diminta maju ke podium untuk melafalkan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tanpa teks. Satu orang berhasil melafalkan dengan sempurna Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan berhak atas hadiah berkunjung ke kompleks DPR/MPR/DPD di Senayan, Jakarta. □

Empat Pilar @ Peran Muslimah

Lestari Moerdijat: Peran Muslimah Strategis Membentuk Generasi Penerus



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PERAN muslimah sangat strategis dalam membentuk kualitas generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

“Dalam Islam, perempuan adalah pribadi yang independen sepenuhnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Islam

adalah agama pertama di dunia yang menawarkan sistem perlindungan, kesejahteraan untuk perempuan dan hak-haknya,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, pada acara Sosialisasi Empat MPR RI bertema Peran Muslimah dalam Memperkuat dan Mempererat Persatuan Bangsa di Gedung Nusantara V, Kompleks

DPR/MPR/DPD RI Senayan, Jakarta, Jumat (6/9).

Hadir pada acara tersebut, antara lain Dr. Hj. Siti Ma’rifah, M.H., M.M., (Ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga/PRK MUI), Dr. H. Amirshah Tambunan, M.A., (Sekretaris Jenderal MUI),

Prof. Amany Lubis (Ketua Bidang

Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI), Ahmad Baidowi (Direktur Eksekutif Sekolah Sukma Bangsa), dan para anggota organisasi sosial keagamaan.

Selain itu, jelas Lestari, dalam konsepsi Indonesia sebagai bangsa dan negara, diskursus perbedaan gender sejatinya telah tuntas sejak sendi-sendi dasar negara dan konstitusi dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Sehingga, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, dapat dipahami bahwa muslimah saat ini mesti berperan aktif dalam kehidupan berbangsa pada aktivitas kesehariannya.

Dari berbagai aktivitas tersebut, tambah Rerie, diharapkan muncul partisipasi aktif muslimah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial sebagai bagian dari upaya merealisasikan tujuan bernegara.

Sebagai warga negara, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, perempuan khususnya muslimah, diharapkan mampu merumuskan paradigma pengetahuan dan gerakan transformatif dalam kehidupan bermasyarakat.

Muslimah sebagai para ibu bangsa, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, memiliki tanggung jawab moral



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

mengedepankan kesalehan sosial untuk kebaikan komunal dan memainkan peran penting untuk mengedukasi “kehidupan baru” dari keluarga sampai individu menemukan kehidupannya.

Kesalehan sosial itu, jelas Rerie,

sesungguhnya dapat diterjemahkan sebagai refleksi atas nilai-nilai kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika. □



Sarasehan Kebangsaan

Bamsoet Dorong Perubahan Ke-5 UUD NRI Tahun 1945



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo mengungkapkan, Sarasehan Kebangsaan “Mewujudkan UUD Berdasar Pancasila” yang digagas Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM pada tahun 2014 lalu menghadirkan para pakar dan intelektual, seperti Ketua PSP UGM Prof. Dr. Sudjito, tokoh masyarakat Prof. Dr. Ahmad Safii Maarif, Guru Besar Ilmu Filsafat UGM Prof. Dr. Kaelan, dan Sosiolog UGM Prof. Dr. Sunyoto Usman, menilai bahwa UUD 1945 yang mengalami amandemen empat kali tidak berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Karena ditemukan inkonsistensi, kontradiksi, dan ketidakselarasan antarpasal dan ayat dalam berbagai perubahan konstitusi tersebut.

“Adanya pergeseran dari sistem keterwakilan ke sistem keterpilihan inilah yang menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan negara terjebak pada kekuasaan oligarki. Praktik penyelenggaraan memang sudah lebih berorientasi pada demokrasi dan hukum, namun mengabaikan pembangunan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Tidak heran jika kini banyak

kalangan mengusulkan adanya perubahan kelima terhadap konstitusi. Dalam salah satu rekomendasi MPR 2019-2024 kepada MPR periode 2024-2029 juga akan memuat tentang pentingnya dilakukan kajian mendalam dan menyeluruh terhadap UUD NRI Tahun 1945,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Yayasan Jimly School of Law dan mahasiswa lintas kampus, di Jakarta, Kamis

(12/9/24).

Hadir, antara lain Ketua Forum Aspirasi Konstitusi/Anggota MPR/DPD RI Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, Ketua Yayasan Jimly School of Law and Government Muzayyin Machbub, Budiman Tanuredjo, serta Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dalam melakukan





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

kajian menyeluruh terhadap UUD NRI Tahun 1945, MPR periode 2024-2029 bisa mengajak praktisi dalam Jimly School of Law. Terdapat banyak hal yang perlu dibenahi. Misalnya, terkait sejauh mana efektifitas penerapan Pilkada langsung dalam kehidupan demokrasi Pancasila. Termasuk mengkaji langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk menekan money politic dan high cost politic dalam Pileg dan Pilpres langsung.

Mekanisme Pilkada dan Pileg berbeda dengan Pemilihan Presiden yang oleh konstitusi diamanatkan agar dipilih langsung oleh rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6A ayat (1) bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Untuk Pilkada, amanat konstitusi dalam Pasal 18 ayat 4 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Sedangkan untuk Pileg, konstitusi mengamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1) bahwa

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

“Kita perlu mengkaji tafsir terhadap konstitusi tersebut, apakah bisa mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, serta Pileg dengan sistem tertutup seperti dahulu. Atau mengkombinasikannya dengan sistem terbuka dan tertutup, sehingga meminimalisir terjadinya korupsi, money politic, dan high cost politic. Dengan demikian bisa menyelamatkan demokrasi Pancasila agar tidak terjebak dalam demokrasi angka-angka, yang menjurus kepada demokrasi komersialisasi dan kapitalisasi, dan berujung kepada oligarki,” jelas Bamsuet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, konstitusi yang bangsa Indonesia bangun dan perjuangkan adalah konstitusi yang ‘hidup’ (living constitution), yang mampu menjawab segala tantangan dan dinamika zaman. Sekaligus konstitusi yang ‘bekerja’ (working constitution), yang

dapat dijadikan rujukan, dilaksanakan, dan memberi kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Agar ‘hidup’ dan ‘bekerja’, konstitusi tidak boleh ‘anti’ terhadap perubahan. Mengingat perubahan zaman adalah sebuah keniscayaan yang tidak akan mungkin dihindarkan. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat telah melakukan 27 kali amandemen, dan India 104 kali amandemen.

“Dalam pidatonya pada Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Bung Karno menegaskan bahwa UUD dapat diubah oleh generasi yang akan datang jika dirasa perlu. Dalam pandangan Bung Karno, UUD bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah, melainkan sebuah landasan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. Hal ini mencerminkan pemikiran progresif Bung Karno bahwa konstitusi harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di masa depan,” pungkas Bamsuet. □



Empat Pilar di Woleng, Minahasa Selatan

Lestari Moerdijat: Wujudkan Persatuan Demi Keutuhan Bangsa dan Negara



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WUJUDKAN persatuan dan kesatuan di antara setiap warga negara demi menjaga keutuhan bangsa yang rawan terbelah akibat berbagai tantangan yang datang.

“Di masa lalu ada sebuah negara adidaya yang bernama Uni Soviet. Negara itu kini terbelah menjadi negara-negara kecil,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, pada kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan kelompok masyarakat Woleng di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Senin (9/9/2024).

Tentu, ujar Lestari, kita tidak bisa membayangkan bila kondisi di Negera Uni Soviet itu terjadi di Indonesia. Jangan-jangan, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, akan ada negara Minahasa, negara Bolaang Mongondow, dan di Jawa ada negara Banyumas, negara Yogyakarta dan negara Solo.

Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, kehancuran sebuah negara sangat mudah terjadi bila kita sebagai bangsa tidak mampu bersama-sama menjaga

persatuan.

Lagu Sorak-Sorak Bergembira, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, menggambarkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kemerdekaan yang tidak mudah kita capai melalui perjalanan panjang.

Bersyukurlah bangsa Indonesia, tegas Rerie, meski terdiri dari masyarakat beragam agama, suku, dan bahasa, memiliki satu

ideologi yang dibalut sebuah rasa dalam bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tatanan hukum yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pemahaman tentang Empat Pilar MPR RI, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, jelas Rerie, merupakan bagian dari upaya kita mempertahankan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. □



Sosialisasi Empat Pilar di Jember

Lestari Moerdijat: Tingkatkan Peran Aktif Generasi Muda



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PERAN aktif generasi muda dalam proses pembangunan harus terus ditingkatkan dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam empat konsensus kebangsaan yang kita miliki.

"Negara ini memperoleh kemerdekaannya berkat perjuangan anak-anak muda. Saya juga berharap anak muda Indonesia sekarang mampu berperan aktif sebagai penggerak agar masyarakat memahami Empat Pilar MPR RI yang kita miliki," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat pada Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Gedung Soetarjo, Universitas Jember, Jawa Timur,

Jumat (13/9).

Hadir pada acara tersebut, antara lain: H. Charles Meikyansah, S.Sos., M.I.Kom. (Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia), Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., (Rektor Universitas Jember), civitas akademika Universitas Jember, dan tokoh masyarakat Jember.

Pada dasarnya, jelas Lestari, Indonesia memiliki sejarah perjuangan anak muda dalam rentang waktu antara 1908 sampai 1928 dilanjutkan sampai kemerdekaan Indonesia.

Anak muda pada zaman itu, tambah dia, dengan segala potensi yang dimiliki,

bergerak bersama, bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpesan agar generasi muda jangan lelah belajar dari sejarah. Generasi muda saat ini, jelas Rerie, dipaksa untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan kondisi yang terjadi sebagai dampak modernisasi teknologi dan pandemi.

Rerie berpendapat, bangsa ini bisa bertahan menghadapi dampak perubahan di berbagai sektor, bila terus setia mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar MPR RI, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Anak muda, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus mampu mengenali apa yang terjadi dan tahu tujuan hidup bagi diri, keluarga dan bangsa Indonesia. "Kalian adalah generasi yang akan kami titipi untuk menjaga nilai-nilai dari Empat Pilar MPR RI ini. Generasi muda harus bisa mengambil peran aktif dalam proses pembangunan dan menumbuhkan kreativitas diri," tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu.

"Empat Pilar MPR RI jangan sekadar dihafal, tetapi dipahami untuk segera diamalkan, agar keutuhan Indonesia tetap terjaga dan abadi selamanya," pungkas Rerie. □



Pentas Seni Wayang Kulit di Batang, Jawa Tengah

Siti Fauziah Ajak Masyarakat Merawat dan Melestarikan Kesenian Daerah



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

LAPANGAN Desa Gringgingsari, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Ahad malam (15/9/2024), dipadati oleh ribuan warga desa setempat. Malam itu, Setjen MPR RI bekerjasama dengan Pemerintah Desa Gringgingsari menyelenggarakan Sosialisasi Empat MPR (UUD NRI Tahun 195, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) dengan metode Pagelaran Seni Budaya Daerah. Malam itu, kesenian daerah yang ditampilkan adalah Wayang Kulit.

Pagelaran Wayang Kulit dengan lakon 'Pandu Suwargo' itu ditandai dengan

penyerahan tokoh Bimo Sakti dari Plt. Sesjen MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM., kepada dalang Ki Atmo Subarno Arso Carito. Prosesi yang diselenggarakan bertepatan dengan malam Maulud Nabi Muhammad SAW itu disaksikan oleh Forkopimcam Wonotunggal, Kepala desa Gringgingsari Khoirudin, beserta perangkat desa setempat, dan ribuan warga masyarakat dari Desa Gringgingsari, dan sekitarnya.

Dan, seperti lazimnya, di mana ada kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, yang ratusan atau bahkan ribuan jumlahnya, termasuk kegiatan pentas seni wayang kulit

ini, di situ pula berdatangan ratusan para penjaja aneka dagangan untuk mengais rezeki. Pemandangan itu tampak di sekitar lokasi pagelaran wayang kulit malam itu, para pedagang berjajar di seputar lapangan hingga ratusan meter panjang.

Malam itu boleh dikata pesta rakyat untuk masyarakat Desa Gringgingsari dan sekitarnya. Di tengah suasana yang sangat meriahkan itu, Siti Fauziah saat membuka pagelaran seni budaya Jawa itu, mengajak masyarakat untuk selalu menjaga, merawat, dan melestarikan kesenian daerah, termasuk wayang kulit ini.



Karena Lembu Andini

Lakon Pandu Suwargo yang diangkat oleh dalang Ki Atmo Subarno malam itu mengisahkan tentang Sang Panegak Pandawa, Raden Ayra Werkudara, yang merasa resah dan sedih sepeninggal orang tuanya, yaitu: Prabu Pandu Dewanata dan Dewi Madrim, yang dijatuhi hukuman mati di dalam Yomanilok atau Neraka Jahanam, karena berani meminjam Lembu Andini.

Di tengah kegundahan Raden Werkudara dan para Pandawa lalu memanggil para Dewa untuk menerima hukuman. Untuk itu diutuslah Raden Sadewa untuk melapor kepada sang kakak, yaitu Prabu Puntadewa. Mendengar

laporan itu Prabu Puntadewa marah. Ia lantas berubah menjadi Dewa Amral dan segera menyusul adik-adiknya.

Kepergian para Pandawa dirasakan oleh Bhatara Kresna, dan kemudian menanyakan kebenarannya kepada Dewi Kunthi. Mendengar jawaban Dewi Kunthi, Prabu Kresna pun ikut-ikutan marah dan berubah menjadi Raksasa Brahala Sewu.

Maka, mengamuklah kedua Raksasa tersebut di Kahyangan. Di tengah keributan yang terjadi di Kahyangan, para Dewa sibuk mencari cara untuk melawannya. Akhirnya disarankanlah untuk dihadapkan kepada para Pandawa dengan satu syarat, Prabu Pandu harus dinaikan/dimasukkan di Surga. □

“Wayang kulit merupakan peninggalan nenek moyang, yang mengandung nilai seni budaya luhur. Sebuah kesenian yang mengandung tuntunan yang baik, dan dijadikan panutan bagi masyarakat,” ujar Siti Fauziah lebih lanjut,” Apalagi, wayang kulit juga mengajarkan sikap tolong-menolong, saling bantu, dan kerjasama yang harmonis antar sesama pemain, mulai dari pemain musik, sinden, hingga dalang tentunya.

“Bayangkan, kalau antara sesama pemain tidak bisa kerjasama, pemain musik yang satu dengan lainnya main seenaknya sendiri, tidak mau kerjasama dengan pemain musik lainnya, tentu irama yang dihasilkan tidak bisa dinikmati. Situasi seperti itu membuat sindennya bingung, apalagi dalang. Semua jadi kacau,” kata Bu Titi, sapaan Siti Fauziah, menggambarkan betapa pentingnya kerjasama.

Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, menurut Siti Fauziah, semua warga masyarakat harus mau memainkan perannya masing-masing dengan baik, saling bekerjasama, saling bantu, dan tolong-menolong. Semua itu, tujuannya agar tercapai ketenangan, ketenteraman, dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat.

Tuntunan tersebut, lanjut Bu Titi, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih saat ini kita akan menghadapi Pilkada serentak yang berlangsung November mendatang. “Pilihan boleh beda, tetapi tidak harus mengorbankan persaudaraan. Jaga pesatuan dan kesatuan untuk kemaslahatan kita semua,” pungkasnya.



Komisi Kajian Ketatanegsaan (K3) MPR RI

Gelar Rapat Pleno Penutupan Periode 2019-2024



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR, Daryatmo Mardiyanto, memimpin Rapat Pleno K3 MPR RI Penutupan Periode 2019-2024, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Pleno selain dihadiri para Wakil Ketua K3 Martin Hutabarat, Rambe Kamarul Zaman, Dossy Iskandar Prasetyo, Hj Siti Masrifah, dan sekitar 35 anggota K3, juga dihadiri Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah serta beberapa pejabat Setjen MPR, antara lain Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Setjen MPR RI Hentoro

Cahyono, Kepala Biro Pengkajian Konstitusi Setjen MPR RI Heri Herawan, dan Kepala Bagian Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Andrianto.

Di dalam rapat pleno yang berlangsung lancar dan hidmat ini, Ketua K3 MPR Daryatmo mengatakan, hari ini (10/9/2024) merupakan penghujung masa bakti Pimpinan dan anggota K3 MPR periode 2019-2024. Dalam rentang waktu tersebut, telah banyak dinamika yang dilalui dalam menjalankan tugas sesuai yang diamanahkan, yang tentunya semua tugas yang diemban dilaksanakan secara penuh tanggung jawab.

“Mewakili Pimpinan dan anggota K3, saya

menyampaikan apresiasi dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada Pimpinan MPR, serta Sekretaris Jenderal MPR dan seluruh jajarannya yang banyak membantu dan mendampingi kami dalam menjalankan tugas-tugas,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Daryatmo secara resmi memberikan beberapa bundel tebal berisi Laporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas K3 sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 kepada Plt. Sesjen MPR RI Siti Fauziah mewakili Pimpinan MPR RI.

Usai rapat plenon, kepada awak media, Daryatmo mengungkapkan bahwa Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR —sesuai Tatib MPR Pasal 58 — berkedudukan sebagai unsur pendukung MPR yang melaksanakan kajian ketatanegaraan, yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Badan Pengkajian MPR.

“Adapun susunan kepengurusan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR ini disahkan oleh Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam Rapat Pleno I Komisi Kajian Ketatanegaraan, di Ruang GBHN, Komplek Parlemen Jakarta, pada Februari 2020 dan habis masa baktinya saat keanggotaan MPR berakhir,” katanya.

Terkait penugasan yang dikerjakan K3, lanjut Daryatmo, dilaksanakan berdasarkan dua hal, yaitu: Pertama penugasan sesuai Tatib MPR Pasal 62, kemudian tugas-tugas yang diberikan oleh Pimpinan MPR dan Badan



Pengkajian MPR

"Itu yang kita lakukan selama ini. Dalam kurun waktu 5 tahun kita menyusun laporan seluruh kajian sesuai penugasan dari Tatib, serta penugasan-penugasan yang dilakukan oleh Pimpinan secara khusus. Kita membuat laporan per tahun, kemudian laporan lima tahunan. Di dalam laporan itu, ada rekomendasi dan rencana tindak lanjut," paparnya.

Dijelaskan Daryatmo, rekomendasi itu

adalah catatan-catatan K3 selama melakukan pengkajian dengan memberikan butir-butir, masukan rekomendasi yang menyangkut tugas-tugas itu. Sedangkan Rencana Tindak Lanjut adalah sebuah usulan dari K3 untuk dilakukan oleh K3 pada periode ke depan.

Daryatmo menyampaikan, ada dua hal terkait kajian ketatanegaraan yang harus jadi perhatian. Pertama, kajian tentang aspirasi dan dinamika masyarakat dalam

pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR. "Karena, kami perhatikan bahwa soal sosialisasi itu secara nasional, pada periode sekarang ini, hanya dilakukan oleh pihak legislatif dalam hal ini MPR. Di pihak eksekutif dengan tidak adanya BP7 yang ditiadakan melalui TAP MPR No XVIII/MPR/1998, tidak mempunyai wadah melakukan sosialisasi itu. Memang, sekarang ada namanya BPIP, tetapi itu harus dikembangkan lebih baik lagi, yaitu pada level eksekutif," pungkasnya. □

Pt. Sesjen MPR Gelar Konferensi Pers

Tentang Pelaksanaan Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2019-2024



PLT. SEKRETARIS Jenderal MPR RI Siti Fauziah, SE., MM., didampingi Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, Anies Mayangsari Muningsari, menggelar konferensi pers terkait pelaksanaan Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR RI periode 2019-2024. Acara yang digelar di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/9/2024), itu dihadiri puluhan awak media, baik cetak, elektronik maupun online.

Kepada awak media massa, Siti Fauziah menjelaskan bahwa pelaksanaan Sidang Paripurna MPR RI tersebut merupakan amanat dari UU No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta

Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tetib (Tatib) MPR, yaitu kewajiban MPR untuk menyelenggarakan Sidang Akhir Masa Jabatan untuk penyampaian laporan pelaksanaan wewenang serta tugas dan kinerja MPR selama 5 tahun.

"Jadi, setiap akhir masa jabatan Pimpinan dan anggota MPR, kita memang punya kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan wewenang. Selain menyampaikan laporan kinerja dalam Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan, juga akan disahkannya Peraturan MPR tentang Tata Tertib dan Keputusan MPR tentang Rekomendasi MPR masa jabatan 2019-2024 untuk ditindaklanjuti oleh MPR periode 2024-2029," terangnya.

Lebih jauh, Ibu Titi -sapaan akrab Siti Fauziah- mengungkapkan, sebelum masuk ke pelaksanaan Sidang Akhir Masa Jabatan yang digelar pada tanggal 25 September 2024, lebih dahulu pada tanggal 23 September 2024 diselenggarakan Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi serta Kelompok DPD di MPR.

"Dalam Ragab tersebut akan diputuskan dan disahkan beberapa hal, seperti materi yang akan dibawa dalam Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan pada tanggal 25 September 2024. Lalu, Rekomendasi MPR masa jabatan 2019-2024 untuk Pimpinan dan anggota MPR periode 2024-2029, salah satunya mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)," jelas Ibu Titi.

Lebih lanjut, Ibu Titi memaparkan bahwa rangkaian kegiatan penting MPR tersebut akan berlanjut pada tanggal 1 Oktober 2024, yakni Sidang Pelantikan Anggota MPR baru. Jadi, pada 1 Oktober 2024 itu digelar beberapa acara pelantikan. Mekanisme pelaksanaannya meliputi: Pertama, pelantikan anggota DPR, dilanjutkan pelantikan anggota DPD, dan berikutnya pelantikan anggota MPR RI.

“Jadi, teknisnya nanti di meja para anggota ini ada dua map. Untuk anggota DPR ada map DPR dan ada map MPR. Untuk anggota DPD, ada mapnya DPD dan mapnya MPR. Karena itu serentak dilaksanakan di tanggal 1 Oktober, untuk menyatukan persepsi agar acara penting tersebut berjalan dengan baik dan lancar, kami barusan (sebelum konferensi pers ini, *red*) melakukan rapat koordinasi dengan KPU, DPR, DPD,” ujarnya.

Sebagai informasi, lanjut Siti Fauziah, ada penambahan anggota MPR, dari semula di periode 2019-2024 berjumlah 711, pada periode 2024-2029 ada 732 anggota. “Jadi ada penambahan baik dari DPR maupun dari DPD,” imbuhnya. Penambahan jumlah anggota DPR dan DPD ini terjadi karena ada penambahan jumlah daerah provinsi di Indonesia.

Selanjutnya, DPR dan DPD yang baru menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk memilih pimpinan masing-masing. Lokasi Sidang Paripurna DPR RI dengan agenda Pemilihan Pimpinan DPR (mungkin) di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara. Sedangkan Sidang Paripurna DPD berlangsung di Ruang



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Rapat Paripurna Nusantara V. Setelah pimpinan DPR RI dan DPD RI terpilih, baru kemudian berlangsung Sidang Paripurna MPR menetapkan Pimpinan MPR RI.

“Biasanya kalau pelantikan Pimpinan DPR dan DPD pada tanggal 1 Oktober, kemungkinan nanti pelantikan Pimpinan MPR-nya jatuh pada tanggal 3 atau 4. Ini tergantung dari finalnya pelantikan atau pemilihan dari pimpinan DPR dan DPD. Di tanggal 2 Oktober biasanya digelar rapat-rapat pembentukan alat kelengkapan dan lainnya,” jelas Siti Fauziah

Bu Titi juga menerangkan tentang konfigurasi Pimpinan MPR periode 2024-2029. Dia menjelaskan, konfigurasi pimpinan MPR RI untuk periode 2019-2024 berjumlah 10 orang, terdiri dari 1 Ketua dan 9 Wakil Ketua, mereka adalah perwakilan seluruh fraksi ditambah kelompok DPD. Kalau aturan tidak berubah maka Pimpinan

MPR untuk periode 2024-2029 berjumlah 9 orang atau berkurang satu orang dibanding periode 2019-2024, karena satu fraksi (PPP) tidak lolos ke Senayan. Dengan demikian jumlah Pimpinan MPR RI periode 2024-2029 menjadi sebagai berikut: 8 orang merupakan perwakilan fraksi dan 1 perwakilan kelompok DPD.

Di sesi akhir, Siti Fauziah berharap agar informasi mengenai rencana Pelaksanaan Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2019-2024 dan Sidang Paripurna Awal Masa Jabatan MPR periode 2024-2029, serta semua kegiatan penting MPR RI lainnya bisa terpublikasikan dengan baik kepada seluruh elemen bangsa Indonesia.

“Kepada rekan-rekan media, semoga kita bisa bekerjasama dan bersinergi dengan baik untuk kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya. □

DER

Serahkan Buku Laporan Kinerja

Idris Laena: Akan Menjadi Tradisi FPG Akhir Periode

KETUA Fraksi Partai Golkar MPR (FPG MPR), Idris Laena, secara resmi menyerahkan Buku Laporan Kinerja FPG MPR periode 2019-2024 kepada lembaga MPR RI, dan diterima langsung oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

“Penyerahan buku ini merupakan bentuk tanggung jawab FPG di masa akhir periode keanggotaan Pimpinan dan Anggota FPG di MPR,” ujar Idris Laena dalam sambutannya.

Idris berharap, kegiatan ini akan menjadi tradisi Fraksi Partai Golkar di setiap akhir masa periode. “Sekaligus juga menjadi referensi ketatanegaraan untuk masukan bagi Fraksi Partai Golkar yang akan datang,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Idris sebagai Ketua FPG MPR periode 2019-2024, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan, anggota fraksi, staf fraksi, dan Kesetjengan MPR RI, serta pimpinan DPP Partai Golkar, yang selama 5 tahun ini bersama-sama dalam suka dan duka mengawal kebijakan

Partai Golkar di Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terhormat ini. “Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi usaha kita,” pintanya.

Acara penyerahan buku ini diikuti dengan kegiatan Seminar Kebangsaan bertema: ‘Kiprah dan Pemikiran Fraksi Partai Golkar MPR RI 2019-2024 dalam Penguatan Demokrasi dan Ketatanegaraan’; dengan sub-tema: ‘Evaluasi Perjalanan Ketatanegaraan Setelah 26 Tahun Era Reformasi.’ Dan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Partai



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Golkar Tahun 2024.

Acara ini dihadiri oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, para pimpinan dan anggota FPG MPR, Sekjen DPP Partai Golkar M. Samuji, Pimpinan Dewan Pakar Partai Golkar, perwakilan Faksi PDI Perjuangan MPR TB. Hasanuddin, Perwakilan Fraksi PAN MPR Saleh Daulay, Perwakilan Kementerian/Lembaga, serta Perwakilan Ormas.

Mengenai tema dan subtema yang diusung dalam Seminar Kebangsaan tersebut, menurut Idris Laena, untuk menjelaskan bahwa peran Partai Golkar dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Di era reformasi, jelas Idris, Partai Golkar turut berperan aktif dalam demokrasi di Indonesia, dengan mendukung prinsip-prinsip demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selama 26 tahun era reformasi berjalan, Partai Golkar juga berusaha memperkuat komitmen terhadap agenda reformasi tahun 1998, yakni penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kolusi, dan

nepotisme.

Dalam pandangan Fraksi Partai Golkar, jelas Idris, reformasi sesungguhnya sudah berjalan dengan baik untuk memperbaiki segala aspek kehidupan kebangsaan dan kenegaraan sebagaimana diamanahkan oleh agenda reformasi tahun 1998. Namun, belum sepenuhnya terwujud. Semestinya, perjalanan 26 tahun era Reformasi ini dapat lebih menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia dalam membuka jalan bagi perubahan menuju perwujudan demokrasi keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. "Refleksi kritis perlu kita lakukan bersama-sama untuk mengevaluasi secara menyeluruh era reformasi yang telah berjalan selama 26 tahun ini," ujarnya.

Sejak penyelenggaraan Pemilu tahun 1999 hingga Pemilu 2024, lanjutnya, fakta menunjukkan bahwa sistem kepartaian yang diterapkan di Indonesia masih bersifat fluktuatif, dan bergantung pada sistem

pemerintahan yang sedang diterapkan. Idealnya, sistem kepartaian seharusnya mampu mewujudkan sistem pemerintahan Presidensial yang makin stabil dan demokratis.

Fakta selanjutnya adalah penegakan hukum yang belum mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meski sudah mengalami kemajuan, Indonesia masih menghadapi tantangan di bidang penegakan hukum, salah satunya soal korupsi masih menjadi masalah serius yang merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan penegak hukum,

"Kita bisa lihat, jika pada masa Orde Baru praktik korupsi hanya terjadi di lingkungan terbatas, ternyata di era Reformasi ini praktik korupsi justru semakin masif dan meluas, mulai dari pemerintahan di tingkat pusat hingga ke daerah. Sangat disayangkan, KPK telah banyak menangani kasus-kasus besar, ternyata praktik korupsi masih merajalela di berbagai level pemerintahan," terangnya.

Idris Laena juga memaparkan refleksi kritis Fraksi Partai Golkar di bidang ekonomi. Sesuai amanat reformasi tahun 1998, MPR RI telah melahirkan Ketetapan No. XVI MPR Tahun 1998 Tentang Politik Ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. TAP MPR ini tentu sejalan dengan visi negara kesejahteraan tahun 2045 yang telah dirumuskan oleh Partai Golkar, dan selaras dengan visi pembangunan perekonomian nasional menuju Indonesia Emas Tahun 2045, yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, guna mewujudkan keadilan dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

"Namun, idealisme ini hingga era reformasi berjalan selama 26 tahun belum menemukan realitanya dalam kehidupan perekonomian rakyat Indonesia. Demikian juga di bidang pendidikan yang merupakan hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Fakta menunjukkan mahalnya biaya pendidikan masih menjadi hambatan besar bagi kalangan keluarga di Indonesia. Misalnya, kebijakan kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal yang semakin memperlebar kesenjangan sosial di negara kita tercinta ini," katanya.

Bertitik tolak dari fakta-fakta tersebut di atas, Partai Golkar berharap, Seminar Kebangsaan ini dapat menemukan solusi atau jalan keluar yang terbaik. □

DER



Akan Wakili Indonesia

di Miss Universe 2024 di Meksiko

MODEL cantik **Clara Shafira Krebs** atau akrab disapa Clara Sha terpilih menjadi Miss Universe Indonesia Tahun 2024 dalam ajang Grand Final Miss Universe Indonesia 2024 di H Club, SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (19/09/2024).

Model yang lahir di Jerman, 19 Mei 2022, ini menyisihkan 14 finalis Miss Universe Indonesia lainnya. Dan, mendapatkan *crowning* setelah menyisihkan Fiza Javaid Khan yang terpilih menjadi Top 2 Miss Universe Indonesia 2024. Pemenang Miss Universe Indonesia ini nantinya akan mewakili Indonesia di ajang Miss Universe 2024 di Meksiko pada November mendatang.

"Ini pengalaman pertama saya mengikuti kontes kecantikan. Saya harap bisa mengharumkan nama Indonesia dan sekaligus bisa menjadi ajang promosi kebudayaan dan pariwisata Indonesia di Meksiko kelak," kata Clara Sha, yang menekuni model sejak usia 17 tahun itu. □

DER



Clara Shafira Krebs

Kagum dengan Kesederhanaan Paus Fransiskus

PENDAKWAH Islam **Habib Husein bin Ja'far Al Hadar** atau Habib Ja'far termasuk salah seorang pemuka agama yang turut hadir pada acara pertemuan tokoh lintas agama bersama Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Habib Ja'far mengaku minta diundang oleh Istiqlal karena ingin kenal lebih dekat dengan Paus Fransiskus dalam pertemuan lintas agama itu. "Beliau salah satu pemuka agama yang saya kagumi. Saya membaca banyak sekali biografi Paus Fransiskus, membaca buku-bukunya, menonton film-film dokumenter yang bercerita tentang Paus Fransiskus. Saya kagum dengan kesederhanaan beliau," kata Habib kelahiran Bondowoso, 21 Juni 1988, ini.

Menurut Habib Ja'far, salah satu yang dia kagumi dari Paus adalah kesederhanaan beliau. Kesederhanaan Paus, menurut Habib Ja'far, menjadi pukulan keras bagi anak muda yang sering memperlihatkan gaya hidup hedonisme. □

DER



Habib Ja'far



Lyodra Ginting

Tampil Menyanyi di Depan Paus Fransiskus

ARTIS penyanyi jebolan Indonesia Idol, **Lyodra Margareta Ginting**, mendapatkan kesempatan tampil bernyanyi di hadapan pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, pada Misa Agung yang dihadiri ribuan umat Katolik di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Bukan hanya tampil menyanyi, artis kelahiran Medan, 21 Juni 2003 ini, dalam kesempatan itu juga mendapat berkat langsung dari Pope. "Ini sih yang bikin aku merinding ga bisa ngomong," ujar Lyodra yang mengaku sempat gugup.

"Saya bersyukur didoain dan disupport temen-temen, jadi semuanya lancar, dan juga bersyukur karena momen tersebut menjadi pengalaman langka seumur hidupku," ungkap Lyodra yang memulai karier menyanyi sejak usia 4 tahun. □

DER

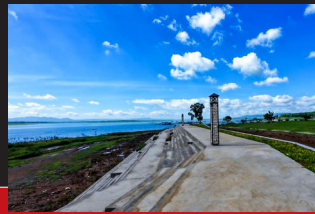


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Sehari Menjelajahi Waduk Gajah Mungkur

KEMARAU menyebabkan kekeringan di berbagai daerah di Indonesia. Banyak wilayah yang biasa menjadi langganan kekeringan, kini tengah merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Ada yang harus berjalan berkilo meter hanya untuk mendapatkan se-ember air di sumber mata air yang tersisa. Ada juga yang harus rela mengantri, menunggu bantuan air bersih dari pemerintah atau lembaga sosial lainnya.

Kekeringan juga nampak terjadi di lokasi Waduk Gajah Mungkur (WGM), Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Posisi air di tempat tersebut terus menyusut. Menyebabkan daerah pinggir waduk semakin menjorok ke dalam. Surutnya air di Waduk Gajah Mungkur tampak sangat parah, lebih dari setinggi orang dewasa berdiri. Kondisi itu bisa dilihat dari bekas lumpur yang telah mengering, dan menempel di bebatuan serta tiang jembatan kaca yang berdiri kokoh di kawasan wisata Waduk Gajah Mungkur.

Wartawan Majalah *Majelis* MPR RI berkesempatan menyaksikan kondisi itu saat berkunjung ke WGM beberapa waktu lalu. Kala itu, sekira pukul 10.00 WIB, terik matahari mulai menyengat. Saat itu, tak



terlihat banyak pengunjung yang datang, karena memang bukan hari libur. Cuma terlihat sekelompok ibu-ibu tengah mengadakan gathering. Nyaris tidak ada kendaraan berlalu-lalang, bahkan di lapangan parkir terlihat beberapa kendaraan pribadi, selebihnya yang tampak hamparan batak.

Praktis kawasan waduk yang berada di Jalan Raya Wonogiri-Pracimantoro, Desa Pokoh Kidul, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, terlihat lengang. Kesempatan tersebut kami manfaatkan untuk menjelajah sebagian kawasan waduk yang adalah bagian hulu dari sungai Bengawa Solo. Hanya saja, untuk menjelajahi kawasan waduk seluas

8.800 hektar, dengan panjang hampir 1500 meter dan ketinggian 42 meter itu bukanlah pekerjaan mudah untuk dilaksanakan. Apalagi cuaca panas mendera seujur tubuh, dan seolah-olah isi kepala pun nyaris mendidih.

Dari pengamatan di lapangan, akibat dari kekeringan, menyebabkan kawasan waduk yang berlokasi tak jauh (sebelah barat) dari Pegunungan Gajah Mungkur—yang kemudian dijadikan nama untuk waduk — membuat kawasan waduk itu terlihat gersang. Apalagi tidak banyak pepohonan yang bisa dijadikan untuk tempat berteduh. Hanya ada tanaman belukar tumbuh subur, disertai ceceran sampah dari para wisatawan yang berlaku kurang bijak,



membuang sampah sembarangan.

Ketika matahari semakin terik, kami memutuskan untuk berhenti di salah satu warung makan yang menyediakan berbagai hidangan menu ikan air tawar. Ikan-ikan yang diperjual belikan itu didapat dari Waduk Gajah Mungkur. Yaitu, ikan hasil ternak keramba di waduk tersebut. Ada puluhan warung yang menyediakan jenis makanan serupa di tempat tersebut. Bahkan, hidangan yang diujakan pun nyaris sama. Mulai dari Ikan Patin, Lele, hingga Mujair. Untuk pengunjung yang suka ikan goreng, di warung-warung telah tersedia ikan goreng. Buat pengunjung yang menyukai ikan bakar, juga tersedia ikan yang siap dibakar, dan jenis menu hasil olahan ikan lainnya.

Dari lokasi kami makan, terlihat karamaian di tempat pemeliharaan ikan keramba. Puluhan petani yang ada di sana sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Seolah tak merasakan teriknya sinar matahari, mereka bergesah merampungkan pekerjaannya.

Wisata Kulineran

Para pelancong yang berwisata di waduk—yang mulai dibangun pada tahun 1974 dan diresmikan pada 17 November 1981 oleh Presiden Soeharto—itu tak perlu khawatir, karena banyak pedagang menjajakan dagangannya di sana. Harga yang ditawarkan relatif murah. Menu yang tersedia juga bermacam-macam, tidak hanya ikan tentunya. Pokoknya, pengunjung bisa

memilih jenis masakan yang disukai. Ada bakso, soto, mie instan, pancel, urap, serta aneka jajanan pasar lainnya.

Puas dengan urusan perut, kami segera beranjak menyusuri tepian waduk, melihat berbagai spot yang tersedia di kawasan itu, termasuk yang paling baru adalah jembatan kaca. Dari jembatan itu hampir seluruh kawasan wisata terlihat dengan jelas. Di beberapa tempat, kami abadikan menggunakan kamera hp. Sedangkan, di tempat lainnya dipakai untuk membuat konten.

Sebelum rasa penat merasuki badan, kami memutuskan untuk menikmati keindahan waduk dengan menumpang boat. Harga tiketnya (per-boat) berkisar Rp 150 hingga Rp 300 ribu, tergantung jarak tempuh. Kalau harga tersebut dirasa mahal, ada kapal yang lebih murah. Tetapi harus menunggu hingga seluruh bangku terisi penuh penumpang.

Tak berapa lama, Pak Amin telah menggeber mesin boatnya, membawa kami menuju ke tengah waduk. Sesekali kami bertemu rombongan lain yang juga menikmati keindahan alam Waduk Gajah Mungkur. Sebuah kawasan yang dulunya ditempati oleh 67 ribu jiwa lebih penduduk dari 51 desa yang “dipaksa” harus transmigrasi secara bedol desa ke luar Jawa untuk pembangunan waduk tersebut. Dan, sebagai bukti pengorbanan penduduk, tak jauh dari kawasan waduk itu didirikan Patung Bedol Desa.

Dari atas boat, kami juga dapat menyaksi-

kan kapal keruk yang sedang beraksi, mengeruk dan mengangkut sedimen lumpur yang menyebabkan dasar waduk semakin dangkal. Waduk Gajah Mungkur memang dirancang untuk umur 100 tahun. Musuhnya utamanya adalah sedimentasi yang diperkirakan akan membuat usia waduk menjadi lebih singkat dari 100 tahun. Lalu, tak kalah indahnya, kami menyaksikan beberapa ekor burung bangau yang berdiri dengan satu kaki di atas air waduk.

Setelah beberapa saat berputar, sembari menikmati udara segar di tengah WGM, kami pun tiba di spot paling membanggakan, di balik PLTA. Sebuah pemandangan dengan latar belakang tembok besar bertuliskan Bendungan Serbaguna Wonogiri.

Pak Amin pemilik boat menyilakan kami mengabadikan spot tersebut dari berbagai angle. Dalam sekejap kamera hp kami menyalak tak henti-henti. Berbagai angle diabadikan, dengan berbagai gaya nan unik.

Setelah dirasa cukup, kami segera kembali ke dermaga seperti saat berangkat. Seolah ingin memberikan kesan bagi kami, Pak Amin menggeber boatnya sembari bermanuver, berputar dan membentuk huruf Z, mengakibatkan cipratan air yang cukup besar. Kiranya Pak Amin memang ingin memberi kesan menyenangkan buat kami. Dan, nyatanya kami pun sangat puas menikmati suasana tersebut. Terima kasih Pak Amin. □

MBO

Romo H.R. Muhammad Syafi'i, SH., M.Hum

Kiprah Mantan Pendidik di Gedung Parlemen



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

DI KALANGAN keluarga Jawa, panggilan Romo biasanya ditujukan untuk seorang bapak dari kalangan kelas sosial lebih tinggi. Panggilan Romo juga diberikan kepada pemuka agama Katolik (pastor) untuk daerah tertentu. Tapi Romo yang satu ini lain. Dia bukan orang Jawa, tapi orang "Kite" (Melayu, Kisaran). Dia juga bukan pemuka agama Katolik, melainkan sosok yang sejak remaja aktif dalam organisasi sosial keagamaan. Dia adalah seorang yang bercita-cita menjadi pendidik dan pendakwah, sekarang mengabdikan dirinya sebagai politisi.

Romo H.R. Muhammad Syafi'i, SH., M.Hum., nama lengkapnya. Sosok yang biasa disapa Romo ini lahir di Kisaran, Sumatera Utara, 21 Oktober 1959. Romo adalah anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan suami istri H. Raden Sanusi dan Hj. Latifah Hanum. Sejak usia dini, Romo kecil biasa terdidik di dalam keluarga yang kuat dalam agama dan sosial kemasyarakatan.

"Kota Kisaran merupakan tanah kelahiran saya. Kota kecil yang indah, penuh dengan kenangan masa kecil saya. Tempat bermain bersama teman-teman kecil saya, dan di sanalah saya mendapatkan banyak pelajaran hidup," ungkap Romo mengenang masa kecilnya. Awalnya, dia hanya bercita-cita ingin mengabdikan diri sebagai seorang pendidik atau guru.

Tapi, "untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak," ternyata kuasa Allah menentukan lain. Romo menjadi seorang politisi kenamaan, dia tercatat sebagai Anggota DPR RI/ MPR RI Fraksi Partai Gerindra selama dua periode. Untuk bisa sampai di puncak kariernya seperti sekarang, sebagai seorang politisi, tak lepas dari perjuangan

yang cukup panjang.

Sama seperti anak-anak umumnya, Romo menempuh jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi (S1 dan S2) di Kota Medan. Kecuali gelar doctornya diperoleh setelah menamatkan program S3 Ilmu Alquran dan Tafsir di Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ) di Jakarta, 2023. Tapi, catatan perjalanan hidupnya paling menarik, sejak usia remaja sudah aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan, semuanya diikhhlaskan untuk membantu rakyat kecil.

Keingiannya menjadi seorang pendidik sempat terlaksana, ketika dalam rentang waktu 1982 hingga 1995, dia menjadi seorang pendidik atau guru di banyak lembaga perguruan di Medan, seperti di Perguruan Ade Irma, Taman Siswa Polonia, Perguan Nasional Khalsa, Yayasan Pendidikan Agus Salim, dan Lembaga Pendidikan Budi Satrya.

Sebagai seorang penyandang gelar sarjana S1 Hukum dari Universitas Sumatera Utara (1988) dan S2 Hukum juga dari univeritas yang sama, Romo juga pernah menjadi penatar Program BP 7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, 1990-1995), dan dosen di Universitas Sisingamangaradja (1999-2000). Selain menjadi Ketua Yayasan Kasyful Fikri, yang aktivitasnya menyalurkan beasiswa (1997-sekarang).

Di samping itu, sejak usia remaja, Romo juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan organisasi soal lainnya. Dia aktif di Remaja Masjid Al-Ikhlash, bergabung di HMI Komisariat Fakultas Hukum USU



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

sebagai Ketua Bidang Dakwah (1983-1984). Juga bergabung di organisasi KAHMI Wilayah Sumut sebagai Biro Pemberdayaan Umat (2002-2007), dan masih banyak lagi.

Romo mulai tertarik di bidang politik dan organisasi sejak mengikuti aktivitas di kampus. Bahkan, saat itu, dia sudah menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tahun 1978, Romo menjadi Ketua Ranting PPP Kelurahan Tegal Rejo di Medan. Aktivitasnya di partai politik beraliran Islam ini terus berlanjut, hingga kemudian dia dipercaya menjadi Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Medan (1995-2000).

Bergabung dengan PPP inilah titik awal Romo terjun dalam bidang politik praktis. Bagaimana tidak, pada 1997 Romo terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Medan (1997-1999) dari Fraksi PPP. Kemudian, tahun 2001, Romo memutuskan bergabung dengan Partai Bintang Reformasi (PBR) dan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBR Sumatera Utara (2002-2006), dan menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBR (2006-2011). Pada Pemilihan Legislatif tahun 2004, Romo terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Fraksi PBR

(2004-2009).

Namun, pada Pileg 2009, PBR tidak memenuhi syarat ambang batas, dan Romo gagal masuk ke parlemen. Lalu, kemudian dia memutuskan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN), dan itu terjadi pada tahun 2011. Dalam perjalanannya, Romo ingin menambah wawasan dan pengalaman politiknya dengan merubah haluan politik. Dengan pertimbangan yang hati-hati dan sangat matang, Romo kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Partai Gerindra—partai bentukan Prabowo Subianto—pada tahun 2012. Di partai Gerindra ini, Romo menjadi Anggota Dewan Penasihat DPP Gerindra (2012-2017).

Pendek cerita, pada Pileg 2014, Romo maju menjadi calon anggota legislatif dari Partai Gerindra dapil Sumatera Utara I, dan berhasil terpilih menjadi anggota DPR RI. Sebagai anggota Fraksi Partai Gerindra, Romo ditempatkan di Komisi VIII membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Pada November 2015 terjadi mutasi di Fraksi Partai Gerindra, Romo dialih tugaskan ke Komisi III, yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan kepolisian.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Posisinya sebagai wakil rakyat mewakili Sumatera Utara semakin mantap setelah dia kembali terpilih menjadi Anggota DPR RI pada Pileg 2019. Sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024, Romo kembali ditempatkan di Komisi III membidangi hukum, hak asasi manusia, dan kepolisian. Pada periode kedua ini, Romo juga dipercaya menjadi anggota Badan Pengkajian MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, sebuah badan di lingkungan Kesekjenan MPR RI.

Demokrasi adalah Persaudaraan

Suatu hal yang menarik pada diri seorang Romo H.R. Muhammad Syafi'i adalah perhatiannya kepada umat dan rakyat kecil. Perhatian itu tak pernah luntur walau dia mendapat kepercayaan menduduki jabatan apapun, termasuk saat menjadi anggota DPR RI terhormat selama dua periode. Salah satu hal yang merisaukan hati Romo adalah terkait hubungan antar rakyat saat Pilpres yang membelah rakyat menjadi dua kubu. Sebagai solusinya, Romo menyuarakan pentingnya persaudaraan, dan menawarkan rekonsiliasi setelah Pilpres 2024.

Romo menyatakan, salah satu cita-cita luhur dalam demokrasi adalah *fraternity* (persaudaraan), yang sering terkubur oleh hingar bingar politik. "Setiap orang bisa saja berbeda menanggapi hasil Pilpres, itu adalah hak politiknya, tetapi persaudaraan dalam politik harus diutamakan. Rekonsiliasi merupakan implementasi dari nilai dasar persaudaraan tersebut," tandas Romo.

Soal lain yang menjadi keprihatinan Romo adalah kasus tanah yang melibatkan mafia tanah. Korbannya tentu rakyat kecil. Nah, sebagai Anggota Komisi III DPR RI, Romo kerap membantu rakyat kecil dalam menghadapi berbagai permasalahan sulit, termasuk soal mafia tanah. Salah satunya, kasus permainan tanah oleh mafia tanah, terutama di wilayah Medan, Sumatera Utara. Jadi, ketika warga terjepit permainan mafia tanah, Romo sering turun langsung membantu korban.

Terduga Teroris Harus Diperlakukan Manusiawi

Salah satu tugas yang diembannya saat menjadi anggota Komisi III DPR RI selama dua periode adalah disahkannya UU Tentang Tindak Pidana Terorisme. Ceritanya, pada 2016, Roma diberi amanat menjadi Ketua Pansus Revisi UU No.15/2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme). Menurut Romo, kata kuncinya, pengesahaan RUU ini menjadi UU berarti memenuhi harapan Pimpinan DPR RI yang menginginkan agar UU Teroris ini selesai akhir 2018.

Romo menjelaskan, terjadi perubahan signifikan terhadap sistematika UU No. 15/2003, meliputi: penambahan bab pencegahan, bab soal korban, bab kelembagaan, bab pengawasan, dan soal peran TNI, yang kesemuanya baru, belum ada di UU sebelumnya. Poin-poin penting diatur dalam UU Teroris ini, antara lain: Penangkapan dan penahanan tersangka teroris tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia; Terduga teroris harus diperlakukan manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan





martabatnya sebagai manusia. “Perinsip ini penting dikemukakan agar penegakan HAM sesuai prinsip universal yang selama ini berlaku,” katanya.

Romo mengungkapkan, saat pembahasan RUU Teroris itu sempat terjadi *deadlock* terkait definisi terorisme. Menurutnya, definisi terorisme yang diinginkan pihak pemerintah sama halnya dengan tindak kriminal biasa. Sehingga tarik ulur antara keinginan pemerintah yang tidak ingin ada definisi sama sekali dengan DPR yang menghendaki ada batasan yang jelas terkait definisi terorisme. Inilah yang menyebabkan *deadlock*.

“Pemerintah pada dasarnya tidak setuju ada definisi, kemudian mengajukan rancangan definisi terorisme versinya sendiri. Tetapi di dalamnya sama sekali tidak memuat motif dan tujuan. Mohon maaf, daam hal ini sepertinya saya berjuang sendirian. Perlu dicatat, aparaturnya tidak memiliki kewenangan apapun kecuali atas dasar hukum,” ujar Romo. Walau pun sempat *deadlock*, akhirnya RUU Teroris itu bisa disahkan menjadi UU Teroris akhir 2018.

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Sebagai anggota MPR RI, Romo Syafii juga punya tugas yang diamanatkan oleh UU, yaitu melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR ke berbagai daerah dengan target masyarakat setempat. Salah satunya kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR yang digelar di Medan, Sumatera Utara, pada 26 Juli 2022. Pesertanya, 150 orang relawan dari Rumah Aspirasi Romo Center.

Masih di daerah Sumatera Utara, Romo juga menggelar Sosialisasi Empat Pilar di Desa Pematang Johar, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang, Sabtu (8/2). Dalam kesempatan itu, Romo memberi dukungan atas program Desa Wisata Sawah yang baru-baru ini diresmikan Kepala Desa Pematang Johar. Proyek ini didukung oleh modal sosial dari keompakan masyarakat.

Romo berharap, proyek wisata sawah ini cepat tersosialisasi (viral), dan menjadi icon, serta prototipe desa yang berbasis pertanian (sawah). Dengan harapan menjadi desa yang maju dan mandiri, seperti tagline Pemerintah Desa Pematang Johar.

Menurut Romo, kehadiran program wisata sawah ini punya efek ikutan yang dapat mendorong peningkatan dana desa dari sektor retribusi. Juga membuka lapangan kerja baru bagi penduduk desa,

terutama generasi muda yang selama ini memilih menjadi buruh pabrik di perkotaan. “Dari apa yang saya lihat, kehadiran wisatawan ke Desa Pematang Johar ini telah membuka lahan pekerjaan baru, seperti parkir, cafe-cafe baru, kios-kios souvenir/cenderamata, warung kuliner yang memprioritaskan hanya kepada warga Desa Pematang Johar,” kata Romo.

Romo berharap, ke depan akan muncul wahana-wahana baru yang bernuansa pertanian dan alam, untuk memenuhi kecintaan masyarakat kepada pertanian, sehingga tidak lagi terjadi masyarakat desa mencari kerja ke kota sebagai buruh industri. Romo meyakini, nilai-nilai kearifan lokal, yaitu keompakan (guyub) masyarakat Desa Pematang Johar menjadi kekuatan dan pondasi nilai-nilai kristalisasi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). □

DER

Biodata

Nama Lengkap : **Romo H.R. Muhammad Syafii, SH, M.Hum**
 Agama : Islam
 Tempat, tgl lahir : Medan, 21 Oktober 1959
 Istri : Khairina Rosita

Pendidikan

- Lulus SD Negeri 88 Medan (1972)
- Lulus SMP Negeri 12 Medan (1975)
- Lulus SMA Josua Medan (1979)
- Lulus S-1 Hukum, Universitas Sumatera Utara (1988)
- Lulus S-2 Hukum, Universitas Sumatera Utara (2007)
- Lulus S-3 Ilmu Alquran dan Tafsir, PTIQ Jakarta (2023)

Karir

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (1997-1999)
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (2004-2009)
- Anggota DPR-RI (2014–2019, 2019–sekarang)
- Wakil Ketua Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra dan Wakil Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra periode 2020-2025

Organisasi

- Anggota Komisi Perundang-undangan MUI Sumatera Utara (2006-2011)
- Dewan Penasehat Wadoryu Karatedo Indonesia (2007-2012)
- Dewan Penasehat DPP Pujakesuma (2006-2016)
- Ketua Harian IKA Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2007-2011)
- Ketua Umum KAHMI Sumatera Utara (2007-2011)
- Pimpinan Majelis Wilayah KAHMI Sumatera Utara (2011-2016)
- Ketua Umum IKA Universitas Sumatera Utara (2018-2022)
- Wakil Ketua Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra
- Ketua Dewan Pembina Ormas FAHMI UMMI (2019-Sekarang)

Penghargaan

- Juara 1 Peserta Tingkat Nasional untuk P4 Pola 120 jam, dari BP-7 Pusat (1990)
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Ketua Pansus RUU Teroris (2019)

Membangun Ketahanan Demokrasi

KONSOLIDASI demokrasi merupakan tahapan paling krusial dari proses demokratisasi yang dijalankan oleh suatu negara. Pada tahap konsolidasi demokrasi semua kemungkinan bisa terjadi, seperti stagnasi demokrasi, pembalikan demokrasi, atau hal yang positif dalam bentuk akselerasi menuju demokrasi matang (*mature democracy*). Agar konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung saat ini berjalan dengan baik dan mampu mengatasi semua hambatan yang ada, maka perlu dibangun suatu ketahanan demokrasi yang kokoh sebagai fondasi dasar untuk mencapai visi demokrasi yang ditetapkan.

Ketahanan demokrasi (*democracy resilience*) adalah kapasitas demokrasi yang dimiliki oleh suatu negara untuk berdaya tahan dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap demokratisasi yang telah dijalankan. Dalam bahasa yang sederhana, ketahanan demokrasi adalah daya lenting dan kemampuan suatu negara untuk bangkit kembali setelah terpapar ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) terhadap proses demokratisasi yang sedang berlangsung. Ketahanan demokrasi menjadi elemen vital untuk menopang suatu negara agar tidak terjebak pada praktik politik dan pemerintahan yang melanggar prinsip-prinsip universal demokrasi.

Tujuan Nasional

Ketahanan demokrasi menjadi salah satu variabel penting yang perlu diatensi oleh segenap komponen bangsa yang berkomitmen untuk mewujudkan tujuan nasional. Demokrasi yang berdaya tahan tinggi merupakan fondasi untuk mewujudkan tujuan nasional secara efektif, efisien, dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Terlebih lagi Indonesia saat ini telah mencanangkan visi besar Indonesia Emas 2045, berkomitmen untuk menjadi negara pemenang (*the champ*) di panggung regional dan global, serta target besar untuk mengoptimalkan seluruh keunggulan komparatif (*agraris, maritim, bonus demografi*) menjadi keunggulan kompetitif yang berkorelasi lurus pada cita-cita terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Upaya untuk membangun ketahanan demokrasi adalah langkah

konkret untuk meletakkan demokrasi sebagai alat (*means*) dalam mencapai tujuan-tujuan nasional (*objectives*). Jika kita mencermati model pembangunan demokrasi di banyak negara berkembang (*developing countries*), belum ada kesinambungan atau linieritas antara demokratisasi yang dijalankan dengan kesejahteraan masyarakat sebagai *outcome*-nya. Dalam bahasa yang lebih lugas, demokratisasi yang dilakukan tidak sinkron dengan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bisa dicermati dari indikator-indikator di bidang perekonomian, seperti pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), tingkat inflasi (*inflation*), angka pengangguran terbuka (*unemployment*), dan sebagainya. Hal tersebut terjadi karena demokrasi yang dibentuk belum memiliki daya tahan yang kokoh. Ketahanan demokrasi yang rendah menjadi faktor utama yang menghambat tercapainya target-target konkret pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia pasca reformasi sejatinya telah berkomitmen untuk membangun demokrasi secara berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam banyak hal, seperti penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) oleh BPS RI sebagai dashboard proses demokratisasi, baik di level daerah maupun nasional.

Pemerintah juga memberikan atensi terhadap masukan dan analisis dari lembaga-lembaga global, seperti Freedom House dan the Economist Intelligent Unit (EIU) yang secara rutin menerbitkan indeks demokrasi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Ini menjadi modal sosial politik penting bagi penyelenggara negara dalam memajukan demokrasi Indonesia. Hanya saja ada dua persoalan krusial di sini. Pertama, apakah capaian demokrasi dalam bentuk IDI tersebut linier dan sinkron dengan target pembangunan nasional lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), daya saing nasional, dan sebagainya? Kedua, apakah model kuantitatif tersebut mampu secara utuh menangkap pesatnya dinamika sosial politik yang berjalan di masyarakat? Atau ada diskrepansi (*gap*) antara hasil kuantitatif dengan realitas sebenarnya di masyarakat?

Bagi saya pribadi, pertanyaan-pertanyaan tersebut menarik untuk dicarikan jawabannya. Poinnya adalah, jangan sampai demokratisasi yang dilakukan bergerak secara sendiri dan tidak terkoneksi dengan target-target konkret pembangunan nasional lainnya. Oleh sebab itu, pengukuran dan pencermatan terhadap ketahanan demokrasi

Oleh:
Dr. KH. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A.
Wakil Ketua MPR RI



yang sudah terbentuk menjadi perlu untuk dilakukan. Bisa jadi banyaknya persoalan dan tantangan nasional yang kita hadapi saat ini terjadi karena demokrasi yang dibentuk belum memiliki resiliensi yang tangguh, sehingga di dalamnya memiliki kerentanan-kerentanan. Hal ini tidak dialami oleh Indonesia saja, bahkan Amerika Serikat yang mengklaim sebagai nenek moyang demokrasi juga pernah mengalaminya. Kebijakan perang global melawan teror (Global War on Terrorism) di era Bush yang sangat intimidatif terhadap negara lain dan kebijakan Buy American di era Trump merupakan fakta empirik bahwa Amerika Serikat tak segan bertindak ambivalen terhadap demokrasi yang selalu mereka gaungkan.

Langkah-langkah Strategis

Lantas, bagaimana membangun ketahanan demokrasi yang kokoh bagi Indonesia? Hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan membangun kesadaran politik (political awareness) yang kuat di masyarakat. Kesadaran politik adalah suatu kapasitas untuk menilai proses dan dinamika politik kebangsaan yang berjalan. Pada tataran yang lebih mendasar, kesadaran politik adalah kemampuan untuk memahami apa saja yang menjadi hak dan kewajiban politik sebagai warga negara. Kesadaran politik akan menentukan banyak hal, utamanya adalah partisipasi politik masyarakat dalam tata kelola politik dan pemerintahan.

Masyarakat dengan 3 kesadaran politik yang tinggi merupakan modal sosial yang kuat bagi ketahanan demokrasi. Masyarakat jenis ini tidak mudah untuk dipecah belah dengan isu SARA atau politik identitas dalam kontestasi politik elektoral. Masyarakat jenis ini memiliki visi yang kuat dalam menyalurkan aspirasi, bahkan kritiknya terhadap pemerintah, sehingga ada checks and balances yang tercipta yang tentunya menjadi iklim yang sehat bagi demokrasi.

Hal kedua yang harus dilakukan adalah melakukan penegakan hukum (law enforcement) terhadap segala bentuk pelanggaran dan tindak pidana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi dapat terjerumus menjadi demokrasi semu (pseudo-democracy) atau bahkan demokrasi kacau (mobocracy) apabila tidak dipagari dengan rambu-rambu hukum yang kuat. Inilah yang menyebabkan mengapa begitu banyak terjadi hoaks, ujaran

kebencian, fitnah, dan kampanye negatif dalam kontestasi elektoral. Penggunaan media sosial yang sejatinya bisa mengeskalasi peradaban politik nasional justru berkembang menjadi sarana untuk merusak persatuan dan kesatuan. Hal-hal tersebut tentu tidak akan terjadi apabila dilakukan penegakan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum secara tegas akan menjadi deterrence effect terhadap pihak-pihak yang hendak merusak ketahanan demokrasi nasional.

Hal ketiga yang tak kalah penting adalah mencermati setiap dinamika yang berkembang dan potensial memengaruhi bobot demokrasi yang sudah terbentuk dan demokratisasi yang berjalan. Saya menaruh perhatian besar terhadap apa yang disebut sebagai megatrend demokrasi. Megatrend ini bukanlah suatu kecenderungan atau perubahan yang berlangsung singkat dan situasional, tapi berlangsung secara jangka panjang dan memiliki dampak besar di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, untuk menavigasi demokratisasi dengan baik, kita sebagai suatu bangsa dan negara perlu mengelola megatrend demokrasi ini dengan kebijakan yang tepat dan terukur. Ada beberapa megatrend demokrasi yang bisa kita identifikasi bersama dengan berpatokan pada durasi dan potensi keberlangsungannya ke depan seperti otonomi daerah, penguatan peran partai politik sebagai pilar demokrasi, perkembangan civil society, rezim Pemilu langsung, institusionalisasi demokrasi, serta partisipasi politik generasi muda.

Ketahanan demokrasi nasional perlu dibangun dan diperkokoh secara berkesinambungan oleh seluruh komponen bangsa tanpa kecuali. Baik pemerintah maupun masyarakat dengan segenap elemen di dalamnya memiliki tanggung jawab yang sama besar untuk mewujudkannya. Demokrasi bukanlah suatu konsepsi dan alat tunggal (a single tool). Ia terhubung dan menjadi penentu proses pembangunan nasional. Demokrasi yang kita bangun sepatutnya adalah demokrasi yang berdaya tahan yang memiliki daya lenting yang kuat ketika terpapar ancaman dan mampu bangkit lagi dalam mengejar tujuan-tujuan nasional. Dengan komitmen dan konsen yang kuat untuk membangun ketahanan demokrasi, apa yang kita canangkan ke depan akan lebih mudah untuk dicapai. □

Bersinergi dengan DPR Agar DPD Kuat

Lewat buku karyanya, Abdul Kholik, anggota DPD Dapil Jawa Tengah, ingin DPD mempunyai fungsi keparlemenan yang kuat. Parlemen, katanya, harus mencerminkan aspirasi semua komponen masyarakat. Relasi DPD-DPR harus sinergis sesuai tugas pokok dan fungsinya sehingga sistem parlemen berjalan efektif dan fungsional.

KEBERADAAN Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terjadi melalui proses amendemen UUD 1945 pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Pada perubahan ketiga – dari empat tahap perubahan – lembaga negara yang kemudian diberi nama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ini tertera (tercatum) di dalam Bab VIIA, Pasal 22C-Pasal 22D ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Meski proses pengisian, tugas, dan wewenang yang dimiliki tersurat jelas dalam konstitusi, namun keberadaan lembaga negara yang memiliki kantor di setiap provinsi itu, kedudukannya sampai saat ini belum maksimal, bahkan ada yang mengatakan antara ada dan tiada. Kondisi demikian tentu memengaruhi psikologi anggota DPD akan eksistensi dirinya.

Berbagai upaya tengah dilakukan agar lembaga negara yang memiliki kantor Sekretariat Jenderal di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, itu agar kuat dan bisa setara dengan lembaga negara lainnya, khususnya DPR. Untuk memperkuat DPD, salah satu upaya (keinginan) adalah menambah wewenang, dan wewenangnya itu diatur di UUD. Untuk menuju ke arah sana, berbagai kajian dilakukan dan berbagai pokok pikiran dituangkan dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian MPR, anggota DPD, maupun akademisi, yang diharapkan menjadi acuan. Salah satunya buku yang mengkaji soal DPD RI ini adalah karya Dr. Abdul Kholik, SH., MSi.

Abdul Kholik adalah politisi kelahiran Cilacap, Jawa Tengah, tercatat sebagai anggota DPD periode 2019-2024 dan terpilih kembali sebagai Anggota DPD periode 2024-2029 dari dapil Jawa Tengah. Sebagai anggota DPD RI yang aktif, alumni Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, itu tak ingin lembaga yang menaungi dirinya 'tidak setara' dengan DPR. Untuk menepis anggapan demikian, sembari berusaha untuk memperkuatnya, ia tuangkan pokok pikirannya dalam buku berjudul *Penyempurnaan Sistem Bikameral, Sinergitas DPD-DPR*.

Buku yang diterbitkan oleh salah satu penerbit yang beralamat di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, itu memiliki ketebalan xvi + 320

halaman, dan dibagi dalam tujuh bab. Dilihat dari judul bab dan subbab yang ada di buku itu, mantan aktivis PMII Cabang Purwokerto itu menulis sangat detail tentang keberadaan DPD, mulai dari terbentuknya, masalah yang dihadapi, dan bagaimana seharusnya lembaga ini diadakan.

Seperti di dalam *Prakata Penulis*, Abdul Kholik berharap, buku itu dapat memberikan kegunaan bagi pengembangan teori ilmu hukum, khususnya tata negara, yaitu berupa kerangka teoritik hubungan lembaga negara dan sengketa lembaga negara, khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada parlemen yang menggunakan sistem bikameral.

Lebih lanjut dikatakan, buku ini diharapkan dapat melengkapi kajian-kajian sebelumnya yang telah banyak ditulis. Tentu dengan beberapa hal baru dapat dijadikan bahan penelitian lagi ke depan, baik untuk praktisi maupun akademisi. Menurut Abdul Kholik, DPD dan DPR merupakan lembaga negara yang masuk dalam rumpun cabang kekuasaan legislatif. Kedua lembaga negara ini merupakan jenis lembaga lapis pertama, karena dibentuk dan dilahirkan secara langsung dalam konstitusi. Semestinya, harus sinergis sehingga parlemen semakin kuat dan efektif dalam kerangka sistem ketatanegaraan.

Menurut alumni Program S2 FISIP UI itu, di negara demokrasi modern manapun, posisi parlemen sangatlah strategis dan vital. Ia merupakan etalase yang mencerminkan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. Di lembaga ini disuarakan, dibahas, dan diputuskan segala hal menyangkut urusan rakyat dan negara dalam rangka menjalankan roda pemerintahan.

DPD dan DPR, menurut alumni Program Doktor Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah, itu berisi para wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Tugasnya adalah menyuarakan dan mewujudkan aspirasi masyarakat. Tujuannya tidak lain adalah agar mencapai tujuan dibentuknya negara, yaitu kesejahteraan rakyatnya. □

